



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENINGKATAN ARUS MIGRASI TENAGA KERJA WANITA-
PENATA LAYAN RUMAH TANGGA (TKW-PLRT) KE
PERSATUAN EMIRAT ARAB: PERSPEKTIF FEMINIS**

SKRIPSI

**MITA YESYCA
0806465560**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENINGKATAN ARUS MIGRASI TENAGA KERJA WANITA-
PENATA LAYAN RUMAH TANGGA (TKW-PLRT) KE
PERSATUAN EMIRAT ARAB: PERSPEKTIF FEMINIS**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial pada Program Studi Hubungan Internasional**

**MITA YESYCA
0806465560**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : MITA YESYCA

NPM : 0806465560

Tanda Tangan : 

Tanggal : 9 Juli 2012

Universitas Indonesia

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Mita Yesyca
NPM : 0806465560
Program Studi : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
Judul Skripsi :

**Peningkatan Arus Migrasi Tenaga Kerja Wanita-Penata Layan Rumah
Tangga (TKW-PLRT) ke Persatuan Emirat Arab: Perspektif Feminis**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Utaryo Santiko, S.Sos., M.Si.

Sekretaris : Aninda Tirtawinata, M.Litt.

Penguji Ahli : Avyanthi Azis, M.S.

Pembimbing : Ani Widayani Soetjipto, M.A.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2012

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih-Nya yang memungkinkan Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Isu mengenai Tenaga Kerja Wanita-Penata Layan Rumah Tangga (TKW-PLRT) merupakan isu yang hangat dibicarakan belakangan ini oleh berbagai kalangan. Sayangnya, hangat dibicarakan juga sekaligus membawa keprihatinan bagi mereka yang mendengarnya. Begitu banyak masalah, kait-mengkait, di bawah payung besar isu ini. Hampir selalu isu-isu tersebut menempatkan *perempuan* sebagai pihak yang kalah. Berbagai kajian sosial-politik kemudian lahir untuk menggagas isu tersebut lewat beragam perspektif. Salah satu dinamika migrasi pekerja domestik internasional yang menarik untuk dibahas saat ini adalah arus migrasi TKW-PLRT ke Persatuan Emirat Arab (PEA).

Dengan berlakunya moratorium Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi per 1 Agustus 2011 yang lalu, PEA semakin berpotensi untuk menggantikan posisi Arab Saudi sebagai negara tujuan terbesar pertama di kawasan Timur Tengah bagi para pekerja domestik migran asal Indonesia tersebut. Gerakan perpindahan mereka ke salah satu negara terkaya di dunia itu memiliki pola yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sama derasnya dengan isu-isu negatif tentang mereka yang mengalir di masyarakat. Bagaimana ini mungkin terjadi? Bukankah mereka telah mengetahui risiko besar yang akan mereka hadapi dengan mengambil pilihan menjadi TKW-PLRT di PEA? Inilah yang berusaha dikaji melalui bidang ilmu yang Penulis tekuni, yakni ilmu Hubungan Internasional.

Jika terkadang Ilmu Hubungan Internasional (HI) dianggap tidak mampu menggagas isu-isu yang bersifat personal, isu-isu yang dekat dengan pengalaman hidup sehari-hari; lewat tulisan ini, Penulis hendak menunjukkan bahwa justru tidak demikian halnya. Kajian ilmu HI tidaklah jauh dari pengalaman personal perseorangan. Bahwa individu, khususnya *perempuan*, bukan terbatas sebagai pemain figuran saat dinamika politik internasional itu berjalan. *The 'personal' is*

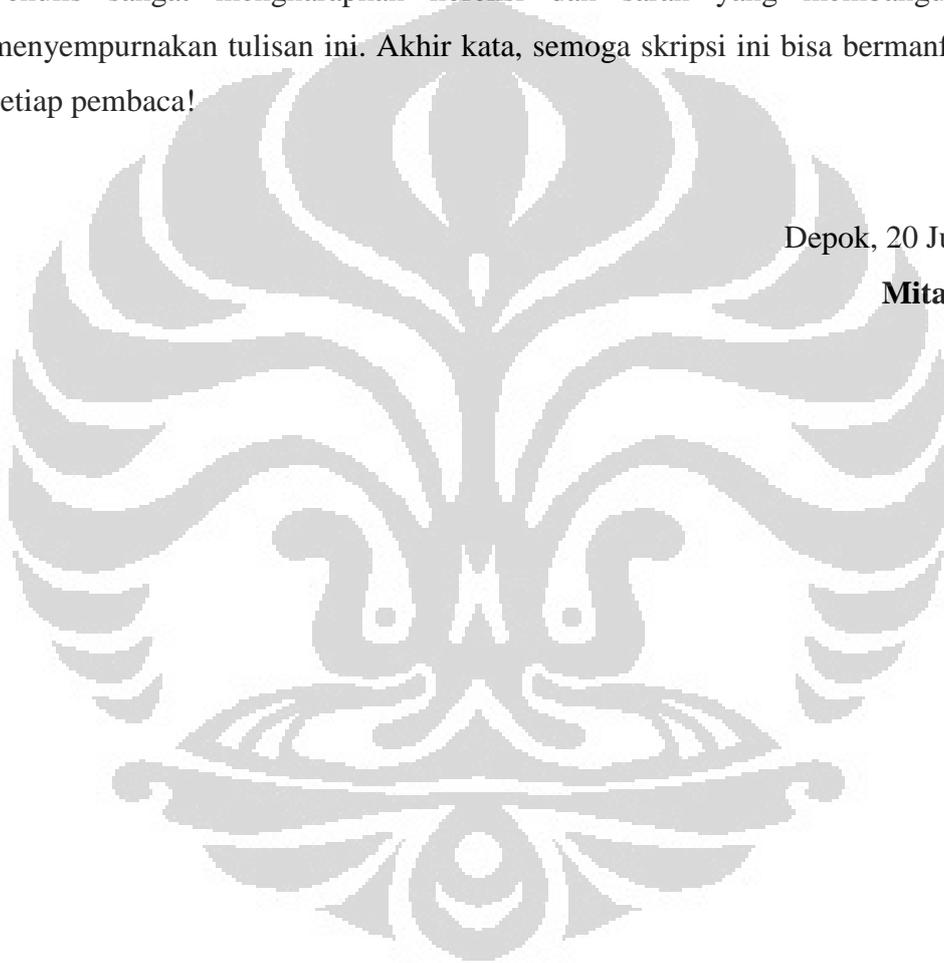
Universitas Indonesia

also political. Skripsi ini akan mencoba memperlihatkan bagaimana kedua kutub yang tampak berjauhan itu, personal dan internasional/global, terkait erat satu sama lain—lebih dari yang disadari oleh aktor-aktor di dalamnya, dalam hal ini: para TKW-PLRT yang bekerja di Persatuan Emirat Arab (PEA).

Bersemangatnya Penulis dalam mengerjakan skripsi ini tidak lantas membuat tulisan ini jauh dari cacat-cela. Tak ada gading yang tak retak, tidak ada tulisan yang sempurna. Demikian halnya dengan skripsi ini. Oleh karena itulah, Penulis sangat mengharapkan koreksi dan saran yang membangun demi menyempurnakan tulisan ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi setiap pembaca!

Depok, 20 Juni 2012

Mita Yesyca



UCAPAN TERIMA KASIH

All in all empat tahun perkuliahan ini adalah kisah kasih Tuhan Allah semata. Terima kasih kepada Dia yang Penulis kenal dalam nama Yesus Kristus. Untuk Bapa, Sahabat, dan Penghibur yang menemani Penulis setiap waktu sehingga Penulis tidak pernah merasa sendiri. *Engkau yang memampukanku untuk sampai di titik ini. Terima kasih karena selalu memberikan yang terbaik.* Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ani Widayani Soetjipto, M.A. selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia menyempitkan waktu-waktu bimbingan dengan Penulis di tengah padatnya agenda kerja beliau. Penulis sungguh bersyukur untuk setiap arahan dan dukungan dari beliau sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
2. Avyanthi Azis, M.S., selaku penguji ahli dalam sidang skripsi Penulis dengan segenap masukan yang membangun serta dorongan agar Penulis melihat ‘sisi lain’ dari skripsi ini—yang tidak dapat Penulis lihat sebelumnya. Terima kasih atas semangat yang ditularkan; semangat ini akan menjadi suluh untuk perjalanan Penulis berikutnya:) Juga kepada Utaryo Santiko, S.Sos., M.Si., selaku ketua sidang dan Aninda Tirtawinata, M.Litt., selaku sekretaris sidang skripsi Penulis yang telah sangat membantu dalam menyusun karya ini dengan lebih baik.
3. Dwi Ardhanariswari, S.Sos., M.A. sebagai dosen pembimbing akademis Penulis dan pengajar mata kuliah Seminar Pilihan Masalah. Berkat nasihat, bimbingan, dukungan, dan pengetahuan yang beliau berikan, Penulis dapat menjalani perkuliahan dengan baik selama empat tahun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga besar Departemen HI, khususnya para pengajar *cluster* Masyarakat Transnasional: Mas Ananta, Mas Pram, Mbak Nurul, Mbak Amalia, Mbak Pande, Mas Pierre, Mas Sayed, Mas Yosie, dan juga Mbak

Universitas Indonesia

Suzie yang telah mendorong Penulis dengan caranya tersendiri untuk menyukai ilmu HI. Penulis juga berterima kasih kepada Mas Har, salah satu dosen favorit Penulis, yang selalu bersikap ramah dan mendukung. Penulis kembali mengucapkan terima kasih kepada Mbak Riris yang telah menginspirasi Penulis untuk memilih *cluster* Masyarakat Transnasional. Tak lupa juga Penulis berterima kasih kepada Mbak Ayu, yang selalu direpotkan oleh Penulis mengenai ‘masalah persuratan’ dan kelas perkuliahan. Untuk Mas Roni, atas kesabarannya dan yang tidak pernah menolak jika Penulis meminta tolong untuk dicarikan buku. Untuk Mas Andre dan Pak Dahlan yang sering Penulis repotkan, khususnya selama Penulis menjadi asisten perkuliahan.

5. Mas Yosie, terkait operasi bimbingan bayangan selama ini. Terima kasih telah bersedia direpotkan Penulis, dan sungguh membantu lewat literatur-literatur dan kesempatan bertanya kapan pun—di tengah segudang kesibukannya itu. Terima kasih juga kepada Mbak Fitri, senior Penulis, yang sudah menyediakan waktu membaca tulisan awal skripsi ini.
6. Kak Ana Azmy dari Migrant Care, untuk diskusi dan tips-tips jitu mewawancarai narasumber dalam skripsi ini. Kak Ana-lah yang mendorong Penulis untuk bersegera turun lapangan dan mencari data. Berkat ‘bocoran’ dari beliau, Penulis dapat mengetahui cara untuk berkontak langsung dengan para TKW-PLRT yang merupakan ‘aset berharga’ milik PPTKIS, dan karenanya tidaklah mudah untuk mendapat kesempatan bertanya-jawab dengan mereka. Penulis juga sangat berterima kasih atas bantuan dari Pak Agus, Pak Taofik Hidayat, dan Bu Siti Kalimah yang begitu bersahabat saat Penulis berkunjung ke Pusdatinaker Kemenakertrans RI dalam rangka memperoleh data tahunan migrasi TKW-PLRT. Terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu Penulis dalam mencari data, mereka yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu pada baris-baris terbatas ini.
7. Keluarga besar Tanoto Foundation untuk dukungan serta berbagai pengalaman pembelajaran bagi Penulis selama perkuliahan. Terima kasih

Universitas Indonesia

kepada Mbak Vika yang cepat tanggap, tegas tetapi baik hati, selalu bersedia menjawab pertanyaan Penulis. Kepada Pak Chandra yang humoris dan menginspirasi Penulis agar memanfaatkan kesempatan belajar dengan baik. Kepada Pak Sihol dan Bu Ratih juga atas setiap didikan dan pesan dalam *sharing* yang berharga. Terima kasih untuk semua kesempatan yang diberikan kepada Penulis selama ini. Terima kasih juga kepada segenap TF Scholars untuk persahabatannya!

8. Keluarga Penulis: Papah-Mamah-Kak Rico, *where always in all ways big-big-big support comes from!* Makasih untuk pengertian, kesabaran, teguran, dan semangat yang tidak pernah habis kapan pun Penulis membutuhkannya. Keluarga adalah, sungguh, hadiah yang tak ternilai! Terima kasih juga untuk Yulan. Sahabat sekaligus saudara bagi Penulis. Lan, *really wish you were here*. Ayo, sini-sini ke Je-kar-tah! Keluarga besar Penulis: Jiko, Sako, Tuako, Om Alung, Mpek, Tante Mamiiek, Dian, Dina, Dinda, Mas Ricky, Mas Ronald dan Mbak Indah, Mas Reza, Mas Leo, dan semuanya yang telah membantu si anak manja ini berkuliah di Depok. Tanpa mereka, Penulis tidak akan sanggup menyelesaikan perkuliahan Penulis. Juga untuk Emak tercinta yang ada di Tawangmangu, Penulis merasakan dukungan yang sangat besar walaupun terpisah jauh.☺
9. Keluarga rohani Penulis: Makasih buat Yusdam, atas pertolongan tak terduga di waktu yang semakin mendesak. *Psst...dari dulu diem-diem aku kagum sama keberanianmu. Love you, Sista*. Buat Sorang, yang udah repot-repot menemani Penulis ke Gegerbintung, yang dari jam tujuh berangkat dan berasa *nggak* sampai-sampai tempatnya meskipun sudah lewat jam makan siang, makasih Sorang! *Dan aku kagum sama kedisiplinanmu (itu sih udah rahasia umum yah;)*. Buat Min Ah, makasih udah berhasil membuatku berhutang ijazah ke kau semester ini. Dengan ini hutangku lunas terbayar. *You are my role model*, jangan berubah ya! Makasih buat Yanti, yang menegur dan menguatkan saat sedang jatuh (hati-hahah). Makasih karena kau pindah ke kosan, dan menjadi saudara, saudara rohani, teman, kakak, dan mamah dalam satu paket spesial. Buat

Universitas Indonesia

Kak Moren, makasih Kakakku, untuk hari-hari ber-KK yang sangat berharga. Tetap semangat, tetap berjuang bareng yah Kak. Buat Mel, dan juga Reno, geng kosan yang ngga ada matinya. Makasih untuk hari-hari yang ceria dan bersemangat selama ini. Dan Mel, makasih untuk bagan presentasinya! Makasih untuk seluruh TKK-ku yang menjadi tempat berteduh di tengah panasnya perkuliahan. Masing-masing adalah kado cinta dari Tuhan selama Penulis berkuliah: Febrian, Ulpa, Mel, Sorang, Yanti, Yusdam, Min Ah.

10. AKK-ku terkasih Thika, Ory, Yo, Elda, Monic. Makasih sudah menjadi kado ulang tahun dari Tuhan di usia Penulis yang ke-20. Makasih untuk dukungan, semangat, cerita, kepercayaan, teguran, pengingat, dan kejutan yang indah selama dua tahun ini. Makasih sudah mau dicerewetin, digangguin, ditegur; dan juga sebaliknya, menegur kakakmu ini. Bersyukur bertemu dan mengenal kalian semua. Terima kasih karena kalian telah membantu Penulis menjadi pribadi yang semakin mengasihi Yesus. Oh, dan juga coklat semangatnya;) *it works!* Kepada adik Penulis, Debora: hey! Selamat melanjutkan perjuangan! Makasih sudah menjadi teman seperjuangan. Makasih khususnya, untuk bantuanmu kemarin. Itu sangat membantuku lho:)

11. Keluarga HI '08. “(Heii HI '08), anak-anak tampan. (Heii HI '08), anak-anak rupawan..” Tentu saja...*background by* Deny pastinya. Makasih teman-teman seangkatan semuanya, khususnya Dwi Chuwil yang imut-imut, Ipeh yang baik hati, Emir, Agung, Gita, Kun, Machfudz, Bom-bom, Adi, Mastraners: Raisa, Nico, Riza, Rialucky, Adhi, Iqbal, dan juga Rain. Para kakak tingkat dan adik tingkat yang ceria, terima kasih untuk semua tawa dan cerita selama ini. Khususnya teman-teman seperjuangan dan sebimbangan se-ke-rip-sih: Marga! Nasrul! *I think I'm gonna miss our 'rush hour'; or not?* Hahah. *One thing for sure, I'm gonna miss you, Friends.*

12. Keluarga besar PO FISIP UI: semuanya. Adik tingkat, kakak tingkat, semuanya. Bersyukur kepada Tuhan karena ada kalian. Sungguh. Untuk

Universitas Indonesia

rekan sepelayanan dan seangkatan, khususnya PKK '08: Deny, Tulus, Yonathan, Palar, Ami, Stefi, Lia, Devi, Ribka, Dina, Dika, Zico, dan para senior HI: Kak Frisca, Kak Anne, Kak Tasha, Kak Desca, Kak Theo, terima kasih sudah menjadi teladan yang memberkatiku. Terkhusus untuk Kak Frisca, yang selalu mau diganggu hanya untuk mendengarkan keluhan-keluhan Penulis walau sudah bukan pendamping PKK Penulis lagi. Terima kasih Kak! Juga buat Ucy, Hanna, Masniar, dan Christie, atas dorongan dan semangat di saat yang tepat. Tetap setia melayani yaa!

13. Keluarga besar Komisi Anak GKI Depok yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Vany, dengan kebawelannya, Kak Nice dengan nasihat-nasihatnya, Ntep yang bersahabat, Kak Rika yang heboh, Kak Omy yang nggak heboh cuma waktu sakit, Kak Anna yang baik hati, Kak Yole yang ceria, Kak Nita yang tegas, Kak Ruth yang lucu dan suka memberi semangat, Kak Ones, Kak Dede, Kak Simson, Kak Yohana, Femmy, semua, semua, semua. Makasih sudah menjadi tempat yang nyaman untuk dibentuk selama masa perkuliahan ini. Bersyukur menemukan kalian di semester IV kemarin.

14. *Last but obviously not the least*, C' Shinta, yang sudah menjadi teman berjuang jarak jauh, dengan saran-saran, pesan, dan cerita ampuhnya yang mengajar dan menegur.

Depok, 4 Juli 2012

Mita Yesyca

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mita Yesyca
NPM : 0806465560
Program Studi : S1-Reguler Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Peningkatan Arus Migrasi Tenaga Kerja Wanita-Penata Layan Rumah
Tangga (TKW-PLRT) ke Persatuan Emirat Arab: Perspektif Feminis**

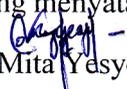
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas karya akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 9 Juli 2012

Yang menyatakan,


Mita Yesyca

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Mita Yesyca
 Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
 Judul :

Peningkatan Arus Migrasi Tenaga Kerja Wanita-Penata Layan Rumah Tangga (TKW-PLRT) ke Persatuan Emirat Arab: Perspektif Feminis

Migrasi Tenaga Kerja Wanita-Penata Layan Rumah Tangga (TKW-PLRT) ke Persatuan Emirat Arab (PEA) selama ini cenderung meningkat setiap tahun, seiring dengan meningkatnya isu-isu negatif tentang mereka di masyarakat. Hal ini dapat dipahami ketika analisis ditarik pada konteks ekonomi global rezim akumulasi kapital pasca-Fordis yang memungkinkan baik dimensi internal (analisis gender) maupun eksternal (analisis ekonomi-politik internasional) dalam kisah para TKW-PLRT di PEA untuk saling berinteraksi memelihara aliran migrasi perempuan pekerja domestik Indonesia ke PEA; kontras dengan sekian banyak masalah terkait TKW-PLRT yang ada selama ini. Feminis melihat bagaimana pengalaman yang berbeda antara perempuan di Indonesia dan PEA telah menjadi basis eksploitasi bagi kapitalisme, sehingga migrasi pekerja domestik internasional ini mengalir dengan arah yang demikian: dari negara dengan tingkat ekonomi yang relatif lebih rendah (pinggiran) ke negara dengan tingkat ekonomi yang relatif lebih tinggi (pusat)—dan bukan sebaliknya. Aktor-aktornya pun menjadi spesifik, yakni *perempuan*. Ini memperlihatkan bagaimana kapitalisme telah melanggengkan dan cenderung memanfaatkan relasi kuasa dalam gender laki-laki dan perempuan pada sebuah masyarakat. Organisasi kerja baru yang lebih fleksibel telah membuka kesempatan bagi bisnis-bisnis skala kecil seperti peluang kerja domestik, yang dengan cerdas telah memosisikan perempuan TKW-PLRT ini sebagai jawaban yang tepat, pengisi peluang sektor kerja domestik di PEA dengan segala kerentanannya.

Kata kunci: TKW-PLRT, migrasi internasional, perempuan, tenaga kerja domestik, Indonesia, PEA, gender, kapitalisme, kapitalisme pasca-Fordis, ekonomi-politik internasional, pusat, pinggiran, kerentanan

ABSTRACT

Name : Mita Yesyca
 Program of Study : International Relations
 Title :

**The Increase in Migration Flows of Tenaga Kerja Wanita-Penata Layan
 Rumah Tangga (Indonesian Women Domestic Workers) to the United Arab
 Emirates: A Feminist Perspective**

Migration flows of Indonesian Women Domestic Workers (TKW-PLRT) to the United Arab Emirates (UAE) tends to increase up till now, along with the increase of issues about them. This is understandable when the analysis is pulled to the global economic context of post-Fordist regime of capital accumulation that allows both internal (gender analysis) and external (international political-economic analysis) dimension in the story of the maids who have worked in the UAE to interact in particular way, maintaining the migration flows of TKW-PLRT to UAE; contrast with so many issues of them all this time. Feminist perspective is able to show how the different experiences of women in Indonesia and UAE have been the basis for exploitation of capitalism, so that the international migration of domestic workers is flowing with such direction: from periphery to core countries—not vice versa. The actors are also specific: *women*. Capitalism has tended to perpetuate and exploit gendered power relations between men and women. The new organizations of work which are more flexible have opened up opportunities for small-scale businesses such as domestic employment, which has been cleverly positioned Indonesian women as the answer filling domestic job opportunities in the UAE with all its vulnerabilities.

Keywords: TKW-PLRT, international migration, women, domestic workers, Indonesia, UAE, gender, capitalism, post-Fordist capitalism, international political-economy, core, periphery, vulnerabilities

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Rumusan Masalah.....	10
I.3 Metodologi Penelitian.....	11
I.4 Tinjauan Pustaka.....	12
I.5 Tujuan dan Signifikansi Penelitian	18
I.6 Kerangka Pemikiran.....	19
I.6.1 Feminis Global-Ekonomi Politik Internasional.....	19
I.6.2 Hipotesis Penelitian.....	21
I.7 Sistematika Penulisan	22
BAB II PENGALAMAN PEREMPUAN TKW-PLRT	23
II.1 Alasan Menjadi Tenaga Kerja Wanita-Penata Layan Rumah Tangga ...	23
II.2 Menuju Persatuan Emirat Arab.....	26
II.3 Situasi Kerja di Persatuan Emirat Arab	28
II.4 Analisis Gender terhadap Pemosisian Perempuan sebagai Pekerja Domestik: Perempuan sebagai Pelayan sekaligus Pencari Nafkah Keluarga.....	32

BAB III TKW-PLRT DALAM KONTEKS EKONOMI GLOBAL	34
III.1 Kemajuan Ekonomi Persatuan Emirat Arab dan Implikasinya	34
III.2 Pembangunan Ekonomi di Indonesia dan Implikasinya	42
III.3 Pembangunan Tak Berimbang Menjadi Faktor Penarik dan Pendorong Migrasi Tenaga Kerja Internasional.....	47
BAB IV ANALISIS	50
IV.1 Konteks bagi Munculnya Perempuan sebagai Aktor Pekerja Domestik dalam Pasar Tenaga Kerja Internasional: Perkembangan Kapitalisme Global Pasca-Fordis	51
IV.2 Spesifisitas Perempuan sebagai Aktor Pekerja Domestik Migran.....	55
IV.2.1 Pembangunan Tak Berimbang dalam Perkembangan Kapitalisme Global: Penentu Arah Aliran Migrasi Tenaga Kerja Domestik Internasional.....	56
IV.2.2 Hirarki Kuasa Ekonomi Pusat-Periferi dan Bias Gender di Dalamnya: Spesifisitas Aktor Pemeran Pekerja Domestik Migran Internasional.....	58
IV.3 Implikasi bagi TKW-PLRT.....	60
IV.3.1 Kapitalisme Pasca-Fordis: TKW-PLRT sebagai Pekerja yang <i>Precarious (Precarious Workers)</i>	61
IV.3.2 Penindasan Berlapis-lapis pada TKW-PLRT	64
BAB V KESIMPULAN	68
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

I.1 Total Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Pekerjaan (2004-2010).....	5
I.2 Jumlah Total TKI di Persatuan Emirat Arab Berdasarkan Kategori Pekerjaan dan Jenis Kelamin (2004-2007).....	7
III.1 Perkembangan Upah Minimum Propinsi 2006-2009 (Rp).....	44

DAFTAR GAMBAR

I.1 Grafik Total Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Wilayah Pekerjaan (2004-2010).....	6
I.2 Grafik Jumlah Total TKI di Persatuan Emirat Arab Berdasarkan Kategori Pekerjaan dan Jenis Kelamin (2004-2007).....	7
III.1 Produk Domestik Bruto Sektor Non-migas Dubai tahun 2000.....	37
IV.1 Bagan Skema Temuan Penelitian	50

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Migrasi internasional bukanlah fenomena baru dalam kajian ilmu Hubungan Internasional; namun kemunculan perempuan sebagai aktor di tengah arus perpindahan antarnegara ini dapat dikatakan baru dalam tiga dekade terakhir. Hal ini dikarenakan jumlah perempuan yang bermigrasi seorang diri—bukan untuk mengikut suami atau keluarga—semakin meningkat sejak awal tahun 1980-an, ketika tren feminisasi tenaga kerja bermula.¹ Pada tahun 2005 sebanyak 49,6% dari migran internasional adalah perempuan; jumlah ini meningkat dari tahun 1960 yang hanya sebesar 46,7%.²

Pekerja perempuan dari negara-negara berkembang yang berpindah ke negara maju berperan penting dalam membentuk komposisi jumlah perempuan migran internasional. Masyarakat di negara maju membutuhkan lebih banyak tenaga kerja murah untuk menggantikan peran-peran mereka dalam lapangan pekerjaan rendah; salah satunya adalah lapangan pekerjaan di ranah domestik. Kebutuhan pada sektor pekerjaan domestik meningkat tajam tahun 1990-an, terutama di wilayah Eropa Selatan dan juga di negara-negara Utara.³ Kebutuhan inilah yang kemudian dijawab oleh para perempuan migran dari negara-negara berkembang.

Derasnya aliran energi dan pekerja perempuan dari negara berkembang ke negara maju tersebut sayangnya justru jarang digambarkan dalam proses globalisasi. Padahal, tren ini menuntut adanya pemahaman baru terhadap proses globalisasi: Jika secara konvensional negara-negara berkembang dan negara-

¹ Gloria Moreno-Fontes Chammartin, *Domestic Workers: Little Protection for the Unpaid*, diakses dari <http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=300>, 16 Februari 2012, pk. 22.06 WIB.

² Data PBB tahun 2006, dalam Andrew R. Morrison, et al., ed. *The International Migration of Women*, (New York: Palgrave Macmillan, 2008), hlm. 5.

³ *Skilled female labour migration*, focus Migration Policy Brief, No. 13, April 2009, hlm. 2.

negara miskin yang dilihat bergantung kepada negara lain yang lebih sejahtera—kebergantungan ini ditandai dengan jumlah hutang yang tinggi kepada institusi finansial global; maka sebenarnya ada pula bentuk kebergantungan yang bekerja dengan arah berlawanan di dalam globalisasi. Yakni sebuah kebergantungan dalam hal yang lebih intim, bagaimana keluarga kelas menengah dan atas di negara maju bergantung kepada migran dari negara-negara berkembang untuk menyediakan perhatian kepada anak, pelayanan rumah tangga, hingga pelayanan seksual. Barbara Ehrenreich dan Arlie Hochschild menyebutkan bahwa pola migrasi perempuan ini mencerminkan apa yang disebut sebagai *revolusi gender*⁴; yaitu suatu perubahan pada peran-peran sosial laki-laki dan perempuan, yang terjadi dalam jangka waktu relatif cepat.

Baik di negara maju dan berkembang, jumlah keluarga yang dapat bergantung sepenuhnya pada laki-laki untuk mencari nafkah semakin berkurang. Di Amerika Serikat, peran laki-laki sebagai pencari nafkah telah merosot sejak tahun 1970⁵, dan banyak perempuan mulai ‘keluar’ untuk melakukan perubahan. Di sisi lain, sementara semakin banyak perempuan Eropa dan Amerika yang pergi-pulang untuk bekerja dalam sehari; banyak pengasuh dari Filipina, Sri Lanka, Indonesia, India serta negara-negara berkembang lainnya yang pergi berpindah untuk menggantikan peran domestik mereka. Beberapa perempuan migran dari negara berkembang ini menerima kesempatan untuk menjadi pencari nafkah independen keluarganya, serta kesempatan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup anak-anaknya sebagai semacam bentuk ‘kehormatan’ di dalam masyarakat patriarkis dari mana mereka berasal. Sementara bagi para perempuan pekerja migran yang kurang beruntung, mereka menghadapi berbagai tindak kriminal dari majikannya: paspor yang ditahan, pembatasan ruang gerak, dipaksa bekerja tanpa dibayar, hingga dipaksa untuk menyediakan jasa seksual sekaligus pekerjaan rumah tangga (membersihkan rumah dan merawat anak) dalam keluarga yang makmur.

⁴ Barbara Ehrenreich dan Arlie Russel Hochschild, “Introduction”, dalam Barbara Ehrenreich dan Arlie Russel Hochschild, ed. *Global Women*, (New York: Henry Holt & Company, 2002), hlm. 3.

⁵ Jane Riblett Wilkie, “The Decline in Men’s Labor Force Participation and Income and the Changing Structure of Family Economic Support”, dalam *Journal of Marriage and Family*, Vol. 53, No. 1 (Feb., 1991), hlm. 111.

Kompleksitas isu terkait fenomena migrasi tenaga kerja domestik global telah melahirkan beragam kajian dalam ilmu sosial-politik. Dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional (HI) sendiri, pendekatan feminis yang banyak berkembang sesudah masa Perang Dingin telah memungkinkan *gender* menjadi sebuah variabel sekaligus alat analisis kekuatan global yang relevan. Kajian-kajian yang sensitif-gender dalam HI kemudian, salah satunya, melihat bagaimana proses integrasi ekonomi global telah menciptakan ketidakadilan dan identitas gender; terutama bagaimana globalisasi ekonomi telah meningkatkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan—yang nyata pada *feminisasi kemiskinan* dan *pembagian kerja internasional berbasis gender*. Kritik lebih jauh, khususnya dalam melihat fenomena migrasi tenaga kerja domestik global, ditulis oleh Ehrenreich dan Hochschild yang melihat bagaimana para perempuan pekerja domestik migran dari Dunia Ketiga tersebut meraih ‘kesuksesan’ mereka *hanya* dengan berharap pada peran-peran domestik yang dilemparkan oleh perempuan kelas menengah dan tinggi di negara-negara Dunia Pertama—peran yang sebelumnya ditolak oleh laki-laki—dengan segala biaya atau risiko yang masih belum sepenuhnya dipahami.⁶

Memahami kembali fenomena migrasi internasional, dengan kompleksitas isu di dalamnya, menjadi sebuah upaya yang menarik ketika teori-teori migrasi internasional yang ada di dalam kajian HI sementara ini didominasi oleh pendekatan berbasis ekonomi. Dengan berkembangnya berbagai pemikiran dalam kajian ilmu sosial-politik selama beberapa dekade terakhir, yang salah satunya adalah pemikiran feminis, maka terdapat kebutuhan untuk memahami fenomena migrasi internasional dengan pendekatan yang lebih tajam. Tanpanya, identifikasi dan penjelasan atas keseluruhan struktur dan dinamika migrasi internasional yang bertujuan ekonomi ini pun menjadi tidak utuh; terlebih lagi dalam melihat berjalannya sistem migrasi pekerja domestik internasional kontemporer. Salah satu hubungan migrasi tenaga kerja domestik antarnegara yang menarik untuk dikaji sekarang ini ialah migrasi pekerja domestik Indonesia ke Persatuan Emirat Arab.

⁶ Barbara Ehrenreich dan Arlie Russel Hochschild, *op. cit.*, hlm. 4.

Menjadi salah satu negara pengekspor tenaga kerja perempuan dalam jumlah besar di masa kini; sebenarnya Indonesia telah mengirimkan pekerja migran ke berbagai negara tujuan seperti negara-negara Teluk, negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara sejak awal 1980-an. *State of the Population Report* yang dikeluarkan oleh United Nations Population Fund (UNFPA) menyebutkan bahwa dalam kurun tahun 2000-2003, sekitar 79% dari seluruh migran yang meninggalkan Indonesia untuk bekerja di luar negeri adalah perempuan.⁷ Dua tahun kemudian, pada tahun 2005, pemerintah mengumumkan bahwa terdapat sekitar 2,7 juta orang pekerja migran Indonesia yang tercatat bekerja di luar negeri. Jumlah mereka yang tidak tercatat diperkirakan dua hingga empat kali lebih besar.⁸

Dalam data terakhir yang didapat oleh Penulis disebutkan bahwa jumlah pekerja migran Indonesia seluruhnya kini mencapai 6,5 juta orang dan sekitar 75%-nya adalah perempuan yang bekerja di sektor domestik.⁹ Sementara itu, data sebaran penempatan seluruh tenaga kerja migran dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Timur Tengah lebih tinggi dibandingkan di kawasan lain di Asia.¹⁰ Berikut ini grafik total Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan wilayah pekerjaan diikuti dengan tabulasi jumlah tahunan pekerja migran Indonesia tahun 2004-2010 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

⁷ Mengutip dari *State of the Population Report*, UNFPA, dalam Glenda Labadie-Jackson, "Reflections on Domestic Work and the Feminization of Migration", *Campbell Law Review*, Vol. 31:67, 2008, hlm. 73.

⁸ Data ILO Jakarta, *Combating Forced Labour and Trafficking of Indonesian Migrant Workers*, 2008, dalam Sulistyowati Irianto, ed. *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 8.

⁹ Data dari Migrant CARE, dalam *Pemerintah Harus Serius*, *Kompas* edisi online, 19 November 2010, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2010/11/19/03035430/Pemerintah.Harus.Serius>, pada 24 April 2012, pk. 21.00 WIB.

¹⁰ Berdasarkan data litbang Kompas yang diolah dari BNP2TKI, *Kompas* edisi cetak, 26 November 2010, dalam Sulistyowati Irianto, *op. cit.*, hlm. 19.

Tabel I.1 Total Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Pekerjaan (2004-2010)¹¹

Wilayah Pekerjaan	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010*	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
terampil	68.648	47.559	136.607	60.267	136.607	60.267	112.975	64.520	dts**	dts**	78.963	24.955	78.831	39.075
tidak terampil	15.427	249.016	12.658	264.778	12.658	264.778	25.025	477.480	dts**	dts**	24.225	504.029	21.984	337.867
Total	84.075	296.615	149.265	325.045	149.265	325.045	138.000	542.000	200.188	548.637	103.188	528.984	100.815	376.942

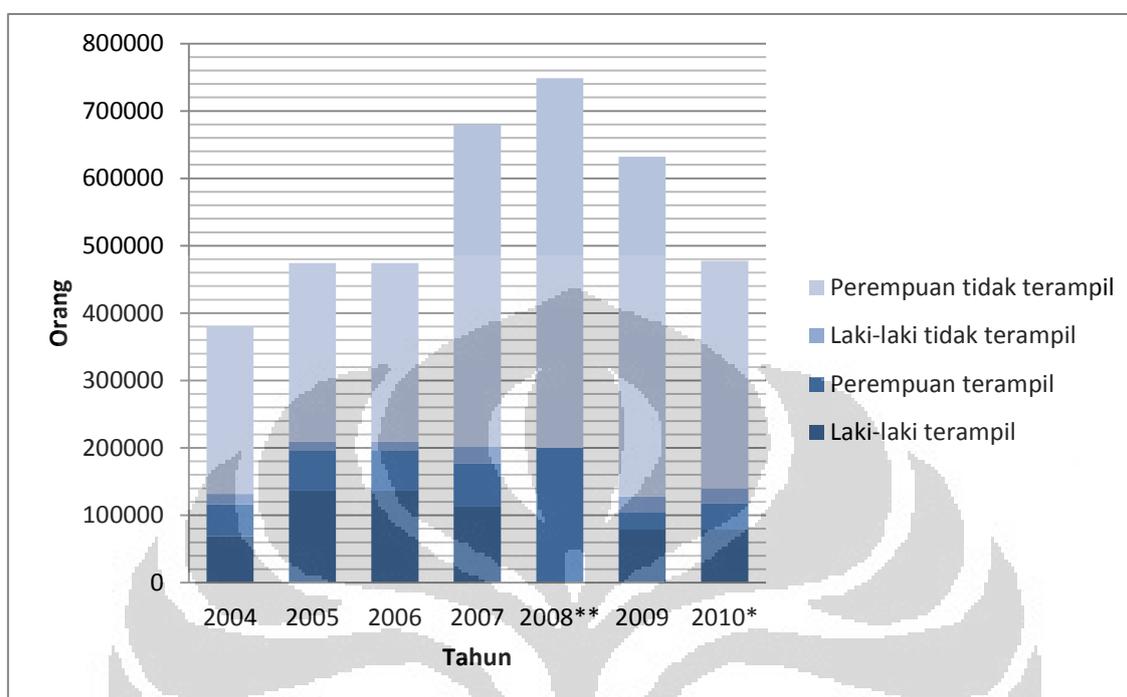
Sumber: BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Pusdatinaker-Balitfo Kemenakertrans

*hingga Oktober 2010

**data tidak tersedia

¹¹ Diolah dari Sulistyowati Irianto, *ibid.*, hlm. 9.

Grafik I.1 Total Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Wilayah Pekerjaan (2004-2010)¹²



*hingga Oktober 2010

**hanya tersedia data jumlah total pekerja migran laki-laki dan perempuan tanpa spesifikasi wilayah pekerjaan

Di antara negara-negara di kawasan Timur Tengah, Persatuan Emirat Arab (PEA) menjadi negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar kedua setelah Arab Saudi. PEA muncul sebagai salah satu negara terkaya dan termakmur di dunia oleh karena industri minyaknya. Bahkan pada tahun 1980, PEA merupakan negara terkaya dan termakmur di dunia dengan pendapatan per kapita 28.000 dolar AS.¹³ Ekonomi PEA yang bertumbuh pesat ini seringkali dipandang sebagai faktor penarik keputusan untuk bermigrasi.

Pada tahun 2004, perempuan pekerja migran merupakan persentase terbesar pekerja migran di negara-negara Teluk, termasuk di PEA. Perempuan pekerja migran tersebut merupakan hampir 30% dari seluruh arus migran di tahun 2000, naik jauh dibandingkan dengan 8% di awal 1980-an. Sementara itu, lebih

¹² *Loc. cit.*

¹³ Rima Sabban, *Migrant Worker in The United Arab Emirates: The Case of Female Domestic Workers*, GENPROM Working Paper No. 10, Series on Women and Migration, 2003, hlm. 2.

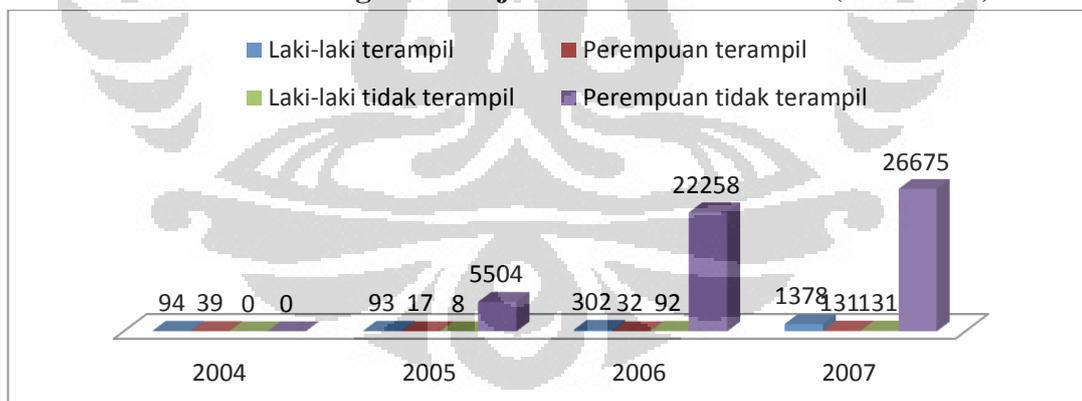
dari 90% pekerja Indonesia di Arab Saudi dan Persatuan Emirat Arab terdiri atas pekerja perempuan pada tahun 1997-1998.¹⁴ Sedangkan menurut catatan Kementerian Luar Negeri PEA tahun 2010, terdapat 87.000 orang Warga Negara Indonesia (WNI) di PEA dengan komposisi dominan sebanyak 85% disusun oleh TKI informal yang bekerja sebagai Penata Layan Rumah Tangga (PLRT).¹⁵ Dengan berlakunya moratorium TKI ke Arab Saudi per 1 Agustus 2011 yang lalu demi menunggu tersedianya perangkat hukum untuk menjamin perlindungan bagi TKI¹⁶, maka PEA semakin berpotensi untuk menggantikan posisi Arab Saudi sebagai negara tujuan terbesar pertama di kawasan Timur Tengah bagi para pekerja domestik migran asal Indonesia ini.

Tabel I.2 Jumlah Total TKI di Persatuan Emirat Arab Berdasarkan Kategori Pekerjaan dan Jenis Kelamin (2004-2007)¹⁷

Area	2004		2005		2006		2007	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Utama terampil	94	39	93	17	302	32	1378	131
tdk terampil	0	0	8	5.504	92	22.258	131	26.675
Total	94	39	101	5.521	394	22.290	1.509	26.806

Sumber: BNP2TKI

Grafik I.2 Jumlah Total TKI di Persatuan Emirat Arab Berdasarkan Kategori Pekerjaan dan Jenis Kelamin (2004-2007)¹⁸



¹⁴ Gloria Moreno-Fontes Chammartin, *loc. cit.*

¹⁵ Data diambil dari *Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pelayanan Warga (Citizen Service) pada KBRI Abu Dhabi Tahun 2010*, Unit Pelayanan Publik, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, hlm. 2.

¹⁶ *Moratorium TKI Tetap Berlaku Bagi Negara-negara Tertentu*, diakses dari <http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2012/01/05/7575.html>, 24 April 2012, pk. 21.00 WIB.

¹⁷ Diolah dari *Data dan Informasi Penempatan Tenaga Kerja*, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I., Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi, Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, 2009.

¹⁸ *Loc. cit.*

Terus meningkatnya arus migrasi tenaga kerja Indonesia ke PEA dari tahun ke tahun bukannya tanpa masalah. Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) telah mengidentifikasi sejumlah isu penting mengenai pekerja migran di Timur Tengah, termasuk di PEA pada tahun 2004¹⁹, sebagaimana telah diungkap pula dalam penelitian Sulistyowati Irianto, dkk. berikut:

- Upah rata-rata pekerja domestik per bulan di PEA pada tahun 2004 adalah 150-200 Dolar AS. Sayangnya, pekerja Indonesia tidak memenuhi standar tersebut oleh karena besar upah bergantung pada negara asal, keterampilan berbahasa dan pendidikan pekerja. Bahkan pekerjaan lembur tidak mendapat bayaran.
- Lebih dari 50% pekerja domestik di PEA yang diteliti mengalami kekerasan fisik (termasuk seksual), psikologis, dan lisan.
- Jumlah rata-rata jam kerja dalam seminggu adalah 101-108, jauh di atas standar internasional 48 jam seminggu. Semua perempuan yang bekerja di keluarga yang diwawancarai di PEA melaporkan bahwa mereka tidak diberi satu hari libur pun setiap bulannya—meskipun hari libur nasional di sana ialah setiap Jumat dan Sabtu.
- Selain itu, terdapat pula pelanggaran dalam sistem rekrutmen:
 - Broker/sponsor, baik di negara pengirim maupun negara penerima, sama-sama mengeksploitasi pekerja migran dengan memberlakukan biaya yang jauh lebih tinggi untuk paspor dan biaya lain untuk instansi pemerintah.
 - Perempuan dan keluarga mereka dihadapkan pada jeratan hutang dan harus bekerja untuk waktu yang lama tanpa gaji untuk menutup berbagai biaya dan ongkos. Dalam sejumlah kasus ketika deportasi terjadi, mereka bahkan kembali pulang dalam keadaan berhutang untuk waktu yang lama.
 - Seharusnya, pekerja domestik menandatangani kontrak di negara asal, tetapi kebanyakan dari mereka tiba di negara penerima tanpa pernah

¹⁹ Simel Esim dan Monica Smith, ed. *Gender and Migration in Arab States: the Case of Domestic Workers*, ILO, 2004, diakses dari http://www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/downloads/publ/publ_26_eng.pdf, 28 Januari 2012, pk. 20.09 WIB.

menandatangani kontrak. Beberapa di antaranya menandatangani kontrak dalam Bahasa Arab, yang tidak bisa dibaca atau dipahami.

- Dalam banyak kasus, kontrak tidak menjamin perlindungan terhadap pekerja yang gajinya ditahan selama beberapa bulan atau tahun, atau dari majikan yang menolak membayar sebesar gaji yang sudah ditetapkan atau tidak membayar sama sekali.
- Dan hal yang terburuk adalah tidak adanya sistem yang memadai untuk menangani keluhan pekerja asing. Hal serupa dinyatakan oleh temuan penelitian Dr. Pardis Mahdavi, seorang peneliti dari Pomona College di Amerika Serikat, mengenai perdagangan manusia di Dubai; bahwa apa yang tampak sebagai ‘organisasi non-pemerintah yang menangani keluhan para pekerja asing dan pengungsi’, sebenarnya hanyalah pusat logistik yang menjual kebutuhan-kebutuhan dasar seperti air, selimut, obat-obatan, dan sebagainya—bukan tipe organisasi non-pemerintah yang pada umumnya melakukan kerja-kerja sosial.²⁰

Di samping laporan penelitian dari ILO tahun 2004 tersebut, laporan lain yang bersumber dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Abu Dhabi juga menyebutkan hal yang tidak berbeda jauh. Ini berarti, enam tahun semenjak laporan ILO memberikan identifikasi atas isu-isu yang dialami oleh para pekerja migran di Timur Tengah; laporan dari KBRI Abu Dhabi pada tahun 2010 lagi-lagi menegaskan situasi berisiko yang dihadapi oleh para pekerja migran di PEA, spesifiknya oleh para pekerja migran asal Indonesia. Permasalahan yang paling menonjol dan sering dialami oleh para TKI di sana antara lain adalah menjalani hukuman tahanan dan meninggal dunia; oleh karena kasus gaji yang tidak dibayar sesuai perjanjian, tidak tahan dengan beban kerja yang diberikan, penganiayaan, pemerkosaan, penipuan oleh agen, pencurian, dan permasalahan sosial lainnya.²¹ Permasalahan-permasalahan tersebut mayoritas dialami oleh para TKI di sektor

²⁰ Pardis Mahdavi, *Gridlock: Labor, Migration, and Human Trafficking in Dubai*, (California: Stanford University Press, 2011), hlm. 5.

²¹ Data diambil dari *Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pelayanan Warga (Citizen Service) pada KBRI Abu Dhabi Tahun 2010*, *op. cit.*, hlm. 1-2.

informal, khususnya para pekerja domestik atau Penata Layan Rumah Tangga (PLRT) yang didominasi oleh *perempuan*.²²

I.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, Penulis mengangkat pertanyaan penelitian: **Mengapa arus migrasi Tenaga Kerja Wanita-Penata Layan Rumah Tangga (TKW-PLRT) ke Persatuan Emirat Arab tetap tinggi, di tengah banyaknya masalah yang dialami oleh para pekerja migran tersebut di sana selama ini?** Berdasarkan kuantifikasi data, jumlah kasus yang menimpa pekerja domestik migran Indonesia di PEA memang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan negara tujuan utama para TKI lainnya, yaitu Arab Saudi dan Malaysia²³. Akan tetapi, sedikit bukan berarti tidak ada, apalagi jika mengingat bahwa kuantifikasi data yang ada merupakan jumlah kasus-kasus yang ditangani oleh negara sedangkan jumlah permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan sangatlah mungkin jauh lebih banyak daripada yang tercatat. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkaji kondisi-kondisi yang menyebabkan derasnya aliran migrasi perempuan pekerja domestik ini—meski terdapat banyak masalah di dalamnya.

Penelitian ini akan mengkaji kondisi-kondisi apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan arus migrasi perempuan pekerja domestik asal Indonesia ke PEA, dan karenanya Penulis kemudian menjabarkan pertanyaan penelitian di atas ke dalam pertanyaan-pertanyaan operasional berikut:

²² Menurut penuturan Iwan Piliang, seorang *citizen reporter*, tentang pengalamannya berkunjung ke KBRI Abu Dhabi, "Setiap bulan mendekati angka 100 orang TKW yang harus ditampung di KBRI. Manca ragam masalah. Urusan gaji belum dibayar majikan, dipukuli, hingga dimaki-maki. Untuk kasus dimarahi, pihak KBRI kesulitan menghadapi. Bisa jadi, majikan marah karena sang TKW memang datang dengan ke-awami-an; alias tembak langsung dari *ndeso*, memakai mesin cuci saja kagok, misalnya.. Lebih mengesankan di perlakuan perkosaan..." Tuturan Iwan Piliang tersebut dapat diakses di <http://blog-presstalk.com/?p=337>, dengan judul catatan *Sketsa PEA II: Ibarat Puzzle Inilah Penggalan "Kombur" TKW & Ziad*.

²³ Meski tidak disebutkan berapa perbandingan jumlah kasus secara terperinci; tetapi dalam laporan yang sama dengan sebelumnya dari KBRI Abu Dhabi diakui bahwa 'dari segi kuantitas, jumlah permasalahan TKI di Abu Dhabi tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan permasalahan TKI di negara-negara Timur Tengah atau negara Jiran lainnya seperti Malaysia atau Singapura', hlm. 1.

1. Apa alasan perempuan Tenaga Kerja Wanita-Penata Layan Rumah Tangga (TKW-PLRT) untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab?
2. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melatari migrasi tersebut dilihat dari sisi Indonesia-Persatuan Emirat Arab?

I.3 Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam rumpun penelitian kualitatif berperspektif feminis. Penulis berupaya untuk membangun suatu penjelasan atas pertanyaan permasalahan yang diangkat dengan berpikir secara induktif, *grounded*, akan 'kekhasan' suatu kekuatan global yang beroperasi di tingkat mikro. Pembahasan dalam tulisan ini akan bersifat deskriptif sekaligus eksplanatif mengenai kondisi/konteks apa yang memungkinkan bagi derasnya aliran migrasi perempuan pekerja domestik Indonesia ke PEA, di tengah banyaknya masalah yang terjadi atas para pekerja migran tersebut.

Data yang dipakai dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai narasumber yang berperan sebagai mantan TKW-PLRT di PEA, sebagai basis data untuk menelaah kondisi internal yang memengaruhi arus migrasi; serta sponsor TKW-PLRT dan karyawan Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), yang dipakai sebagai basis data untuk mengulas dinamika eksternal yang memengaruhi arus migrasi. Untuk studi ini, Penulis melakukan wawancara kepada sembilan orang. Mereka terdiri atas tiga orang TKW-PLRT eks-Abu Dhabi, dua orang sponsor/agen pengadaan TKW-PLRT dari daerah Sukabumi, dan empat orang karyawan tetap PPTKIS.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dengan teknik ini, Penulis dimungkinkan untuk memilih sampel dengan tidak melalui mekanisme acak. Sebaliknya, Penulis memilih beberapa orang yang diyakini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Adapun data sekunder yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini yakni dokumen-dokumen mengenai statistik jumlah tenaga kerja domestik Indonesia di PEA, serta berbagai kasus yang menyangkut permasalahan tenaga kerja domestik Indonesia di PEA. Selain itu, juga berbagai literatur seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, situs internet, dan lain-lain, yang memuat tulisan-tulisan mengenai isu ini. Data primer dan sekunder kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi bagaimana peluang kerja domestik tidak terlepas dari perkembangan kapitalisme global.

I.4 Tinjauan Pustaka

Dalam bagian ini akan dilakukan tinjauan terhadap empat pustaka berikut yang berkaitan dengan topik penelitian, dan dengan tujuan agar lebih dapat memahami mengapa dilakukan penelitian ini dan di mana letak signifikansinya bagi perkembangan ilmu Hubungan Internasional dan ilmu sosial-politik secara luas:

1. Stephen Castles dan Mark J. Miller, "Theories of Migration", dalam *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, Fourth Edition*, (New York: The Guilford Press, 2009).
2. Rima Sabban, *Migrant Worker in The United Arab Emirates: The Case of Female Domestic Workers*, GENPROM Working Paper No. 10, Series on Women and Migration, 2003.
3. Titiék Kartika, Lim Sing Meij, dan Sulistyowati Irianto, "Potret Perempuan di Pasar Kerja Global", dalam Sulistyowati Irianto, ed. *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).
4. Nita Aswita Sugiri, *Fenomena Perdagangan Perempuan Pekerja Rumah Tangga (TKW-PRT) Indonesia: Perspektif Feminisme Marxist*, (Depok: FISIP UI, 2004).

Tradisi teori migrasi internasional bertumpu pada model yang berkembang dari pendekatan *neo-classical economics*, yakni model *push-pull factors*. Model ini berusaha menjelaskan penelaahan tenaga kerja sebagai kapital manusia. Ia memberikan pemahaman akan pertimbangan migran untuk melakukan perpindahan sementara, yakni berdasar pada pertimbangan keuntungan yang lebih besar di negara tujuan daripada di negara sendiri. Sayangnya, teori ini tidak dapat menjelaskan gerakan perpindahan aktual, dan tak mampu memprediksi gerakan perpindahan yang akan datang oleh karena analisisnya terlalu sederhana.²⁴ Model ini juga menerima keikutsertaan para migran yang berpindah secara pasif mengikuti faktor-faktor eksternal di daerah asal maupun tujuannya. Akibatnya, model ini tidak dapat secara tajam menjelaskan spesifisitas *perempuan* Indonesia pekerja domestik migran yang telah mengabaikan harga-harga sosial sebagai komponen dari keuntungan tadi—dengan tambahan catatan: kebanyakan harga sosial yang harus dibayar oleh para pekerja migran ini *jauh lebih besar* dibanding besaran keuntungan ekonomi yang didapat di negara tujuan.

Sementara itu, laporan penelitian yang ditulis oleh Rima Sabban menunjukkan signifikansi dari fenomena migrasi tenaga kerja domestik dalam arus migrasi internasional. Bagaimana migrasi tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor domestik ini ikut mengisi proses globalisasi sekaligus mengungkapkan realita yang dialami oleh mereka dan menunjukkan bahwa apa yang terjadi di tingkat global sanggup memberikan pengaruh pada tingkat personal. Penelitian Rima Sabban membuka isu gender dalam fenomena migrasi tenaga kerja domestik.

Pekerja domestik di PEA mayoritas berasal dari berbagai daerah di Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sabban mengumpulkan data yang komprehensif tentang kemajuan PEA yang berasal dari *booming* minyak di tahun 1970-an dan bagaimana pekerja domestik migran ditempatkan pada situasi itu. Penelitian Sabban memberikan latar belakang sosio-ekonomi dan politik dengan data yang kaya dari periode yang berbeda di tahun 1995 dan 2001.

Yang menarik dalam hasil studi oleh Rima Sabban ialah tarik-menarik antara budaya sebagai negara muslim Timur Tengah dan modernisasi yang

²⁴ Sulistyowati Irianto, *op. cit.*, hlm. 30.

berlangsung cukup cepat di PEA. Feminisasi tenaga kerja yang menjadi tren pada akhir dekade 1970-an telah banyak membawa perubahan nilai pada masyarakat Emirati. Tingginya kebutuhan terhadap pekerja domestik merupakan karakteristik yang tak dapat dilepaskan dalam pembangunan ekonomi dan sistem sosial di sana. Wawancara dan observasi langsung oleh Rima Sabban telah mengungkapkan gambaran keseluruhan realitas perempuan asing pekerja domestik dari berbagai negara yang ada di PEA berikut berbagai isu pelanggaran yang mereka alami.

Di akhir laporan ini Rima Sabban memberikan rekomendasi atas minimumnya peran pemerintah, agen rekrutmen, kedutaan-kedutaan besar, majikan, pekerja, organisasi nonpemerintah, dan Organisasi Perburuhan Internasional dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran terhadap pekerja domestik di PEA dengan mengubah kategori pekerja domestik tersebut ke dalam pekerja terampil. Jika ini dilakukan, maka para pekerja domestik tersebut akan mendapatkan perlindungan legal dari Hukum Ketenagakerjaan PEA. Tanpa perlindungan yang legal, keberadaan pekerja domestik hanya akan bergantung pada 'kemurahan hati' majikan dan sponsor mereka. Meskipun hasil penelitian Rima Sabban ini telah mendeskripsikan isu gender yang terdapat di dalam kasus migrasi tenaga kerja domestik di PEA; namun ia tidak membahas kekhasan pengalaman perempuan negara berkembang, seperti Indonesia, yang tentu berbeda dengan pengalaman perempuan pekerja domestik migran asal negara berkembang lainnya di PEA, misalnya Filipina; oleh karena studinya membahas gambaran kehidupan pekerja domestik migran di PEA secara umum.

Sedangkan laporan penelitian dari Titiek Kartika, Lim Sing Meij, dan Sulistyowati Irianto menjelaskan posisi perempuan dalam pasar global ketenagakerjaan; tulisan mereka memberikan pemahaman akan posisi kompleks yang dibawa oleh para migran perempuan pekerja domestik ini. Titiek Kartika, dkk., menyebutkan bahwa para pekerja domestik adalah subyek migrasi di mana mereka merupakan sumber daya manusia yang potensial. Di sisi lain, mereka juga adalah obyek migrasi yang menjadi komoditi di mana keberadaan mereka telah mendatangkan berbagai keuntungan bagi aktor-aktor bisnis dalam pasar global ketenagakerjaan. Akibatnya, akses mereka terhadap hukum sangatlah ditentukan pada apa yang disebut oleh Titiek Kartika, dkk., sebagai 'kelindan sosial' yang

berlapis-lapis, yang mereka bangun sejak berangkat dari desa hingga ke negara tujuan, PEA.²⁵

Kompleksitas itu bertambah ketika kelindan sosial yang terbangun bersentuhan dengan isu ras, kelas, negara, agama, dan budaya sehingga akses terhadap keadilan semakin sulit diwujudkan. Laporan penelitian dari Titiek Kartika, dkk., tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian Rima Sabban yang menunjukkan isu-isu pelanggaran yang dialami oleh pekerja domestik migran di PEA. Akan tetapi laporan penelitian Titiek Kartika, dkk., telah memberikan pemahaman lebih jauh akan kompleksnya situasi riil yang dihadapi oleh perempuan pekerja domestik migran asal Indonesia di PEA, sejak dari awal pemberangkatan hingga setibanya di rumah majikan di PEA.

Pengangkatan isu mengenai tenaga kerja domestik migran dalam ilmu HI, khususnya mengenai fenomena perdagangan perempuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia, pernah diangkat sebelumnya dalam skripsi yang ditulis oleh Nita Aswita Sugiri berjudul *Fenomena Perdagangan Perempuan Pekerja Rumah Tangga (TKW-PRT) Indonesia: Perspektif Feminisme Marxist*. Dalam skripsi tersebut dinyatakan bahwa fenomena migrasi internasional tak luput dari isu gender. Posisi perempuan yang lemah dalam masyarakat internasional seringkali dijadikan sasaran bagi praktik perdagangan perempuan, yakni bagaimana perempuan memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, informasi, dan sumber-sumber daya ekonomi. Sehingga, fokus permasalahan yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah praktik perdagangan perempuan yang bekerja sebagai tenaga kerja migran; terutama mereka yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dengan studi kasus di Indonesia.

Tulisan Nita Aswita Sugiri tersebut berhasil menunjukkan kelemahan pemerintah dalam penanganan masalah tenaga kerja migran. Disebutkan bahwa beberapa penyebabnya adalah budaya patriarkis yang berkembang di masyarakat dan adanya stereotip perempuan sebagai kelas kedua. Perempuan seringkali diabaikan dalam agenda pemerintahan. Nita menyebutkan, kelemahan pemerintah lainnya adalah tidak terkoordinasinya lembaga-lembaga dalam pemerintahan yang

²⁵ Titiek Kartika, Lim Sing Meij, dan Sulistyowati Irianto, "Potret Perempuan di Pasar Kerja Global" dalam Sulistyowati Irianto, *op. cit.*, hlm. 284.

menangani masalah TKW-PRT. Nita juga melihat kelemahan cara pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, yakni dengan membuka lapangan pekerjaan sektor informal bagi perempuan, namun tidak dilengkapi dengan pengakuan hukum yang jelas bagi mereka sebagai pekerja.

Kesimpulan dari penelitian Nita ialah bahwa tingginya praktik perdagangan perempuan belakangan ini disebabkan oleh budaya patriarkis dalam masyarakat, negara, dan sistem internasional yang menempatkan perempuan pada posisi terbawah sebagai tenaga kerja. Lemahnya posisi perempuan dijadikan alat bagi kapitalisme untuk meraup keuntungan. Kapitalisme yang didominasi oleh nilai-nilai patriarkis yang menjadi dogma dasar dalam arus globalisasi dan ikut menyumbang pada pelemahan posisi perempuan.²⁶ Tulisan Nita tersebut menarik dalam hal memberikan gambaran yang jelas bagaimana perempuan dijadikan komoditi dalam pasar global sekarang ini. Namun, penelitian ini cenderung menerima perempuan sebagai obyek yang pasif. Keterbatasan akses terhadap informasi dan pendidikan yang dialami perempuan, sebagaimana telah disinggung oleh Nita dalam skripsinya, memang dapat memberi penjelasan terhadap pertanyaan mengapa arus migrasi perempuan pekerja domestik tetap deras di tengah banyaknya masalah. Akan tetapi, melihat kepada hal ini saja akan seolah menafikan adanya peran jejaring informal yang tampak jelas dalam proses dimulainya dan dipertahankannya gerakan migrasi.

Hal itu pula yang nampak dalam tulisan Tirtawening Parikesit, Lim Sing Meij, dan Theresia Dyah Wirastrri; yakni bagaimana jejaring informal, termasuk di dalamnya yakni relasi interpersonal, kerabat dan pola rumah tangga, persahabatan dan tali komunitas, telah menjadi sumber daya vital bagi individu maupun kelompok migran dalam memperoleh informasi. Misalnya: pengetahuan tentang negara yang dituju, perilaku dalam mengorganisasi perjalanan, memperoleh pekerjaan, hingga beradaptasi di lingkungan yang baru.²⁷ Selain itu, satu hal yang belum disinggung juga dalam tulisan Nita adalah bahwa pengalaman perempuan terkait dalam sistem kapitalisme global tidaklah sama sama lain. Bagaimana

²⁶ Nita Aswita Sugiri, *Fenomena Perdagangan Perempuan Pekerja Rumah Tangga (TKW-PRT) Indonesia: Perspektif Feminisme Marxist*, tugas skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hubungan Internasional, (Depok: Universitas Indonesia, 2004), hlm. 147.

²⁷ Tirtawening Parikesit, Lim Sing Meij, Theresia Dyah Wirastrri, "Awal Sebuah Perjalanan: One Stop Recruitment Process" dalam Sulistyowati Irianto, *op. cit.*, hlm. 100.

pengalaman perempuan pekerja domestik migran dengan latar belakang sosio-ekonomi Indonesia ini bersentuhan dengan globalisasi ekonomi, kemudian mempengaruhi tren migrasi perempuannya, belum dilihat secara khusus.

Dari tinjauan pustaka di atas, terlihat bahwa gambaran tentang para migran pekerja domestik selama ini cenderung diterima bulat sebagai obyek dalam lalu lintas ekonomi global yang kapitalistik; tanpa mencoba melihat mereka sebagai subyek di dalam praktik yang eksploitatif tersebut. Implikasinya, ketika melihat berbagai kasus yang dihadapi oleh para perempuan migran pekerja domestik, sorotan hanya akan terarah pada pelanggaran-pelanggarannya serta kelemahan institusi negara dalam memberikan perlindungan. Pemahaman terhadap terus berjalannya, *bahkan makin derasnya*, proses migrasi perempuan pekerja domestik yang kontras dengan sekian banyak permasalahan ini justru belum mendapatkan perhatian lebih. Selain itu, upaya-upaya untuk memperjuangkan nasib para migran pekerja domestik pun selama ini cenderung terbatas pada mengemukakan kelemahan negara terkait migrasi sumber daya manusianya—melupakan bahwa sebenarnya negara *turut* berperan aktif dalam gerakan perpindahan ini.

Melihat bahwa sejumlah literatur yang ada belum mengkaji perempuan pekerja domestik migran sebagai subyek yang aktif terlibat di dalam proses migrasi tenaga kerja internasional; maka penelitian ini akan mencoba untuk menangkap gambaran keterlibatan perempuan pekerja domestik migran secara aktif, khususnya dari Indonesia yang bermigrasi ke PEA, dalam arus migrasi tenaga kerja internasional. Dengan cara ini, Penulis berupaya untuk mendapatkan penjelasan atas kondisi apa yang memungkinkan aliran migrasi perempuan pekerja domestik itu tetap deras, di tengah banyaknya kasus, pelanggaran, dan masalah-masalah lain yang dialami oleh para pekerja migran tersebut di PEA, bahkan hingga kini.²⁸

²⁸ Seperti yang dilaporkan dalam *Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pelayanan Warga (Citizen Service) pada KBRI Abu Dhabi Tahun 2010*, dan yang dilaporkan secara lebih 'transparan' oleh Iwan Piliang di dalam tulisannya, *Sketsa PEA I: Perjalanan Kemanusiaan; Ziad di Tanah Syeh Zayed*. Dapat diakses di <http://blog-presstalk.com/?p=335>.

I.5 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini berangkat dari studi sebelumnya mengenai pekerja domestik migran di PEA yang dilakukan oleh Rima Sabban dan Sulistyowati Irianto, dkk. Studi Rima Sabban telah memperlihatkan latar belakang sosio-ekonomi dan politik di PEA dan bagaimana pekerja domestik migran ditempatkan pada situasi tersebut. Sedangkan studi yang dilakukan oleh Sulistyowati Irianto, dkk., menampilkan fakta-fakta temuan yang menunjukkan gambaran yang kurang lebih sama dengan isu yang dikemukakan oleh Sabban sebelumnya; namun dengan kondisi terkini dan data yang lebih dielaborasi dari para pekerja domestik migran asal Indonesia di PEA. Studi yang dilakukan oleh Irianto, dkk., merupakan studi sosio-legal dengan hukum sebagai fokus utamanya.

Bagi kajian HI, penelitian ini akan menambah panjang daftar kontribusi pemikiran feminis seperti yang telah dilakukan oleh Nita Sugiri. Jika studi Nita Sugiri berfokus pada isu perdagangan perempuan dalam migrasi pekerja domestik internasional dengan studi kasus di Indonesia; penelitian ini berfokus pada fenomena migrasi pekerja domestik internasional itu sendiri, dari Indonesia ke PEA. Penelitian Nita Sugiri menjadi salah satu pendorong bagi para penstudi migrasi internasional dalam kajian HI, untuk memahami fenomena migrasi pekerja domestik internasional secara khusus dengan menunjukkan adanya isu-isu yang tidak mendapat bagian dalam tradisi teori migrasi internasional. Penelitian ini akan melengkapi ketiga penelitian tadi dengan tujuan menjelaskan spesifisitas perempuan sebagai aktor dalam migrasi tersebut sebagai sesuatu yang bersifat struktural, dan bahwa derasny arus migrasi pekerja domestik migran asal Indonesia ke PEA ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan kapitalisme global dari kacamata seorang feminis struktural.

Selain berguna bagi tujuan sosial ilmu pengetahuan untuk memberi pemahaman atas fenomena migrasi perempuan pekerja domestik Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan juga untuk dapat berkontribusi pada teori migrasi di dalam kajian ilmu Hubungan Internasional. Penelitian ini mencoba merefleksikan kisah perempuan pekerja domestik migran di dalam konteks kapitalisme global

dari kacamata seorang feminis, sehingga dimungkinkan adanya peluang untuk menjelaskan persinggungan berbagai isu yang ada di dalamnya.

I.6 Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang diajukan, Penulis akan menggunakan studi feminis dalam melihat buruh/pekerja. Perspektif feminis berguna sebagai kacamata untuk mengupas isu gender yang terdapat dalam ‘kekhasan’ kisah perempuan pekerja domestik migran asal Indonesia di PEA.

I.6.1 Feminis Global-Ekonomi Politik Internasional

Feminis melihat peran sosial perempuan dan laki-laki (gender) sebagai sebuah konstruksi sosial yang membedakan identitas, perilaku, dan ekspektasi terhadap laki-laki maupun perempuan, yakni berdasarkan dikotomi antara maskulin dan feminin. Sebagai sebuah konstruksi sosial, gender dipelajari oleh laki-laki maupun perempuan, dan karenanya ia dapat diubah. Gender bukan sebuah karakteristik individu, melainkan suatu fitur struktural dan melembaga dalam kehidupan sosial. Artinya, di satu sisi gender menjadi lensa yang dibebankan kepada setiap individu untuk dipakai dalam melihat dirinya sendiri dan dunia luar; sedang di sisi lain pemahaman terhadap gender membentuk konsep-konsep, praktik, identitas, dan institusi dalam pola-pola tertentu.²⁹ Karena itu, gender bukan saja menjadi kategori empiris yang merujuk pada pribadi laki-laki dan perempuan dan segala aktivitas mereka; tetapi juga sebuah kategori analisis yang secara konsisten merujuk pada konstruksi pengutamaan maskulinitas (*privileged masculinity*) dan peremehan terhadap feminitas (*devalORIZED femininity*) serta segala pengaruh ideologisnya. Menggunakan kacamata seorang feminis berarti menyatakan keberpihakan pada aktor feminin yang telah mengalami peremehan, dan karenanya cenderung mengalami ketidakadilan dalam relasi sosial tersebut.

²⁹ V. Spike Peterson, “Feminist Theories Within, Invisible To, and Beyond IR”, dalam *Brown Journal World Affairs*, Winter/Spring 2004, Volume X, Issue 2.

Menggunakan kacamata seorang feminis tidak hanya dapat mengungkapkan bagaimana peremehan pengalaman dan sudut pandang perempuan telah memengaruhi berjalannya relasi sosial dalam hidup sehari-hari; tetapi juga dinamika politik global yang menjadi kajian dalam ilmu HI. Namun demikian, kerentanan posisi perempuan sebagai akibat peremehan femininitas ini tidak bersifat identik satu sama lain; oleh karena pengalaman dan sudut pandang perempuan itu sendiri berbeda-beda, sehingga tingkat kerentanan yang dialaminya pun berbeda-beda. Pengalaman dan sudut pandang yang berbeda-beda ini pun dapat memaknai dan mengisi dinamika politik global secara berbeda pula. Dalam memahami berjalannya migrasi tenaga kerja domestik Indonesia ke PEA, Penulis menggunakan perspektif feminis global-Ekonomi Politik Internasional (EPI) yang berpihak kepada para perempuan negara pinggir, yang mengalami lebih dari satu macam praktik dominasi.

Berangkat dari globalisme sebagai salah satu perspektif yang dominan di dalam kajian ilmu Hubungan Internasional selain realisme dan liberalisme, perspektif feminis yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam penelitian ini merupakan kritik feminis dalam memandang sub-perspektif ekonomi politik internasional dari globalisme tersebut.³⁰ Sifat ekonomi yang disorot dalam ekonomi politik internasional ialah pasar-sentris (*market-centric*). Artinya, peran pasar menjadi dominan; berbeda dengan dua sub-perspektif lainnya dalam globalisme, yakni ekonomi nasionalisme dan ekonomi marxisme, yang mana masih menekankan peran negara sebagai sesuatu yang sentral.

Dalam pemahaman ekonomi politik internasional, kondisi dunia adalah seperti pasar kapitalis. Anggapan tersebut berdasar pada jumlah industri-industri yang tumbuh di tiap-tiap negara. Di level domestik, kondisi pabrik-pabrik yang dikuasai laki-laki menyebabkan posisi perempuan tertindas secara ekonomi. Feminis melihat bahwa dalam paham kapitalisme, di mana keuntungan hanya bisa diraih oleh aktor yang rasional sementara di dalam masyarakat, laki-laki-lah yang berada pada sektor publik sehingga mereka inilah yang dianggap sebagai aktor

³⁰ Georgina Waylen, "You still don't understand: why troubled engagements continue between feminists and (critical) IPE", dalam *Review of International Studies* (2006), 32, hlm. 145.

rasional; maka perempuan pun secara perlahan-lahan ‘menghilang’ dari sistem kapitalisme. Rasionalitas menjadi sebuah ciri maskulin. Dan sekalipun terdapat aktor perempuan yang bekerja, upah pekerjaan mereka pastilah berada di bawah tingkat upah pekerjaan laki-laki. Feminis secara spesifik menyorot kepada relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan di dalam sistem kapitalisme.

Pada level internasional, kapitalisme mempertahankan pesebaran kapital pada negara-negara tertentu dan dengan demikian terdapat kesenjangan ekonomi di antara negara-negara. Relasi ekonomi yang timpang antara negara pusat dan pinggiran akan terus berlangsung.³¹ Dan di level mikro, ketimpangan relasi ekonomi antara laki-laki dan perempuan pun terus terpelihara. Oleh karena laki-laki dipandang sebagai aktor rasional sedangkan perempuan tidak, maka perempuan akan selalu menjadi pihak yang dirugikan dalam sistem kapitalisme. Hirarki laki-laki negara pusat – perempuan negara pusat – laki-laki negara pinggiran – perempuan negara pinggiran selalu menyebabkan perempuan dari negara-negara pinggiran sebagai aktor yang kalah di dalam sistem kapitalisme global.

I.6.2 Hipotesis Penelitian

Berdasar pada argumen yang disampaikan di bagian pendahuluan dan kerangka pemikiran, Penulis mengajukan hipotesis bahwa:

1. Dunia berjalan dengan basis moda produksinya.
2. Arus migrasi tenaga kerja internasional dibentuk oleh sebuah sistem yang berlaku secara global yakni kapitalisme.
3. Subyek perempuan berdasarkan kategori produksinya bukanlah satu oleh karena adanya perbedaan dalam pengalaman perempuan.
4. Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke PEA didominasi oleh para perempuan yang bekerja sebagai Penata Layan Rumah Tangga dipengaruhi oleh dinamika internal dan eksternal aktor perempuan tersebut.

³¹ Barbara Ehrenreich dan Arlie Russel Hochschild, *op. cit.*, hlm. 8.

I.7 Sistematika Penulisan

Penelitian di atas akan disusun ke dalam lima bab. Bab I adalah latar belakang masalah, yang berisi tentang peningkatan arus migrasi perempuan dalam tren migrasi internasional serta gambaran mengenai migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Persatuan Emirat Arab, yang didominasi oleh perempuan dengan sektor pekerjaan informal (pekerja domestik). Dalam Bab I dirumuskan permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini, metode penelitian, tinjauan pustaka, penjabaran tujuan dan signifikansi penelitian, kerangka pemikiran yang mendasari analisis di dalamnya, hipotesis-hipotesis, serta sistematika penulisan.

Bab II dan Bab III akan membahas dinamika internal dan eksternal aktor perempuan pekerja domestik migran yang memengaruhi tingginya arus migrasi TKW-PLRT ke PEA. Bab II merupakan bagian pemaparan analisis gender yang merupakan dinamika internal. Dalam bab ini pengetahuan dan pengalaman perempuan pekerja domestik migran akan diuraikan secara deskriptif. Apa yang menjadi persepsi dan motivasi mereka, bagaimana kondisi kerja mereka di sana, serta masalah-masalah apa yang harus mereka hadapi dalam kapasitas mereka sebagai perempuan dan pekerja, khususnya sebagai TKW-PLRT. Bab III berisi analisis terhadap konteks ekonomi-politik internasional sebagai dinamika eksternal yang memengaruhi tingginya arus pekerja domestik Indonesia ke PEA.

Bab IV berisi keseluruhan analisis atas temuan penelitian dalam Bab II dan Bab III. Analisis akan disusun untuk memetakan kondisi-kondisi apa yang memungkinkan tingginya arus migrasi pekerja domestik asal Indonesia ke PEA yang berwajah perempuan ini. Terakhir, Bab V merupakan kesimpulan Penulis atas keseluruhan bahasan dalam penelitian ini, sekaligus jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan: kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan arus migrasi perempuan pekerja domestik Indonesia ke PEA, di tengah-tengah banyaknya masalah yang dialami oleh para pekerja migran tersebut di sana selama ini.

BAB II

PENGALAMAN PEREMPUAN TKW-PLRT

Bab II merupakan bagian pemaparan analisis gender. Dalam bab ini pengetahuan dan pengalaman perempuan pekerja domestik migran akan diuraikan secara deskriptif. Data dalam bagian ini diambil dari hasil wawancara dengan tiga orang mantan TKW-PLRT di Abu Dhabi: Bu Ayi, Bu Ami, dan Bu Siti (bukan nama sebenarnya). Apa yang menjadi persepsi dan motivasi mereka untuk berangkat kerja, bagaimana kondisi kerja mereka di sana, serta masalah-masalah apa yang harus mereka hadapi dalam kapasitas mereka sebagai perempuan dan pekerja, khususnya sebagai TKW-PLRT. Bab ini akan ditutup dengan analisis gender yang melatari pemosisian perempuan sebagai aktor pekerja domestik migran.

II.1 Alasan Menjadi Tenaga Kerja Wanita-Penata Layan Rumah Tangga

Berikut cerita Bu Ayi mengenai motivasinya berangkat ke PEA untuk bekerja sebagai TKW-PLRT:

“Untuk kebutuhan anak, pengen beli rumah. Berangkat ya berangkat aja. Kan kata orang enak ke Abu Dhabi, enak ke sini. Kan pengen nyobain. Kan itu, Timur Tengah itu kan negaranya juga Islam, muslim, gitu kan... Kan kalau Asia ga tau kan kita gimana. Mau sholat nggak boleh mungkin kan sama majikan... Makanan juga nggak tahu kan. Enakan di Abu Dhabi, nggak mau ke negara lain (tertawa).” (Gegerbintung, Sukabumi, 19 Mei 2012).

Sedangkan menurut Bu Ami yang berangkat kerja ke Abu Dhabi pada tahun 2003, 2005, dan 2009:

“Itu aja. Kalau misalnya suami, kurang gitu... ya udah milih berangkat. Kalau Mamah (ibu dari Bu Ami), ya gimana mungkin ya. Namanya juga orang tua kan. Ya kalau sebenarnya nggak pengen. Malah kalau bisa juga ya suka ngelarang

gitu. Tapi sama saya suka dibujuk (tertawa). Ya kan pengennya kan membantu rumah tangga, gitu... Gimana lah, namanya juga di kampung kan. Penghasilan suami, ya bukannya nyeselin suami... Penghasilan suami kerja bangunan kan nggak cukup buat beli susu. Ya udah, milih berangkat aja. Sering nyoba kerja di sini ya, cuman nggak ada...apa, kalau misalnya kerja di sini tu. Satu bulan misalnya kerja ya, dikasih gajinya, habis... Kan di sini gajinya kecil. Kalau buruh itu, paling waktu dulu ya, 300 (ribu) paling gede. Jakarta, paling gede. Dulu. Kalau sekarang mah kan 800 (ribu), (atau) 500 (ribu) buruh di sana.” (Gegerbintang, Sukabumi, 19 Mei 2012).

“Jangan ke Saudi, katanya. Kan pertamanya mau ke Saudi itu ya. Cuma kata pegawai PT, nggak usah ke Saudi dulu kalau yang non (belum pernah berangkat). Mendingan ke Abu Dhabi dulu. Kalau yang non kan kebanyakan ke Oman, ke Abu Dhabi, ke Bahrain. Jadi nggak langsung ke Saudi gitu. Jarang. Dulu pengen cari pengalaman yang lain. (Kenapa berangkat lagi ke) Abu Dhabi? Katanya, pengen gitu ya ke Malaysia yang lebih dekat, cuman serem gitu. Kalau di Malaysia kan banyak yang...ya dengernya yang jelek-jeleknya aja gitu. Jadi kitanya kan takut. Kalau ke Saudi, katanya orangnya galak-galak. Gitu ya. Kalau ke Abu Dhabi banyak yang bilang nggak terlalu kan gitu ya, enak. Nggak terlalu ‘panas’ juga. Kerjaannya kan kalau di Saudi itu suka dibikin-bikin kan kerjaannya. Ya kebanyakan lah.. ya tergantung nasib sih kalau itu juga. Tapi kan, tertariknya itu, majikannya nggak terlalu ‘panas’ gitu. Jadi nggak terlalu galak, kalau Abu Dhabi. (tertawa) Ya udah, pilih Abu Dhabi lah. Ganti majikan.” (Gegerbintang, Sukabumi, 19 Mei 2012).

Berbeda pula dengan tuturan Bu Siti yang sudah pernah ke Arab Saudi sebelumnya:

“(kalau ngandalin suami) Kan kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak. Buat sehari-hari. Di sini kan mungkin sama suami pake biaya makan, pake biaya anak... Mau ngelamar ke pabrik kan itu....katanya tuanya... (terdapat kendala usia untuk bekerja di pabrik). Ya kan sekarang mungkin banyak yang lulusan SMA, masih muda-muda, makanya...pilih yang lebih muda... Kalau ini (bekerja sebagai TKW-PLRT), yang penting bisa baca, bisa masak, bisa kerja. (Awalnya) Di

kampung kan suka denger... Abu Dhabi begini, Saudi begini... Cari pengalaman. Ke Abu Dhabi ma yang penting bisa masak. Katanya (majikan) mendingan (makan) di rumah, itu kelihat gitu, cara racikannya, masakannya. Kalau makan di luar kan nggak lihat.” (Gegerbintung, Sukabumi, 19 Mei 2012).

Setiap Tenaga Kerja Wanita-Pelayan Rumah Tangga (TKW-PLRT) yang Penulis wawancara memiliki motivasi ekonomi untuk bekerja sebagai TKW-PLRT, yakni demi pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya. Masing-masing narasumber juga menitikberatkan alasan keberangkatan mereka pada tidak tercukupinya kebutuhan keluarga jika hanya mengandalkan penghasilan suami. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, lapangan kerja di dalam negeri yang tersedia adalah sebagai buruh pabrik. Akan tetapi, rendahnya upah kerja sebagai buruh pabrik juga tidak memadai untuk menunjang pemenuhan kebutuhan keluarga. Sementara syarat bekerja sebagai TKW-PLRT termasuk mudah bagi mereka, tidak ada hambatan usia seperti pada pekerjaan sebagai buruh pabrik, dan mereka tidak perlu membayar uang transportasi seperti jika mereka bekerja di dalam negeri.

Dari kisah Bu Ayi, Penulis mendapati bahwa tidak semua pekerja memiliki informasi yang lengkap tentang PEA sebagai tempat bekerjanya. Sehingga motivasi mereka untuk berangkat kerja lebih banyak dipengaruhi oleh cerita-cerita yang beredar di sekitar mereka. Para TKW-PLRT ini berangkat bukan karena tertarik pada kemajuan ekonomi PEA di antara negara-negara kawasan Timur Tengah lainnya: melainkan lebih disebabkan oleh persepsi yang mereka terima tentang PEA sebagai negara muslim, yang cenderung lebih moderat dibandingkan dengan Arab Saudi—sesama negara Timur Tengah tujuan TKW-PLRT lainnya. Selain itu, persepsi mengenai PEA sebagai negara tujuan kerja yang beredar pada umumnya ialah lebih besarnya kemungkinan bagi TKW-PLRT untuk mendapatkan majikan yang relatif lebih “tidak mudah panas”, mengutip kata Bu Ami, daripada di negara lain. Keseluruhan kisah mereka menunjukkan kepada Penulis besarnya pengaruh jejaring informal di antara para TKW-PLRT terhadap motivasi dan persepsi mereka untuk bekerja sebagai pekerja domestik migran di PEA.

II.2 Menuju Persatuan Emirat Arab

Untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kerja di PEA, berikut kisah mereka:

“(Yang dicari yang bisa) *Ngurus anak, bersih-bersih.. (Dari PPTKIS) Syaratnya ijazah, KTP, KK, Akte. Dikasih aja. Nggak ada biaya pendaftaran. Diajarin bahasanya di Jakarta, kerja... Bersih-bersih... Ngurus baju. Enam belas hari. Cuma nunggu di rumah kan lama. Dua bulan. Tergantung majikannya di sana,*” tutur Bu Ayi (Gegerbintang, Sukabumi, 19 Mei 2012).

Sementara Bu Ami berkisah pengalaman persiapannya sebelum berangkat: “(Belajar) *Bahasa Arab. Scan mata, sidik jari... jadi paspor, sama identitas kita itu udah lengkap. Nungguin visa hampir dua bulan. (Setelah itu) Tinggal berangkat. (Ke sana) Bawa baju aja. Nggak perlu bawa apa-apa. Paling kita bawa apa, mukena gitu. Soalnya sana jarang yang pake mukena... Kalau (tiket berangkat) dari PT, dari sini ya, berangkatnya kan beli tiket yang murah, mungkin. Kadang-kadang kan transitnya tiga kali, empat kali. Kalau dari sana ke sini kan yang beli kan majikan. Jadi nggak, nggak transit. Paling di Singapura, gitu. Dulu nggak dapat uang fit. Mungkin tahun... 2008 lah. 2009, iya waktu berangkat. Itu kan, tadinya nggak mau berangkat. Sponsor itu membujuk, katanya sekarang dapet uang fit. Kalau dulu kan malah kita yang bayar... Sampai di sana dijemput sama agent-nya sana, terus diantar ke (kantor) agent. Nginep di sana. Kalau pas nunggu di sini kan bisa lama, gitu ya. Kalau udah sampai di sana nggak.*” (Gegerbintang, Sukabumi, 19 Mei 2012).

Berbeda pula dengan cerita Ibu Siti yang secara khusus bertanggung jawab di dapur selama bekerja di PEA:

“*Satu bulan... Tapi diajarin dulu, sama (pembantu) yang udah lama. Kalau di Saudi mah, menunya cuma itu-itu. Kalau di Abu Dhabi ma nggak, beda-beda menunya. Masak nasi aja beda-beda.*” (Gegerbintang, Sukabumi, 19 Mei 2012).

Dari tuturan mereka, Penulis melihat betapa minimnya persiapan mereka untuk menghadapi kondisi kerja di PEA. Pihak Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) hanya beberapa hari (enam belas hari menurut tuturan Bu Ayi) memberikan pelatihan berupa keterampilan berbahasa Arab, serta keterampilan mengurus pekerjaan rumah. Penuturan Bu Ami menunjukkan bagaimana persiapan dari Indonesia lebih banyak merujuk kepada hal-hal yang bersifat teknis seperti mengurus kelengkapan dokumen lamaran kerja dan uji kesehatan. PPTKIS juga tampak sangat memperhitungkan biaya persiapan kerja bagi para TKW-PLRT sementara untuk membujuk TKW-PLRT mereka menggunakan prosedur pemberian uang fit, yang belakangan Penulis ketahui adalah sejumlah uang yang diberikan kepada TKW-PLRT yang telah lolos uji kesehatan untuk menjadi TKW-PLRT sebagai penarik minat bekerja. Dan tampaknya strategi ini sukses menarik minat bekerja ke luar negeri para calon TKW-PLRT dalam kasus Bu Ami. Dapat dibayangkan ada banyak 'Bu Ami'-'Bu Ami' yang lain, yang menjadi tertarik untuk berangkat hanya karena pemberian uang fit di muka, sementara mereka tidak terlalu memusingkan soal persiapan atas kondisi kerja yang akan dihadapi di negara tujuan nantinya.

Persiapan bekerja sebagai TKW-PLRT cenderung dianggap sebagai masalah sepele karena asumsi bias gender yang melatarinya. Bahwa pekerjaan domestik (mengurus anak, mencuci, merawat rumah) adalah pekerjaan yang sudah sewajarnya dilakukan oleh para perempuan calon TKW-PLRT ini. Sementara pada kenyataannya, keterampilan berbahasa, hak-hak dan kewajiban para pekerja selama berada di negara asing kurang mendapatkan porsi di dalam pelatihan calon pekerja. Ini yang di kemudian hari dapat menimbulkan masalah ketika kondisi kerja yang dihadapi oleh TKW-PLRT tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan dan dipersiapkan sebelumnya.

Para TKW-PLRT tersebut dituntut untuk dapat segera menyesuaikan diri dengan kondisi kerja yang mereka hadapi sesampainya di sana. Di titik ini, terlihat bahwa PPTKIS di Indonesia 'bertanggung jawab' atas pekerja hingga mereka berangkat. Bagaimana para TKW-PLRT itu kemudian beradaptasi dengan lingkungan kerjanya adalah tanggung jawab pribadi dari mereka. Seperti yang

tampak dari kisah Bu Siti di atas. Walaupun sebelumnya Bu Siti pernah bekerja di Arab Saudi, namun pengalamannya di sana tidak terlalu bermanfaat untuk menghadapi tuntutan kerja yang baru di PEA. Beliau dengan segera harus mempelajari sendiri cara-cara memasak seperti yang diinginkan oleh majikan barunya di PEA. Kerja sama dengan rekan kerja domestik ataupun majikan sesampainya di rumah tempat bekerja menjadi sangat krusial dalam membantu penyesuaian diri TKW-PLRT di tempat kerja.

II.3 Situasi Kerja di Persatuan Emirat Arab

Ketika ditanya mengenai situasi bekerja di PEA, Bu Ayi menuturkan pengalamannya berikut:

“Jelas beda (antara Indonesia dan PEA). Bedanya orangnya, makanannya, cuacanya. Saya sampai sakit. Adaptasinya tiga bulan. Sebelumnya belum bisa Bahasa Arab, ya diam aja gitu, nggak tahu apa-apa. Disuruh ngambil ini, ngambil itu salah. Nggak tahu bahasa. Madamnya yang ngajarin, ini namanya ini, ini namanya ini. Masaknya gini, gini.. Madam sendiri yang ngajarin. Dia, asli orang Abu Dhabi, istrinya. Madamnya. Kalau suaminya orang India. Tapi udah tinggal di sana, udah lama. Tinggalnya di apartemen, nggak punya rumah sendiri. Ya kalau yang lain ada yang tinggal di rumah, tapi kalau yang ini kan belum punya rumah, masih ngontrak, di apartemen. Madam nggak kerja. Suaminya kuliah. Masih muda, baru nikah. Anaknya juga delapan bulan. Di rumah cuma saya satu (tenaga kerjanya). Kerjanya beres-beres di rumah... Bangun pagi, bikin sarapan, beres-beres, masak, nyuci... Bangunnya jam enam, dikasih jadwalnya sama majikan. Dijadwal. Sampai malam, jam sebelas. Itu udah selesai semua. Anak majikan saya belum sekolah, anaknya masih kecil. Baru satu tahun. Kalau punya anak sekolah kan repot. Pagi-pagi harus bikin sarapan kalau pagi. Istirahat boleh, dikasih. Abis makan siang... Nggak boleh keluar rumah, kecuali sama majikan. Ke pasar, beli sayur sama majikan tetep. Keluar ya pakai kerudung, tapi baju bebas. Kan dikasih uniform.” (Gegerbintung, Sukabumi, 19 Mei 2012).

“Gaji pertama 700. Tiga bulan, langsung 800. Sampai dua tahun 800. Jadi satu juta tujuh ratus... Tergantung dolar sih. Kadang nyampe dua juta dua ratus. Waktu pertama dateng, jadi dua juta dua ratus. Pas ke sini-sininya delapan belas. Turun lagi... Cuman itu, pertama dateng. Pas nerima gaji pertama, dua juta? Beeh... senengnya! 800 kan uang sendiri, nggak beli apa-apa. Makan, semuanya disediakan. Alhamdulillah tiap habis bulan, dapet gaji, dapet baju. Selalu rutin. Alhamdulillah betah. Insya Allah balik lagi nanti.” (Gegerbintung, Sukabumi, 19 Mei 2012).

“Agent nggak ngontak, cuman sekali aja waktu nganter pertama. Waktu pulang, pulang sendiri, sama majikan langsung ke airport. Paspor diminta selama di tempat majikan. Sampai pas mau pulang baru dikasih, sama tiket sekalian juga ya. Pokoknya tahu jadi aja, mau pulang tanggal berapa, tiketnya juga.. (tertawa) enak. Enak juga pas pulangnye ketemu keluarga.” (Gegerbintung, Sukabumi, 19 Mei 2012).

Sementara Bu Ami, yang sudah tiga kali berangkat ke Abu Dhabi memiliki pengalaman dengan dua majikan yang berbeda, yang pertama adalah orang Abu Dhabi dan majikannya yang terakhir adalah keluarga India:

“Iya, beda. Kalau yang pertama, kegiatannya dari nyapu sampai nyetrika. Nah, nggak masak. Cuman ada tukang masaknye di situ. Kalau yang kedua ma itu, lebih enak! Cuman ngurus anak doang, gitu... Kegiatannya tidur, makan, jagain anak. Kalau bangun pagi tergantung anak, kalau misalkan anak bangunnya jam 9, saya jam 10 bangun. Kalau malemnya ya tergantung, kalau anak kan nggak tentu. Ada dua (pekerja) di rumah majikan yang terakhir. Yang satu dari Srilanka... Saya megang anak, baru lahir, baru dua bulan. Anaknye yang kedua. Kalau pembantu yang Srilanka ngurus kerjanye di itu, di rumah... saya cuman megang anak doang. Di rumah ada enam orang. Bahasanya Arab, Inggris, ada India juga. Awalnya nggak bisa Bahasa India. Dikasih tahu kan sama Madam, orang India, sama orang Srilanka... Waktu pertama kali ke situ, kebetulan banyak orang Indonesia, gitu. Di situ, jadi dikasih tahu, sedikit-sedikit...” (Gegerbintung, Sukabumi, 19 Mei 2012).

“(Di sana) Nggak boleh megang HP. Ya, jarang yang dikasih sama majikan. Makanya (kalaupun ingin berkomunikasi dengan keluarga), suka minta aja sama majikan. Paling kalau dulu mah, masih jarang kan ya HP... paling lewat surat.” (Gegerbintung, Sukabumi, 19 Mei 2012).

“Waktu itu... (Gaji) Cuma nyampe 15, satu juta setengah... Dulu waktu 2003. Kalau yang sekarang lumayan, nyampelah dua juta. Yang 2010. Jadi waktu pertama itu gaji 600. Pas udah dua tahun jadi 700. Kalau yang 2010 itu kan umumnya udah 800. Majikan yang kirimin.. Dikasih nomor rekening aja. Nanti majikan yang kirim. Kalau dulu.. kan ada Western Union kan udah banyak ya. Yang satu jam udah nyampe.” (Gegerbintung, Sukabumi, 19 Mei 2012).

Bu Siti sebelumnya pernah bekerja sebagai TKW-PLRT di Arab Saudi. Mengenai pengalamannya di Abu Dhabi, Bu Siti bercerita:

“Kalau (majikan) yang laki-laki ma..(bekerja sebagai) polisi. Tapi kalau adiknya ma suster. (Di rumah ada) Ibunya, itu majikan laki-laki sama istrinya, anaknya tiga, itu adiknya yang bungsu, perempuan.. Kalau Ibunya kan udah tua. Kalau itu ma adiknya masih bekerja. Anaknya ada tiga, udah besar-besar. (Ada) Pembantu laki-laki mah di luar, cuci mobil. Saya bagian masak di dapur, nyuci, bersih-bersih di dapur. Yang itu (pembantu perempuan yang lain) ngurus anak, di rumah. Bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar mandi, tempat tidur, gitu yang satu lagi. Kalau yang masak mah kita ya, bikin susu, gitu... Gaji orang Ethiopia (kedua pembantu yang lainnya) mah cuma 500. Kalau mereka ma jam 10 atau mungkin setengah 10 juga udah pada tidur... Beda kalau orang Indonesia mah. Udah beres juga, ada apalah ya, nyetrika... Nyetrika. Nggak diem sampai jam 12, setengah satu kadang. Bangun pagi jam setengah enam, atau jam lima kan mungkin sholat dulu. Nyiapin ini-itu... buat susu, roti, kan majikan laki-laki, mau pergi minum susu dulu. Kalau udah beres semua yang di dapur, nyetrika. Ada libur, kalau hari Jumat-Sabtu... kalau udah beres mah... kita bebas... Semuanya suka kalau di Abu Dhabi mah... Tapi eee, itu capek! Kan masak. Apalagi kalau hari libur mah masaknya, apa namanya, banyak-banyak gitu...” (Gegerbintung, Sukabumi, 19 Mei 2012).

“Saya sendiri kalau dimarahin diem, kalau orang Ethiopia, orang Filipin ma nggak. Ngomong. Makanya dia lebih sayang sama orang Indonesia..” (Gegerbintung, Sukabumi, 19 Mei 2012).

“Lebih terbuka sama majikan laki-lakinya.. Kalau yang di Saudi ma tertutup, sama majikan perempuan juga. Kalau di Abu Dhabi mah bebas, bisa ngomong sama majikan laki-laki. Kalau di Saudi mah, buka pintu aja jangan! Iya.. Dia yang buka. (Sementara di PEA) Kalau ada masalah sih ngomong gitu sama majikan. Seperti di kita mah kayak...keluarga gitu di Abu Dhabi... Enakan yang Abu Dhabi. Kalau di Abu Dhabi mah rumah kecil juga, tiga pembantunya...” (Gegerbintung, Sukabumi, 19 Mei 2012).

Beragam pengalaman Bu Ami ini menunjukkan kepada Penulis bahwa memutuskan pergi berangkat kerja sebagai TKW-PLRT ibarat pergi bertaruh dengan nasib. Perempuan pekerja yang berangkat hampir tidak bisa mengetahui dan mempersiapkan berbagai kemungkinan kondisi kerja yang akan ditemuinya di tempat tujuan (apalagi dengan minimnya pembekalan yang diberikan oleh PPTKIS selaku penanggung jawab proses kerja mereka). Khususnya di PEA yang sangat multikultur; meskipun sebelum berangkat Bu Ami telah dipersiapkan dengan ketrampilan kerja dan bahasa (yang sangat minim) oleh PPTKIS, namun kondisi kerja Bu Ami di lapangan sangat jauh dari apa yang telah dipersiapkan. Lagi-lagi kondisi kerja yang tidak menguntungkan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab para TKW-PLRT. Kemampuan TKW-PLRT untuk menyesuaikan diri dan keberadaan rekan kerja atau majikan yang ‘murah hati’ untuk membantu berperan penting selama masa kerja TKW-PLRT di sana.

Perihal jam kerja dan besarnya gaji nampak bersifat variatif. Tuntutan kerja TKW-PLRT sangat bergantung pada keluarga majikan tempat TKW-PLRT itu bekerja. Hal ini berpotensi besar bagi eksploitasi terhadap perempuan pekerja domestik ini. Begitu pula untuk jumlah gaji yang diterima TKW-PLRT. Meski standar jumlah gaji telah ditetapkan oleh agen penyalur tenaga kerja, namun dalam kasus Bu Ayi pada bulan pertama beliau bekerja gaji yang diberikan oleh majikannya hanya sebesar 600 Dirham. Di bawah standar gaji 700 Dirham yang ditetapkan agen. Beruntung majikan Bu Ayi mau mendengarkan keluhan Bu Ayi

sehingga gajinya kemudian dinaikkan menjadi sejumlah 700 Dirham dan setelah tiga bulan bekerja gajinya dinaikkan lagi menjadi sebesar 800 Dirham.

Melalui tuturan kisah Bu Ayi dan Bu Ami, potensi kerentanan yang dihadapi oleh TKW-PLRT ini juga dapat ditemukan pada lepas tangannya agen penyalur tenaga kerja di sana setelah TKW-PLRT berada di dalam rumah majikan. Kontak dengan agen hanya dilakukan sekali, ketika mereka tiba di Abu Dhabi, selepas itu agen tidak pernah menghubungi mereka. Penulis sempat bertanya kepada Bu Ayi saat itu, apakah beliau mengetahui letak KBRI Abu Dhabi. Hal yang mengagetkan adalah ketika Bu Ayi menjawab tidak. Besar kemungkinannya tidak setiap TKW-PLRT mengetahui ke mana mereka harus melapor jika mereka menghadapi masalah selama bekerja. Sementara, paspor milik mereka berada di tangan majikan dan baru akan diberikan ketika mereka akan pulang ke Indonesia. Sikap majikan yang meminta paspor TKW-PLRT selama bekerja ini belakangan diketahui Penulis sebagai upaya untuk mencegah TKW-PLRT kabur dari rumah sewaktu-waktu sebelum masa kontrak kerjanya habis (per dua tahun). Meski demikian, tindakan tersebut sebenarnya sudah melanggar hak TKW-PLRT untuk menyimpan paspornya sendiri selama bekerja. Sayangnya, tidak semua TKW-PLRT telah sungguh-sungguh paham akan hak dan kewajiban yang mereka miliki sebagai pekerja migran, dan ini dapat dipahami mengingat singkatnya waktu pelatihan yang dilakukan oleh PPTKIS sebelum berangkat.

II.4 Analisis Gender terhadap Pemosisian Perempuan sebagai Pekerja Domestik: Perempuan sebagai Pelayan sekaligus Pencari Nafkah Keluarga

Temuan penting dari kisah pengalaman TKW-PLRT ini adalah deskripsi tentang kompleksitas situasi yang dihadapi oleh para TKW-PLRT ini dan bahwa masuknya perempuan ke dalam sektor kerja domestik sebagai salah satu sektor kerja informal yang rentan ini disebabkan oleh gender yang melekat pada mereka. Peran sosial perempuan dalam keluarga yang nyata dari refleksi kisah di atas adalah untuk memelihara keluarganya. Peran sosial ini kemudian melahirkan

beban lanjutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan cara bekerja di luar rumah ketika mereka menyadari bahwa pekerjaan suami mereka tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Perempuan diharapkan untuk lebih tidak memikirkan diri sendiri daripada laki-laki dan untuk melayani keluarganya sebagai prioritas. Sehingga ketika peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama tidak dapat dipenuhi; wajar jika perempuan kemudian sebagai pelayan keluarga harus turun tangan, dengan implikasi: terbatasnya keterampilan perempuan yang bernilai ekonomi tinggi membuatnya bergantung pada pekerja-kerja yang tidak bernilai ekonomi tinggi pula, seperti sektor kerja domestik.

Selain tidak bernilai ekonomis tinggi, sektor kerja informal semacam ini sangatlah rentan terhadap pelanggaran. Pengakuan Bu Ayi bahwa beliau tidak merasa takut saat berangkat karena yakin bahwa masalah majikan yang baik atau tidak baik di PEA adalah 'soal nasib', menyiratkan bahwa mereka mengetahui posisinya sangat rentan sebagai aktor migrasi pekerja domestik internasional ini. Usaha mereka untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga pada akhirnya sangat bergantung pada lingkungan kerja mereka. Hal ini sekaligus menunjukkan, bukannya mereka tidak mengetahui risiko besar yang akan mereka hadapi dalam pekerjaan mereka, namun peran sosial mereka di dalam keluarga telah mendesak mereka untuk memosisikan diri sebagai aktor yang paling tepat untuk menjawab permintaan pekerja domestik di luar negeri.

Bab selanjutnya akan mencoba menunjukkan bagaimana posisi atau kedudukan perempuan pekerja domestik migran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat struktural dalam ekonomi global. Dimensi eksternal akan ditelaah untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap tingginya arus migrasi pekerja domestik dari Indonesia ke PEA. Bagaimana perempuan pekerja domestik asal Indonesia ini mengisi posisi-posisi kerja yang tidak aman, minim perlindungan, dan berupah rendah tidak dapat dilepaskan dari bagaimana posisi mereka di dalam konteks ekonomi global. Karena itu di bagian selanjutnya Penulis akan mencoba memperlihatkan kondisi tak kasatmata tersebut, yang memungkinkan para perempuan pekerja domestik ini tereksplorasi dalam sistem kapitalisme global dan berada dalam posisi kerja yang paling rentan di sektor informal.

BAB III

TKW-PLRT DALAM KONTEKS EKONOMI GLOBAL

Bab III berisi analisis terhadap konteks ekonomi-politik internasional yang menempatkan perempuan TKW-PLRT sebagai aktor migrasi tenaga kerja internasional. Penulis akan mendeskripsikan pola pembangunan ekonomi baik di negara penerima (PEA) maupun negara pengirim (Indonesia) untuk melihat pada dinamika eksternal yang memengaruhi tingginya arus migrasi TKW-PLRT ke PEA.

III.1 Kemajuan Ekonomi Persatuan Emirat Arab dan Implikasinya

Persatuan Emirat Arab terletak di Semenanjung Arab, membujur di sebagian Teluk Oman dan Teluk Persia. Sebagian besar tanahnya tandus dan berpasir, selain itu PEA juga beriklim kering dengan suhu dan kelembaban yang sangat tinggi pada musim panas. Menurut Peter Hellyer, Direktur Eksekutif Abu Dhabi Islands Archaeological Survey/ADIAS Kementerian Informasi dan Budaya PEA, bagi mereka yang belum pernah ke negeri ini sering ada stereotip bahwa PEA adalah ‘padang pasir berpenduduk jarang dengan sejumlah penggembala unta yang miskin dan nomad, dan nelayan pantai yang terisolasi dari pola perkembangan manusia di daerah itu.’³²

Lahir sebagai negara di tahun 1971, mulanya Persatuan Emirat Arab adalah negara-negara semenanjung pantai yang terpisah. Tujuh dari total sembilan negara semenanjung pantai yang memiliki kesepakatan damai (*truce*) dengan Inggris sejak tahun 1853 itu kemudian memutuskan untuk bergabung menjadi sebuah negara federasi yang dinamakan Persatuan Emirat Arab (PEA). Perubahan itu terjadi sepeninggal Inggris dari kawasan Teluk Persia di tahun 1971. Negara

³² Peter Hellyer, “The Land and Its People”, dalam Pranay Gupte dan Fatema Hadroom Alegheli, ed. *Global Emirates: An Anthology of Tolerance and Enterprise*, (Dubai: Motivate Publishing, 2009), hlm. 61, sebagaimana dikutip oleh Vidhyandika D. Perkasa, *op. cit.*, hlm. 136.

federasi PEA kini beranggotakan tujuh negara emirat yang dikenal sebagai kesultanan (*sheikhdoms*), yakni Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah, dan Umm al-Quwain; dengan Abu Dhabi yang merupakan negara Emirat terluas sebagai ibukotanya.

Ketika masih berbentuk negara-negara semenanjung pantai yang terpisah, ekonomi negara-negara tersebut berbasis pada perikanan dan pencarian mutiara di sepanjang pantai maupun lepas pantai, serta pertanian sederhana di daerah oasis yang tersebar di wilayah daratannya. Kenaikan permintaan akan minyak selama Perang Dunia I demi memenuhi bahan bakar industri dan militer telah mendorong berbagai perusahaan minyak milik negara-negara Barat untuk mencari lebih banyak tempat cadangan minyak di wilayah lain. Saat itu, potensi minyak di kawasan Timur Tengah belum tereksplorasi karena penguasaan teknologi yang minim dan secara ekonomi negara-negara tersebut lemah. Akibatnya kemudian, mulai dari eksplorasi, produksi, pemasaran, dan penentuan harga minyak sangat ditentukan oleh perusahaan-perusahaan minyak asal Eropa dan Amerika.³³

Tahun 1930 merupakan kali pertama perusahaan minyak asing masuk ke Abu Dhabi dan di saat itulah ditemukan tempat cadangan minyak di sana, salah satu yang terbesar di dunia.³⁴ Masuknya PEA (Emirat Abu Dhabi tepatnya saat itu) ke dalam Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) tahun 1962—bersamaan dengan saat ekspor minyak mentahnya yang pertama³⁵—serta kenaikan harga minyak di tahun 1970-an mendorong pemimpin Abu Dhabi sekaligus presiden PEA yang pertama, Syekh Zayed bin Sultan al Nahyan, untuk membasiskan perekonomiannya pada produksi minyak. Dan dengan ini PEA, seperti juga negara Timur Tengah lainnya, bertransformasi menjadi sebuah negara yang ekonominya bergantung dari penjualan minyak³⁶; di samping faktor lain berakhirnya industri mutiara yang merupakan ekonomi masyarakat tradisional

³³ James A. Bill dan Carl Leiden, *Politics in the Middle East*, (Boston: Little, Brown and Company, 1979), hlm. 360.

³⁴ *United Arab Emirates Yearbook 2000/2001* versi digital, hlm. 9, diakses dari <http://www.uaeyearbook.com/>, 9 Mei 2012, pk. 13.15 WIB.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁶ Christopher DeNicola, *Dubai's Political and Economic Development: An Oasis in the Desert?*, a thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Bachelor of Arts with Honors in Political Science, Williams College, Williamstown, Massachusetts, 10 May 2005, hlm. 1.

Abu Dhabi. Industri mutiara yang telah berlangsung selama ribuan tahun itu dikatakan mengalami goncangan tak lama setelah Perang Dunia II berakhir dan menimbulkan krisis ekonomi dalam negeri.³⁷

PEA tradisional tidak mempunyai jalan raya, surat kabar, telepon, dan listrik; namun dalam waktu singkat, minyak telah menjadikan PEA sebagai negara termakmur di dunia pada tahun 1980, dengan produk nasional bruto yang bahkan mendekati jumlah 100.000 Dolar AS per warga negara.³⁸ Produksi minyak menjadi industri terpenting di sana, meski kemudian—untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas alam—pemerintah PEA memanfaatkan pendapatan dari ekspor minyaknya untuk mendanai infrastruktur bagi sektor ekonomi non-migas, seperti pembangunan Pelabuhan Rashin dan Jebel Ali berikut kawasan industrinya di Emirat Dubai. Keberhasilan pemerintah PEA dengan kebijakan diversifikasi ekonomi menjadikan tren pembangunan PEA sebagai *outlier* di antara negara-negara teluk lainnya.³⁹

Pada tahun 1999, sektor non-migas berhasil menyusun PDB PEA sebesar 74,4% dari total keseluruhan PDB-nya.⁴⁰ Pemerintah PEA juga menarik investasi besar ke dalam negeri melalui sistem pajak-rendah, serta menyediakan lingkungan yang ramah dan stabil secara politis bagi pebisnis. Kawasan yang menjadi ikon sentra industri di PEA adalah Emirat Dubai. Berikut persentase Produk Domestik Bruto sektor non-migas secara khusus di Emirat Dubai tahun 2000 sebagai gambaran keberhasilan kebijakan diversifikasi pembangunan ekonomi PEA.

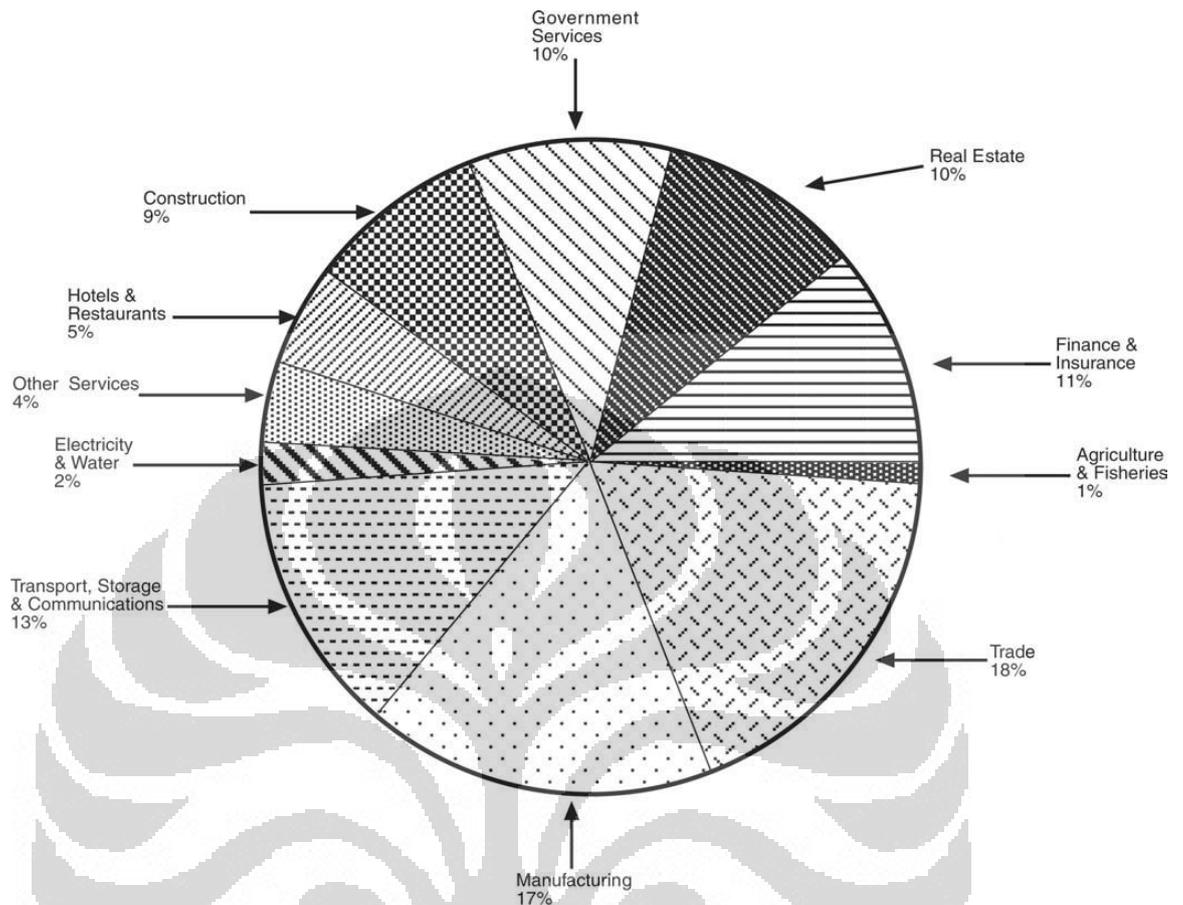
³⁷ The United Arab Emirates Yearbook 1995, (London: Trident Press Multimedia, 1995), hlm. 14.

³⁸ Rima Sabban, *op. cit.*, hlm. 2.

³⁹ Christopher DeNicola, *op. cit.*

⁴⁰ *United Arab Emirates Yearbook 2000/2001* versi digital, *op. cit.*, hlm. 109.

Gambar III.1 Produk Domestik Bruto Sektor Non-migas Dubai tahun 2000



Sumber: Michael Pacione, "Dubai City Profile", dalam *Cities*, Vol. 22, No. 3, 2005, hlm. 258

Pemerintah PEA menggunakan pendekatan ekonomi *neoliberal* dan mewujudkannya melalui serangkaian kebijakan. Pembukaan zona bebas Jebel Ali pada tahun 1985 merupakan salah satunya. Zona bebas Jebel Ali merupakan area bebas rintangan adat dan legislasi bagi pebisnis yang pertama. Selain itu, pemerintah menjamin ketersediaan tenaga kerja berupah rendah dan bebas serikat (*non-unionised*) di wilayah zona bebas tersebut. Di dalam zona ini, saham kepemilikan asing 100% pada perusahaan pun diizinkan, tanpa sponsor lokal sama sekali, dan perusahaan tersebut dapat menyewa lahan/tanahnya selama 50 tahun.⁴¹ Keberadaan zona bebas Jebel Ali berhasil mengundang 480 perusahaan dari 56 negara, dan pada tahun 1995 jumlah ini meningkat hingga sebanyak 800 perusahaan dari 72 negara, termasuk beberapa perusahaan multinasional utama seperti Nokia, Daewoo, dan Reebok yang mencoba memasuki pasar Teluk Arab.

⁴¹ Michael Pacione, "Dubai City Profile", dalam *Cities*, Vol. 22, No. 3, 2005, hlm. 257.

Jumlah perusahaan di zona bebas Jebel Ali ini terus meningkat, hingga sejumlah 1.633 di tahun 1999 dan 2.051 di tahun 2002.⁴²

Pendekatan ekonomi neoliberal Pemerintah PEA menjadi pendorong utama masuknya warga-warga negara PEA ke dalam kegiatan ekonomi domestik. Laporan tahunan KBRI Abu Dhabi tahun 2000-2001 secara spesifik menyebutkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah PEA dalam rangka menstimulasi penduduk—dan yang belakangan dikhususkan kepada warga negara asli PEA akibat struktur demografi PEA yang tidakimbang antara warga asli dan pendatang berikut berbagai krisis sosial yang mengikutinya⁴³—agar terlibat aktif ke dalam sistem ekonomi pasar yang tengah berjalan. Salah satu kebijakan yang nyata Penulis temukan dalam laporan KBRI Abu Dhabi tahun 2000 adalah ‘pengembangan kurikulum dan metodologi agar tetap sejalan dengan perkembangan internasional dan para pelajar dan mahasiswa memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar’⁴⁴.

Kebijakan tersebut di atas sangat khas *neoliberalisme*, di mana deregulasi ekonomi oleh pemerintah/negara bukan berarti menghilangkan regulasi itu sendiri yang menjadi ciri liberalisme untuk menjaga rasionalitas dan kebebasan pasar; justru pemerintah/negara secara aktif menyusun regulasi-regulasi ekonomi tak kasatmata dengan cara menciptakan subyek-subyek *homo economicus*. Inilah regulasi tak kasatmata itu, sebab *homo economicus* adalah subyek yang bertindak rasional dan setiap upayanya ditujukan untuk menjaga sistem yang darinya ia memperoleh keamanan ekonomis.⁴⁵ Masyarakat dengan sendirinya menjadi regulator yang menjamin rasionalitas dan kebebasan pasar. Nantinya dalam bagian kedua Penulis akan mengulas bagaimana pendekatan ekonomi yang sama juga diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia, namun berdampak secara berbeda

⁴² *Ibid.*

⁴³ Jamal Al Majaida, *The Press and Social Change in the UAE (1971-1991)*, (Abu Dhabi: Zayed Centre for Coordination and Follow Up, 2002), hlm. 90.

⁴⁴ *Laporan Tahunan Tahun 2000*, Kedutaan Besar Republik Indonesia Abu Dhabi, Jilid II, Poleksosbudpen-Hankam-Protkons, hlm. 72.

⁴⁵ Hizkia Yosie Polimpung, “Kapitalisme dalam Kerlingan Negara-Berdaulat: Ulasan historis singkat dari era Imperium Romawi Agung sampai era Neoliberal”, makalah yang disajikan pada Workshop “Kapitalisme Global I”, PACIVIS Center for Global Civil Society Studies, Depok, 25 Oktober-8 November 2011, hlm. 16.

terhadap tenaga kerja dari kedua negara oleh karena pembangunan tak berbimbang antara PEA dan Indonesia. Tenaga Kerja Indonesia dengan modal kerja yang lebih terbatas daripada tenaga kerja PEA kemudian hanya dapat mengisi sektor-sektor kerja rendahan yang ada di PEA (dan negara-negara industri baru lainnya).

Di sisi lain, ekspansi ekonomi juga membuka tren imigrasi pekerja ke PEA. Data yang unik mengenai kependudukan di PEA pada tahun 2007 adalah bahwa orang Emirati sendiri hanya menyusun sekitar 20% dari total populasi penduduk, sementara 60%-nya diisi oleh pekerja migran yang berasal dari Asia Selatan dan Tenggara, sementara sisanya lagi disusun secara signifikan oleh orang-orang Arab lainnya seperti orang Palestina, Yordania, Aman, Yaman, Mesir.⁴⁶ Jumlah ini diperkirakan terus bertambah, khususnya pada dua Emirat terbesar, Abu Dhabi dan Dubai. Dalam kurun waktu tahun 2000 hingga 2005, sebagai kawasan sentra industri dengan zona bebas Jebel Ali-nya, tak mengherankan jika Dubai merupakan Emirat dengan pertumbuhan populasi tercepat, yakni rata-rata sebesar 8,5% setiap tahunnya.⁴⁷

Semenjak penemuan cadangan minyak di PEA, negara ini juga mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek. Dengan aliran pendapatan dari hasil produksi minyak, tingkat belanja, dan pola konsumsi telah berubah secara drastis. Dalam jangka waktu singkat, PEA tradisional telah berubah menjadi negara dengan masyarakat yang maju dan berkembang beserta segala layanan sosial yang tersedia bagi gaya hidup masyarakat berstandar tinggi yang nyaman dan makmur. Komunitas rural yang dahulu tinggal di padang gurun telah berpindah menuju kota-kota yang dibangun oleh pemerintah.

Laporan dari International Monetary Fund (IMF) pada tahun 2006 menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi PEA yang berkelanjutan digerakkan oleh kebijakan ekonomi pemerintahnya. Pertumbuhan ekonomi PEA merupakan salah satu yang tercepat di dunia. Menurut laporan Menteri Keuangan

⁴⁶ Berdasarkan data mengenai demografi dalam *Country Profile: United Arab Emirates*, The Library of Congress, Juli 2007.

⁴⁷ *Ibid.*

dan Industri, jumlah PDB PEA pada tahun 2006 meningkat sebanyak 35% dari tahun 2005. Pembangunan infrastruktur, industri manufaktur, dan sektor jasa merupakan sektor-sektor non-minyak dan gas yang berperan secara signifikan dalam pertumbuhan ekonominya.

Kondisi kerja yang dituturkan oleh Bu Ayi, Bu Ami, dan Bu Siti pada bab sebelumnya telah mengamini pernyataan Jamal Al Majaida⁴⁸ bahwa dampak dari pembangunan ekonomi mengakibatkan keluarga-keluarga dalam masyarakat PEA menjadi sangat bergantung pada Penata Layan Rumah Tangga (PLRT) untuk mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak, dan lain-lain. Standar hidup orang Arab yang meningkat akibat *booming* minyak di tahun 1970-an menyebabkan lebih banyak keluarga muda cenderung tinggal jauh dari keluarga besar mereka, dan memungkinkan mereka untuk mempekerjakan pekerja domestik dengan bayaran rendah. Hal yang menarik, menurut studi yang dilakukan oleh Dr. Rima Sabban, seorang Asisten Profesor Sosiologi di Zayed University Dubai, pekerjaan domestik menjadi lapangan kerja yang tumbuh paling cepat dan paling besar di Persatuan Emirat Arab.⁴⁹ Lebih lanjut lagi, dalam studi yang dilakukan oleh Rima Sabban dengan periode yang berbeda di tahun 1995 dan 2001 itu digambarkan bagaimana tingginya kebutuhan terhadap pekerja domestik menjadi ciri tersendiri dalam pembangunan ekonomi PEA. Mempekerjakan pekerja domestik mampu memberikan prestise tersendiri di antara masyarakat PEA.⁵⁰

Bersamaan dengan itu, kebijakan ekspansi ekonomi yang berbasis pada industri minyak di atas dengan segera menarik kedatangan para pekerja asing yang berasal dari negara-negara tetangga di sekitar PEA, juga tenaga ahli yang hanya dapat dipenuhi dari impor pekerja asing. Pembangunan berbagai infrastruktur oleh pemerintah PEA telah mendatangkan kebutuhan akan pekerja-pekerja ekspatriat yang meningkat dari tahun 1972 sebanyak 145 ribu pekerja menjadi 769 ribu pekerja di seluruh sektor ekonomi dan sosial.⁵¹ Tingkat upah

⁴⁸ Jamal Al Majaida, *op. cit.*, hlm. 46.

⁴⁹ Rima Sabban, *op. cit.*, hlm. 3.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Jamal Al-Majaida, *op. cit.*, hlm. 91.

pekerja pun mengalami peningkatan dari 1.257 juta Dirham pada tahun 1972 menjadi 31.329 juta Dirham pada tahun 1992.⁵² Perempuan, baik perempuan Emirati maupun ekspatriat ikut menyumbang pada jumlah kenaikan pekerja ini.

Masuknya perempuan ke dalam angkatan kerja di PEA juga menjadi salah satu strategi pembangunan oleh pemerintah PEA. Pemerintah memberikan akses pendidikan tinggi pada perempuan dan kebebasan bagi mereka untuk keluar dari ranah kerja domestik. Perempuan PEA telah masuk ke dalam angkatan kerja sejak tahun 1970. Walaupun tingkat partisipasi perempuan masih sebesar 11,6% saja dibandingkan dengan 88,34%⁵³ tingkat partisipasi laki-laki, tetapi jumlah perempuan yang masuk ke dalam angkatan kerja ini telah meningkat sejak 1985, beriringan dengan meningkatnya jumlah perempuan pekerja asing yang datang ke PEA.

Di dalam masyarakat asli Emirati, pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah PEA telah mendorong para keluarga di PEA untuk beradaptasi dalam waktu singkat. Pengaturan pola rumah tangga merupakan salah satu aspek yang berubah setelah adanya penemuan minyak. Selain kenampakan luar dari struktur masyarakat tradisional ke modern, gaya hidup di dalam keluarga pun berubah. Perubahan ini berdampak baik terhadap individu maupun terhadap keluarga.

Pada masyarakat asli Emirati, pengaruh kehidupan modern pada perilaku sebuah keluarga ditandai dengan perubahan peran sosial di dalam keluarga. Perubahan gender terutama pada perempuan asli Emirati diiringi munculnya gaya hidup konsumerisme yang mengikuti peningkatan standar hidup di sana telah berkontribusi pada munculnya kebutuhan pekerja domestik migran di PEA. Dengan kondisi anak laki-laki yang bekerja dan telah menikah, keluarga baru ini meninggalkan keluarga besarnya. Tingkat penghasilan yang tinggi dan gaya hidup konsumtif menjadi ciri tersendiri dalam pembangunan ekonomi PEA. Sebuah konsep konsumsi yang baru muncul di kalangan generasi muda PEA yang makmur. Mereka menghabiskan uang untuk membeli beragam komoditas,

⁵² *Ibid.*, hlm. 92.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 142.

pakaian, furnitur dan makanan, untuk merefleksikan kemakmuran negara mereka.⁵⁴

III.2 Pembangunan Ekonomi di Indonesia dan Implikasinya

Pendekatan ekonomi-politik neoliberal serta masuknya perempuan ke dalam angkatan kerja di PEA merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi di PEA. Kesempatan berkarir yang baru bagi perempuan di negara-negara makmur berarti munculnya kebutuhan akan seseorang lain yang mengurus tanggung jawab rumah tangga dan anak-anak. Peran ini kemudian dimainkan oleh pekerja domestik asing. Perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja domestik pada umumnya berasal dari negara seperti Indonesia; di mana kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran dan kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan menjadi ciri tersendiri dalam pembangunan ekonominya.

Krisis ekonomi tahun 1998 menjadi titik penting dalam perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia. Naiknya Presiden Soeharto ke kursi pemerintahan tahun 1966 mengawali pesatnya pembangunan ekonomi untuk menutupi pola pemerintahannya yang otoriter. Rezim Orde Baru sangat khas dengan program Rencana Pembangunan Lima Tahun yang dimulai sejak tahun 1969. Fokus pembangunan saat itu adalah sektor pertanian dan industri-industri yang lain. Pertumbuhan ekonomi yang pesat disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, kebergantungan negara pada investasi dan bantuan asing dalam jumlah besar, dan kedua, perekonomian pada hakikatnya sangat ditopang oleh penerimaan dari sektor minyak setelah *booming* harga minyak dunia di tahun 1970-an. Tahun 1970 sampai 1980-an, sektor minyak dan gas menyusun sebesar 82% dari total keseluruhan ekspor, dan 73% dari keseluruhan pendapatan negara.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 147.

⁵⁵ *Keuangan Negara, Perkembangan Moneter dan Lembaga-Lembaga Keuangan*, Dokumen Bappenas, diakses dari <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bappenas.go.id%2Fget-file-server%2Fnode%2F6598%2F&ei=NsbjT->

Pembangunan ekonomi Indonesia dapat dikatakan berperan signifikan mengurangi kemiskinan pada periode sepanjang akhir 1970-an hingga pertengahan 1990-an. Di masa itu, terdapat peningkatan standar gizi dan kesehatan masyarakat di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Serta, program-program pendidikan dan keluarga pun berjalan dengan menjadi program-program prioritas pemerintah untuk diberlakukan secara nasional.⁵⁶ Sejak akhir tahun 1970-an, Indonesia menikmati angka pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 7%, dan pendapatan per kapita tiap tahun meningkat dari sebesar 70 Dolar AS di tahun 1995 menjadi 1.142 Dolar AS di tahun 1996. Kemiskinan absolut, yang didefinisikan sebagai pendapatan per kapita (dalam keseimbangan kemampuan berbelanja atau paritas daya beli/*purchasing power parity*) sebesar 1 Dolar AS per hari, turun sebesar 60% dari keseluruhan jumlah penduduk di tahun 1970, menjadi 15% di tahun 1990.⁵⁷ Berjalannya rezim Orde Baru selama tiga puluh dua tahun dikenal khas dengan kebijakan-kebijakan pembangunannya yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu ‘macan Asia’ saat itu.

Krisis finansial di tahun 1997 menyebabkan resesi ekonomi di Indonesia dan membuat Indonesia turun pada posisi ‘negara-negara berpenghasilan rendah’. Tingkat ekonomi Indonesia mengalami penurunan terbesar dilihat dari berbagai indikator ekonomi makro. Akhir tahun 1998, berbagai permasalahan ekonomi di Indonesia memuncak: beban hutang—baik pada perbankan swasta dan sektor bisnis mencapai 73 miliar Dolar AS—pada kreditor asing dan dari sektor pemerintahan sendiri sebesar 66 miliar Dolar AS.⁵⁸ Terjadi peningkatan jumlah pengangguran besar-besaran—dari perkiraan sebanyak sembilan juta orang pada bulan April 1998 menjadi sebanyak tiga belas juta orang pada akhir tahun 1998.

Kemiskinan meningkat drastis selama krisis finansial tersebut. Di tahun 1996, tingkat kemiskinan berada pada posisi 11,34% dan selama krisis jumlah itu meningkat menjadi 24,9% di tahun 1999. Ini berarti, kurang lebih sebanyak 36

[TNBYTtrQeAst2NCQ&usg=AFQjCNFb3jcm5fa5koL0xvLoEkItq8vr9A&sig2=-7Arkc6gzd0zntdVF-vl4Q](https://doi.org/10.21831/ijm.v1i4Q), 22 Mei 2012, pk. 14.10 WIB.

⁵⁶ Data diambil dari Renita Moniaga, *Indonesian Migrant Domestic Workers: A Case Study on Human Rights, Gender and Migration*, The New School Graduate Program in International Affairs (GPIA), Desember 2008, hlm. 3.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

juta orang dimasukkan ke dalam kategori kemiskinan absolut akibat krisis tersebut. Perekonomian semakin memburuk oleh karena nilai tukar Rupiah yang jatuh dari Rp. 10.000,00 per 4 Dolar AS di tahun 1996, menjadi Rp. 9.000,00-9.300,00 di tahun 2004.⁵⁹ Ini berarti, Rupiah kehilangan sekitar 75% nilainya terhadap Dolar AS. Tingkat inflasi yang tinggi, harga-harga barang kebutuhan dasar melonjak, dan naiknya jumlah pengangguran menyebabkan penurunan besar taraf hidup masyarakat. Pada gilirannya, penawaran tenaga kerja yang berbanding terbalik dengan permintaan pekerja oleh industri menyebabkan rendahnya upah buruh di dalam negeri. Tingkat pengangguran terbuka rata-rata di Indonesia masih di atas 9% selama tahun 2004-2007.⁶⁰

Tabel III.1 Perkembangan Upah Minimum Propinsi 2006-2009 (Rp)

PROVINSI	2006	2007	2008	2009
NAD	820.000	850.000	1.000.000	1.200.000
SUMATERA UTARA	737.794	761.000	822.205	905.000
SUMATERA BARAT	650.000	750.000	800.000	880.000
RIAU	637.000	710.000	800.000	901.600
KEPULAUAN RIAU	760.000	805.000	833.000	892.000
JAMBI	563.000	658.000	724.000	800.000
SUMATERA SELATAN	604.000	753.000	743.000	824.730
BANGKA BELITUNG	640.000	830.000	813.000	850.000
BENGKULU	516.000	644.838	690.000	727.950
LAMPUNG	505.000	555.000	617.000	691.000
JAWA BARAT	447.654	447.654	568.193	628.191
DKI	819.100	816.100	972.605	1.069.865
BANTEN	661.613	661.613	837.000	917.500
JAWA TENGAH	450.000	500.000	547.000	575.000
D I YOGYAKARTA	460.000	460.000	586.000	700.000
JAWA TIMUR	390.000	448.500	500.000	570.000
BALI	510.000	622.000	682.650	760.000

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Badan Pusat Statistik dalam Erman Suparno, *Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, diakses dari www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1700&Itemid=19Fpengaf5, 15 Juni 2012, pk. 20.38 WIB.

NUSA TENGGARA BARAT	550.000	550,000	730.000	832.500
NUSA TENGGARA TIMUR	550.000	600,000	650.000	725.000
KALIMANTAN BARAT	512.000	560,000	645.000	705.000
KALIMANTAN SELATAN	629.000	745,000	825.000	930.000
KALIMANTAN TENGAH	634.260	665,973	765.868	873.089
KALIMANTAN TIMUR	684.000	766,500	889.654	955.000
MALUKU	575.000	635,000	700.000	775.000
MALUKU UTARA	528.000	660,000	700.000	770.000
GORONTALO	527.000	560,000	600.000	675.000
SULAWESI UTARA	713.500	750,000	845.000	929.500
SULAWESI TENGGARA	573.400	640,000	700.000	770.000
SULAWESI TENGAH	575.000	615,000	670.000	720.000
SULAWESI SELATAN	612.000	673,200	740.520	905.000
SULAWESI BARAT	612.000	886.493	760.500	909.400
PAPUA	822.500	987,000	1.105.500	1.216.100
IRJABAR	822.500	-	1.105.500	1.180.000

Sumber: Dit. Pengupahan & Jamsostek, Ditjen PHI & Jamsostek, Depnakertrans, Desember 2008

Kondisi ekonomi domestik yang demikian memaksa tenaga kerja Indonesia untuk menerima tingkat upah kerja yang rendah di Indonesia. Namun, tetap saja jumlah lapangan kerja yang tersedia berbanding terbalik dengan jumlah tenaga kerja. Untuk menyalasi tingginya ketersediaan tenaga kerja di Indonesia sementara permintaan pekerja oleh industri terbatas, maka salah satunya kemudian terdapat program-program dan institusi pemerintah yang secara agresif mendorong perempuan untuk pergi bekerja keluar rumah meskipun dengan keterampilan kerja yang terbatas. Para perempuan ini umumnya tertarik dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi di luar negeri. Tren migrasi tenaga kerja Indonesia hingga kini pun masih didominasi oleh perempuan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk bertahan (*survival*) bagi perempuan dengan cara masuk ke dalam angkatan kerja global. Umumnya Tenaga Kerja Wanita ini berprofesi sebagai Penata Layan Rumah Tangga dengan negara-negara tujuan di Timur Tengah ataupun negara-negara industri baru seperti Taiwan, Singapura, Hong Kong, dan Malaysia di Asia Timur.

Kebijakan pemerintah tersebut telah ikut memengaruhi bagaimana perempuan Indonesia menjadi bagian dari jawaban atas permintaan tenaga kerja domestik migran di PEA hingga kini. Program dan institusi pemerintah yang

dimaksud adalah:⁶¹ Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), unit Pusat Antar Kerja Antar Negara (PAKAN), serta Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang kemudian berganti nama menjadi Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Sebenarnya, program dan institusi tersebut telah ada sejak masa Orde Baru, Depnaker bekerja meningkatkan persepsi positif terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dan menyusun program yang sebagian besar berorientasi pada melatih para perempuan pekerja dengan keterampilan-keterampilan kerja domestik. PAKAN adalah sebuah unit khusus dalam Depnaker yang dibentuk tahun 1984 dan bekerja mengawasi serta mengatur tenaga kerja di luar negeri. Setiap tahun, target jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang dikirimkan oleh Depnaker selalu bertambah, dan untuk memfasilitasinya pemerintah kemudian mengizinkan berdirinya berbagai PPTKIS untuk mendukung para pekerja migran ini selama proses bekerja di luar negeri, sejak dari awal mereka melengkapi berbagai persyaratan lamaran kerja kontrak bagi para pekerja migran.

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia dengan segera menjadi salah satu kebijakan pokok pembangunan negara untuk mengatasi kemiskinan. Di tahun 2007, jumlah remitansi yang tercatat dikirimkan oleh Tenaga Kerja Indonesia mencapai lima milyar Dolar AS.⁶² Remitansi dari pekerja migran telah menyumbang kepada ekonomi Indonesia secara signifikan di tingkat mikro maupun makro.

Selain mengurangi jumlah pengangguran, di tingkat mikro remitansi ini digunakan untuk kebutuhan pendidikan, sarana kesehatan, dan kegiatan-kegiatan konsumsi. Di tingkat makro, neraca pembayaran Indonesia pun ditopang oleh remitansi ini. Data yang digunakan oleh Sukawarsini Djelantik, seorang Profesor Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan, dalam tulisannya *Demographic Pressure, Poverty, Human Trafficking and Migrant Workers: an Indonesian Case*,⁶³ menyebutkan bahwa jumlah remitansi dari TKW ini terus

⁶¹ Rachel Silvey, "Transnational domestication: state power and Indonesian migrant women in Saudi Arabia", dalam *Political Geography* 23 (2004), hlm. 251.

⁶² Data dari Bank Indonesia dalam Renita Moniaga, *op. cit.*, hlm. 2. Dari tahun 2005-2006, Bank Indonesia mencatat jumlah total penerimaan remitansi sekitar 5,3-5,6 milyar Dolar AS.

⁶³ Sukawarsini Djelantik, "Demographic Pressure, Poverty, Human Trafficking, and Migrant Workers: an Indonesian Case", paper dalam *Third Global International Studies Conference on*

meningkat dari sebesar 5,6 juta Dolar AS tahun 2006, 6 juta Dolar AS tahun 2007, dan 6,6 juta Dolar AS tahun 2008. Hal ini menunjukkan signifikansi dari pengiriman Tenaga Kerja Indonesia, khususnya TKW-PLRT sebagai kebijakan pembangunan Indonesia.

III.3 Pembangunan Tak Berimbang Menjadi Faktor Penarik dan Pendorong Migrasi Tenaga Kerja Internasional

“Itu kan keinginan seorang ibu untuk meninggalkan anak dan suami, itu hanya faktor ekonomi. Karena kalau dia ngga berangkat, masa depan, itu generasi yang akan datang, sepuluh tahun yang akan datang, itu anaknya nanti seperti apa... Yang positifnya, coba lihat! Kalau dia di sana bernasib baik, majikan baik, dia bisa setelah dua tahun, kontrak kerja, perpanjang, dia dipulangi sama majikan, ditawarkan ee.. cuti apa langsung pulang. Kalau dengan faktor kebutuhan dia pasti minta cuti. Dia dua bulan dapet cuti, berangkat lagi. Sampai sekarang itu, seingat saya, kakak saya dari tahun 2000.. bolak-balik, bolak-balik. Ya Alhamdulillah itu dari rumahnya gubuk, pake bambu, ada tikernya. Kalau tidur kejepit tangannya, pake bambu, sekarang sudah mempunyai rumah. Ada sisi baik.

“(Sementara) Di daerah Bu.. Minta maaf, Mbak Mita.. jangankan sarana pendidikan. Dari sini mungkin ke [menyebut nama tempat] dekat ya jalan kaki. Di tempat saya mungkin dari sini (Condet) ke Bogor kalau jalan kaki, untuk menuju sekolahan. Pakai motor masih mending, jalan kaki. Jalannya licin. Musim hujan, bayangin... Seperti itu. Kalau punya sawah, insya Allah dia nggak kelaparan. Kalau nggak punya; (suaminya bekerja) dari berangkat pagi, pulang jam satu, pulang kerja, tidur kan pulang. Dapet dua puluh ribu dia. Di daerah Sukabumi. Yang nyangkul, baik itu di ladang maupun di sawah. Okelah sekarang, misalkan di sana ada bebek-bebek. Apakah bebek-bebek itu punya dia? Atau punya juragannya? Nah seperti itu.. Kalau punya juragannya dia sehari dikasih berapa? Dikasih lima belas ribu, anaknya empat. Harga beras berapa? Sembako di

“World Crisis: Revolution in the International Community”, Porto, Portugal, 17-20 Agustus 2011, hlm. 5.

daerah, yang dari pemerintahnya masih seribu enam ratus, di daerah itu udah nyampe empat ribu lebih. Lima ribu..,” tutur Pak Ade panjang-lebar. Beliau adalah seorang sponsor/agen pengadaan TKW-PLRT ke Timur Tengah (Condet, 17 Mei 2012).

“Buat perbandingannya ya. Jadi, misalnya satu juta lima ratus. Di luar negeri kita bandingkan juga, meskipun dapet lebih... Sekarang hampir dua jutaan, ya.. Satu juta lebih.. Sejuta lima ratus juga.. Tapi kan UMR dalam negeri ini, mereka harus bayar kontrakan... transport... Ya kan? Akhirnya sisa lima ratusnya habis makan... gitu kan? Kalau di luar negeri, kerja di luar negeri, mereka ni satu juta lima ratus ni utuh lho Mbak. Kebanyakan itu kalau sudah digaji, ya dikirimkan sama orang tuanya. Kan ingin menyenangkan orang tua juga sebenarnya,” ujar Pak Rizal, staf bagian pemberangkatan TKW-PLRT ke Timur Tengah di sebuah PPTKIS (Condet, 17 Mei 2012).

“(Gaji mereka) Utuh. Karena mereka sudah tinggal di situ. Kalau ketemu majikan baik malah HP dikasih, dikasih duit,” ucap Pak Adul, staf keamanan PPTKIS yang sama, menyetujui (Condet, 17 Mei 2012).

Tuturan para karyawan dan sponsor PPTKIS di atas menunjukkan bagaimana kesenjangan ekonomi antara Indonesia dan PEA sangat memengaruhi migrasi TKW-PLRT sebagai faktor penarik dan pendorong. Inilah yang menjadi kesimpulan sementara pada bab ini. Yakni, tingginya arus migrasi perempuan pekerja domestik migran asal Indonesia ke PEA tidak dapat dilepaskan dari dimensi eksternal dalam kisah para TKW-PLRT, yakni kondisi ekonomi-politik antara kedua negara. Pembangunan ekonomi di PEA dengan serangkaian kebijakan dan keberhasilannya telah menimbulkan peningkatan taraf hidup masyarakatnya yang berimplikasi pada gaya hidup yang konsumtif, termasuk ketika sebuah keluarga mampu mempekerjakan tenaga kerja domestik menjadi lambang prestise tersendiri bagi mereka. Kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah PEA dengan melibatkan perempuan juga menyebabkan masuknya perempuan ke dalam angkatan kerja di sana. Masuknya perempuan ke dalam sektor publik dan mengisi lapangan-lapangan kerja formal sekaligus mengubah peran sosial perempuan di dalam keluarga. Kekosongan sektor kerja domestik

inilah yang menjadi peluang kerja bagi perempuan dari negara-negara dengan tingkat ekonomi yang relatif lebih rendah dari PEA, termasuk Indonesia. Inilah yang menjadi faktor penarik keputusan bermigrasi bagi para perempuan pekerja domestik Indonesia ke PEA.

Sementara, kemiskinan dan kolaps-nya pembangunan ekonomi domestik akibat krisis finansial 1997 menjadi faktor pendorong untuk bermigrasi. Dengan banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya, tingkat inflasi yang tinggi, harga-harga kebutuhan pokok yang naik, serta terbatasnya lapangan kerja yang tersisa pascakrisis finansial tersebut maka semakin banyak tenaga kerja yang memilih untuk berangkat ke luar negeri untuk mencari peluang kerja dengan tingkat upah yang lebih tinggi daripada di dalam negeri. Menurunnya taraf hidup masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya persentase kemiskinan absolut penduduk pascakrisis 1997 semakin memicu para tenaga kerja Indonesia ini untuk mengisi lapangan-lapangan kerja rendah yang tersedia di negara-negara makmur seperti di PEA, termasuk lapangan kerja sektor domestik di sana. Inilah dinamika eksternal yang memengaruhi tingginya arus migrasi TKW-PLRT ke PEA.

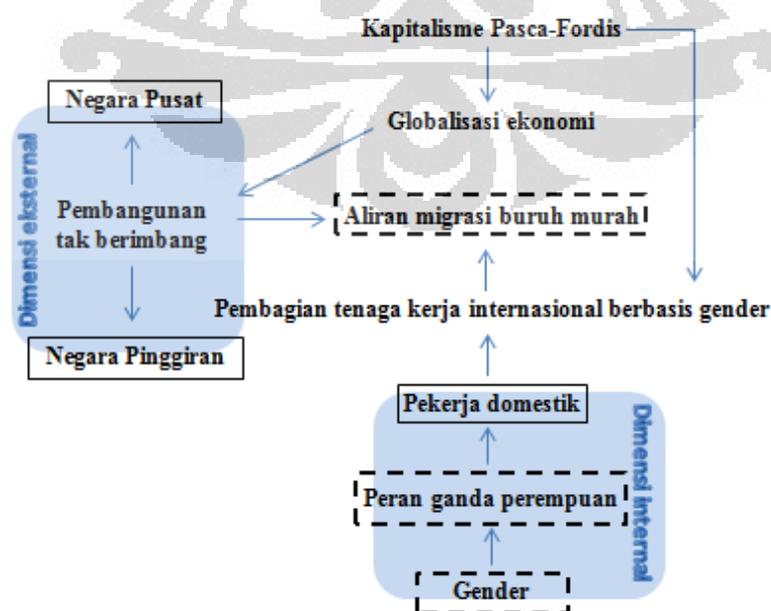
Dalam pemahaman ekonomi politik internasional, kondisi dunia adalah seperti pasar kapitalis. Indonesia sebagai negara surplus tenaga kerja menjadi penyedia komoditi tenaga kerja sektor informal dalam pasar tenaga kerja internasional, sebagai konsekuensi dari kesenjangan ekonomi antarnegara di mana Indonesia berkedudukan sebagai negara periferi dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah daripada PEA serta pembangunan ekonomi domestik yang tidak mampu menyerap sumber daya manusianya sebagai tenaga kerja produktif. Sektor informal itu sendiri didominasi oleh sektor kerja domestik yang diisi oleh perempuan Indonesia sebagai tenaga kerja reproduktif. Sedangkan PEA, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sebaliknya defisit tenaga kerja, menjadi peminta komoditi tenaga kerja domestik Indonesia yang diperlukan untuk menopang pembangunan ekonominya. Konteks ekonomi-politik internasional inilah yang menempatkan perempuan TKW-PLRT asal Indonesia sebagai aktor migrasi tenaga kerja internasional dengan spesifikitas lapangan kerja rendah.

BAB IV

ANALISIS

Bab IV berisi keseluruhan analisis atas temuan penelitian dalam Bab II dan Bab III. Dari analisis dalam Bab II dan Bab III dapat dipahami bahwa aliran migrasi TKW-PLRT asal Indonesia ke PEA sangat dipengaruhi oleh dimensi internal dari perempuan pekerja domestik tersebut, yakni gender yang melekat pada perempuan Indonesia, serta dimensi eksternal berupa kondisi ekonomi politik internasional, di mana kesenjangan ekonomi antara Indonesia dan PEA telah menghasilkan faktor pendorong dan penarik migrasi yang menempatkan TKW-PLRT ini sebagai aktor migrasi tenaga kerja internasional dengan spesialisitas sektor kerja domestik. Analisis dalam bab ini akan disusun untuk memetakan jawaban atas pertanyaan permasalahan yang diangkat: kondisi-kondisi apa yang memungkinkan tingginya arus migrasi pekerja domestik asal Indonesia ke PEA, yang berwajah perempuan tersebut, dapat terus berlangsung; meski terdapat banyak masalah yang dialami oleh para pekerja migran itu di sana selama ini. Isi bab ini dapat dilihat dalam bentuk skema temuan penelitian berikut.

Bagan IV.1 Skema Temuan Penelitian



IV.1 Konteks bagi Munculnya Perempuan sebagai Aktor Pekerja Domestik dalam Pasar Tenaga Kerja Internasional: Perkembangan Kapitalisme Global Pasca-Fordis

Untuk memahami peningkatan arus migrasi pekerja domestik internasional diperlukan konteks yang lebih luas; mengingat bahwa peluang kerja tersebut tidaklah serta-merta tersedia. Konteks ini mengindikasikan bekerjanya suatu tata dunia yang di satu sisi beroperasi di tingkat makro/global dan di sisi lain beroperasi di tingkat mikro/individu. Tulisan Saskia Sassen, seorang Profesor Sosiologi di Columbia University, dalam *Global Cities and Survival Circuits*⁶⁴ membukakan pemahaman akan hal ini, yakni adanya keterkaitan yang signifikan antara globalisasi ekonomi dan migrasi perempuan—sebuah hal yang jarang disorot dalam narasi-narasi tentang globalisasi. Menurut Sassen, terus berkembangnya beragam aktivitas yang terimplikasi dalam pengaturan dan penyelarasan ekonomi global telah mensyaratkan kebutuhan akan tenaga-tenaga profesional yang dibayar tinggi. Yang penting untuk dicermati kemudian; baik dari sektor perusahaan-perusahaan maupun gaya hidup para pekerja profesionalnya, telah nyata memunculkan permintaan akan tenaga-tenaga kerja di bidang jasa yang dibayar rendah. Sehingga, berbagai kota di mana fungsi-fungsi penting dan sumber daya ekonomi global terpusat—apa yang disebut Sassen sebagai *global cities*—menjadi tempat di mana sejumlah besar pekerja-pekerja perempuan dan imigran berupah rendah dimasukkan atau dipersatukan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang strategis.

Keberadaan lapangan kerja berbasis jasa berupah rendah, salah satunya lapangan kerja sebagai petugas kebersihan misalnya, merupakan contoh proses penyatuan secara langsung; sedangkan lapangan-lapangan kerja lainnya muncul sebagai bentuk proses penyatuan yang relatif tidak terjadi secara langsung. Yakni, yang muncul melalui praktik konsumsi para profesional berpendapatan tinggi—mereka yang mempekerjakan pelayan dan pengasuh berupah rendah dalam rumah tangga mereka. Inilah pola-pola baru yang terdapat di dalam globalisasi ekonomi;

⁶⁴ Saskia Sassen, *op. cit.*, hlm. 254-274.

di mana lapangan-lapangan kerja, dan pada gilirannya sebuah kelas pekerja yang terisolasi, terpencar, dan secara efektif tidak kasatmata ini, telah diproduksi.⁶⁵

Apa yang dihadapi oleh kelas pekerja baru ini, termasuk di dalamnya pekerja domestik migran, nyata tidak terlepas dari apa yang terjadi di tingkat global. Menurut Castles dan Miller, globalisasi telah melahirkan industri migrasi internasional dengan melibatkan banyak aktor yang mencari kehidupan di dalamnya serta mampu mempengaruhi kebijakan negara.⁶⁶ Penulis menemukan bahwa globalisasi ekonomi pascakrisis kapitalisme Fordis tahun 1970-an menyediakan konteks bagi masuknya perempuan ke dalam angkatan kerja—yang pada gilirannya juga menciptakan kebutuhan akan pekerja domestik (*migran* dan lebih khusus lagi *perempuan* dalam penelitian ini)—serta meningkatnya arus migrasi tenaga kerja internasional. Bagaimana menjelaskan peningkatan arus migrasi tenaga kerja sebagai produk globalisasi ekonomi? Bagian ini akan berusaha menjawab pertanyaan tersebut.

Globalisasi ekonomi yang dicirikan oleh liberalisasi hampir di segala bidang dan juga oleh struktur-struktur yang menjaganya seperti rezim World Trade Organization (WTO), pakta-pakta dagang regional, dan perdagangan bebas, telah mendorong terjadinya aliran bebas perpindahan tenaga kerja global. Globalisasi ekonomi itu sendiri tak dapat dilepaskan dari konteks krisis pada moda produksi kapitalisme yang berlangsung saat itu. Krisis ini bermula ketika dunia sesudah tahun 1956, khususnya di Inggris dan Amerika Serikat, dianggap telah didominasi oleh ‘Fordisme’ sebagai praktik ekonomi dan ‘Keynesianisme’ sebagai kebijakan ekonomi negara-bangsa.⁶⁷ Ciri praktik ekonomi yang mudah dikenali pada saat itu adalah produksi barang-barang terstandarisasi berskala raksasa (konsumsi massal). Implikasinya, dibutuhkan biaya besar bagi para pekerja agar dapat mempertahankan pembelian produksi yang berjumlah besar tersebut.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 255.

⁶⁶ Stephen Castles dan Mark J. Miller, “Introduction”, dalam Stephen Castles dan Mark J. Miller, ed. *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*, (New York: The Guilford Press, 2009), hlm. 2.

⁶⁷ Josef Esser dan Joachim Hirsch, “Post-Fordist Regional and Urban Structure”, dalam Ash Amin, ed. *Post-Fordism: A Reader*, (Massachusetts: Blackwell Publishers, 1994), hlm. 75.

Budaya promosi dan periklanan yang mendukung proses penjualan juga berkembang mulai saat itu. Di sisi lain, sebagai moda regulasi ekonomi maka tingkat perencanaan dan manajemen tertentu dibutuhkan untuk mempertahankan stabilitas Fordisme. Hal ini dilakukan melalui dominasi mata uang dunia oleh Amerika Serikat, tingkat kerjasama antarnegara, dan peran negara sebagai korporat pembuat kebijakan dan manajer ekonomi.⁶⁸ Periode ini merupakan masa di mana negara berperan melakukan intervensi sebagai pencipta aturan-aturan kesejahteraan sosial. Hingga penghujung tahun 1960-an, sistem produksi massal ini menjadi ikon pada era kapitalisme saat itu, yang dikenal dengan ‘era kapitalisme Fordis’—mengambil nama Henry Ford, pemilik perusahaan pertama yang mengembangkan moda produksi semacam ini.

Tahun 1970-an terjadi berbagai krisis yang menyebabkan perubahan paradigma yang mendasari moda produksi Fordisme ini. Kompleksitas krisis ekonomi yang terjadi akibat krisis minyak, serta krisis politik yang mengiringi perubahan era *social democracy* ke *neoliberal age*, secara langsung dan tak langsung kemudian mengakibatkan sistem kapitalisme berubah. Di awal 1970-an, rezim Fordis tersebut mulai bermasalah. Kejenuhan pasar, terutama di negara-negara industri, tak dapat dielakkan dari proses produksi dan konsumsi massal selama itu—yang kemudian mengakibatkan terjadinya kelebihan produksi. Sebenarnya dalam hal ini bukan berarti hampir setiap orang dapat mempunyai semua barang-barang konsumsi yang diinginkannya; melainkan kekuatan belanja para konsumen telah mencapai batasnya pada saat itu. Diperlukan pasar lain sehingga kelebihan produksi ini dapat tetap mengalir, dan di sinilah globalisasi ekonomi yang dicirikan dengan keterbukaan pasar menjadi sebuah pasar global menjadi jawaban atas krisis kapitalisme Fordis. Negara-negara ‘Dunia Ketiga’ kemudian berperan lebih dari sekedar penyedia bahan baku produksi, tetapi juga sebagai pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh negara-negara maju. Aliran modal yang menjadi semakin bebas, di sisi lain, telah memaksa tumbuhnya industrialisasi di kawasan periferi sehingga kemudian dikenal negara-negara industri baru.

⁶⁸ Michel Aglietta, *A Theory of Capitalist Regulation: The U.S. Experience*, (London: New Left Books, 1979), hlm. 112.

Konsekuensi yang muncul setelahnya adalah adanya kebutuhan perusahaan-perusahaan besar untuk memperkenalkan suatu pola pertumbuhan dan perkembangan tingkat keuntungan yang baru, yakni melalui teknik produksi yang *fleksibel* dengan menggunakan teknologi, reorganisasi tenaga kerja, dan kecepatan waktu pergantian produksi/konsumsi. Era inilah yang kemudian disebut sebagai ‘era kapitalisme pasca-Fordis’; di mana sistem produksi massal mulai ditinggalkan, dan beralih pada produksi yang lebih terspesialisasi—yang dalam perkembangannya kini menjadi produksi komoditas *eksklusif* dengan logika ‘pembedaan’ dalam sistem sosial masyarakat. Secara umum, modus produksi pada kapitalisme pasca-Fordis telah berubah dari yang homogen dan baku (*standardized*) menjadi khas (*specialized*) dan berlainan (*differentiated*). Sementara itu, heterogenisasi dan fleksibilisasi kondisi kerja berakibat pada semakin tajamnya pembedaan dalam masyarakat dan mendukung model konsumsi yang hirarkis.⁶⁹ Pola konsumsi masyarakat yang semula didasari tujuan pemenuhan kebutuhan utama, menjadi pola konsumsi yang bertujuan untuk mencapai standar hidup yang ‘lebih tinggi’.

Reorganisasi tenaga kerja dalam moda produksi yang baru ini—dari yang sebelumnya bekerja secara tetap dan berjangka panjang kemudian menjadi fleksibel—dengan segera digemari oleh para pemilik modal. Fleksibilitas tenaga kerja menjadi ciri dan juga perubahan besar dalam hubungan industrial sistem kapitalisme yang terus berlangsung hingga kini. Elizabeth Bortolaia Silva, seorang Profesor Sosiologi di Open University di Inggris, menyebutkan tipe-tipe fleksibilitas pekerja dalam manajemen buruh yang muncul akibat krisis kapitalisme masa itu sebagai berikut⁷⁰:

- fleksibilitas proses dan organisasi produksi yang melahirkan bentuk perusahaan berbasis jaringan dengan adanya sub-kontrak (sistem pekerja borongan), fragmentasi (pemisahan tugas ke bagian-bagian yang lebih detil dan spesifik), informalisasi (penciptaan sektor kerja yang menggabungkan karakteristik

⁶⁹ Josef Esser dan Joachim Hirsch, *op. cit.*, hlm. 80.

⁷⁰ Elizabeth Bortolaia Silva, *Brazilian Fordism in Historical Perspective*, diakses dari http://www.cddc.vt.edu/digitalfordism/fordism_materials/Silva.pdf, pada tanggal 18 Februari 2012, pk. 21.10 WIB.

pekerja berubah yang formal sekaligus kerja rumah tangga yang tak berbayar), dan disintegrasi (pemecahan operasi produksi ke dalam kompetensi-kompetensi yang utama/terspesialisasi);

- fleksibilitas sistem pengupahan yang disesuaikan dengan tingkat produktivitas pekerja dan kondisi pasar;
- fleksibilitas dalam biaya pekerja dengan mengurangi subsidi-subsidi bagi mereka;
- fleksibilitas tenaga kerja dari sisi penawaran yang disesuaikan dengan kebutuhan si pemberi kerja, kapasitas produksi, dan jenis pekerjaannya sehingga menghasilkan apa yang disebut sebagai buruh kontrak (*outsourcing*);
- fleksibilitas fungsional di mana buruh dituntut untuk memiliki lebih dari satu keterampilan sesuai dengan kebutuhan pengusaha untuk menyesuaikan diri dengan fluktuasi pasar produksi;
- serta fleksibilitas struktur pekerjaan yang menekankan pada ketiadaan promosi atau peningkatan jenjang karir baik dari segi jenis pekerjaan maupun tingkat upah.

Berbagai kondisi yang lahir dari transisi kapitalisme ke era pasca-Fordis sebagaimana diuraikan di atas menjadi konteks dari peningkatan arus migrasi tenaga kerja internasional serta masuknya perempuan ke dalam angkatan kerja. Akan tetapi, perlu diperhatikan pula bahwa jika dilihat dari kategori produksinya, maka 'perempuan' sebagai angkatan kerja yang 'baru diakui' ini *tidaklah satu*. Perempuan mengalami pengalaman yang berbeda-beda berdasarkan latar belakang sosio-ekonomi dari mana mereka berasal.

IV.2 Spesifisitas Perempuan sebagai Aktor Pekerja Domestik Migran

Melihat fenomena migrasi pekerja domestik internasional, dengan segera dapat disadari bahwa arah aliran migrasi dan aktor yang bermigrasi itu sendiri bersifat unik, memiliki pola, dan dengan demikian bukanlah sesuatu yang secara natural terjadi. Untuk memahami hal ini analisis berikut akan terbagi ke dalam dua bagian, yakni memahami *arah* alirannya dan *siapa* aktor pemeran pekerja

domestik migran tersebut melalui refleksi terhadap relasi migrasi pekerja domestik Indonesia-PEA. Setelah itu, analisis berikutnya akan melihat apa implikasi dari spesifikitas aliran migrasi tersebut dan aktor pemerannya bagi TKW-PLRT.

IV.2.1 Pembangunan Tak Berimbang dalam Perkembangan Kapitalisme Global: Penentu Arah Aliran Migrasi Tenaga Kerja Domestik Internasional

Dalam Bab III telah diperlihatkan bagaimana kesenjangan ekonomi yang nampak dari pembangunan tak berimbang antara PEA dan Indonesia menjadi faktor penarik dan pendorong migrasi tenaga kerja di antara kedua negara. Ketika meletakkan masalah pembangunan tak berimbang yang kemudian menyebabkan aliran arus migrasi tertentu ini pada konteks perkembangan kapitalisme global, dapat terlihat bahwa pembangunan tak berimbang ini adalah sesuatu yang *memang diperlukan* bagi berjalannya rezim akumulasi kapital di tingkat global. Bagaimana memahami hal ini dapat dimulai dari kesetujuan akan hukum umum yang berlaku pada akumulasi kapital; seperti yang dijelaskan Karl Marx saat beliau menyatakan bahwa kontradiksi utama dalam kapitalisme adalah *'the simultaneous emergence of concentrations of wealth and capital (for capitalists), on the one hand, and poverty and oppression (for workers), on the other.'*⁷¹

Arti dari pernyataan Marx di atas ialah bahwa rezim akumulasi kapital selalu mensyaratkan adanya ketimpangan, bahkan di antara negara-negara. Inilah yang membedakan pendekatan ekonomi Marxis dengan pendekatan neoklasik. Dalam pendekatan neoklasik, kompetisi dan perpindahan aliran modal adalah penyeimbang yang akan mempersempit perbedaan di antara perusahaan-perusahaan, wilayah, dan juga negara. Akan tetapi konsep pembangunan tidak berimbang (*uneven development*) mengisyaratkan kebalikannya, di mana kompetisi dan perpindahan aliran modal akan selalu menghasilkan kesenjangan yang menjadi basis eksploitasi dalam akumulasi kapital. Sehingga, kesenjangan pembangunan antarnegara yang ada hingga saat ini merupakan sesuatu yang wajar

⁷¹ Patrick Bond, *What is "uneven development"?*, diakses dari http://www.marxmail.org/fag/uneven_development.htm, 11 Juni 2012, pk. 22.35 WIB.

dalam rezim akumulasi kapital global, karena justru kesenjangan ini yang akan dimanfaatkan bagi terus berjalannya rezim ini. Dan ini berarti pula, struktur hirarkis terkait relasi kuasa ekonomi di antara kedua negara, dan juga di antara laki-laki dan perempuan dari kedua negara, akan *terus* terpelihara lewat rezim akumulasi kapital.

Melihat bagaimana pembangunan tak berimbang antara PEA dan Indonesia akan berkontribusi pada pelanggengan struktur hirarki antara aktor makro dan mikro di dalam relasi ekonomi kedua negara, serta keterkaitan struktur hirarki tersebut terhadap spesifikitas arah aliran migrasi beserta aktor yang melakukannya; Penulis berangkat dari pemahaman akan perkembangan kapitalisme global yang bersifat spasial. Kapitalisme yang berlangsung di PEA bersifat lebih ‘maju’ dibandingkan kapitalisme di Indonesia yang masih kental dengan ciri primitif eksploitasi pekerja secara ekstrim—upah rendah, intensitas kerja tinggi. Perkembangan yang bersifat spasial ini bukan berarti terpisah satu sama lain, justru kedua sistem kapitalisme ini erat terkait satu sama lain untuk memelihara rezim akumulasi kapital di tingkat global.

Ketika pembangunan ekonomi di PEA telah relatif lebih maju dibandingkan di Indonesia, maka sektor-sektor kerja rendah dan tak kasatmata bukan berarti menghilang, melainkan mereka ‘dilimpahkan’ kepada para pekerja dari negara lain yang karakter akumulasi kapitalnya lebih primitif, sehingga para pekerja ini bersedia melakukan sektor kerja rendah, yang paling rentan akan eksploitasi, namun dengan upah yang sangat rendah. Tetapi, pembangunan yang tidak berimbang telah mengkondisikan upah pekerja rendah di negara-negara pusat tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan lapangan kerja yang tersedia di negara-negara pinggiran. Sehingga hal ini umumnya menjadi motif ekonomi para pekerja migran dari negara periferi ke negara pusat. Di titik ini dapat dipahami bahwa bukan saja rasionalitas yang mendasari motivasi migrasi tenaga kerja internasional, melainkan terdapat konteks yang lebih besar yang menyebabkan sebuah faktor pendorong menjadi ‘pendorong’ keputusan bermigrasi, dan faktor penarik, menjadi ‘penarik’ keputusan bermigrasi.

IV.2.2 Hirarki Kuasa Ekonomi Pusat-Periferi dan Bias Gender di Dalamnya: Spesifisitas Aktor Pemeran Pekerja Domestik Migran Internasional

Ketika relasi ekonomi yang timpang antara negara pusat dan pinggiran terus berlangsung demi berlangsungnya akumulasi kapital di tingkat global, bersamaan dengan itu di level mikro terjadi ketimpangan relasi ekonomi antara laki-laki dan perempuan yang juga terus terpelihara. Oleh karena laki-laki dipandang sebagai aktor rasional sedangkan perempuan tidak, maka perempuan akan selalu menjadi pihak yang dirugikan dalam sistem kapitalisme. Hirarki laki-laki negara pusat – perempuan negara pusat – laki-laki negara pinggiran – perempuan negara pinggiran selalu menyebabkan perempuan dari negara-negara pinggiran sebagai aktor yang kalah di dalam sistem kapitalisme global.

Perempuan pekerja domestik yang berasal dari negara periferi dengan demikian mengalami eksploitasi yang jauh lebih berat dibandingkan laki-laki/perempuan di negara pusat dan laki-laki di negara pinggiran. Mereka menerima upah kerja yang jauh lebih rendah dan karena bias gender yang melekat dalam sistem ekonomi global pula (yang dalam hal ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh kapitalisme untuk memelihara akumulasi kapitalnya), mereka menjadi aktor yang ‘tepat’ mengisi peluang kerja domestik dengan intensitas kerja yang jauh lebih besar daripada sektor kerja formal umumnya (dipahami dari jam kerja domestik yang tidak tentu, mereka bekerja sewaktu-waktu setiap saat majikan memerlukan mereka). Dan dengan demikian, mereka sekaligus menjadi aktor yang paling rentan mengalami ketidakadilan dan eksploitasi di tengah sistem ini.

Namun ternyata, dalam perjalanan pengumpulan data untuk penelitian ini Penulis menemukan juga bahwa bukan hanya ketimpangan ekonomi yang menjadi basis eksploitasi terhadap perempuan pekerja domestik migran di PEA. Hal ini dapat dilihat dari spesifisitas perempuan tertentu yang banyak diminati sebagai pekerja domestik migran di sana. Dari data wawancara, Penulis mendapatkan adanya struktur hirarkis lain yang berlaku pada sektor pekerjaan informal-rendahan ini. Perempuan Indonesia dan Filipina merupakan dua karakter perempuan yang lebih diminati dan mendapatkan upah yang lebih tinggi pula

dibandingkan perempuan pekerja domestik asal negara-negara Asia Selatan seperti India dan Srilanka, serta Ethiopia.

Para pekerja asal Asia Selatan dan Afrika tersebut cenderung mengisi pembagian kerja domestik yang lebih berat seperti mengurus rumah (mencuci, mengepel, menyetrika), sedangkan pekerja asal Indonesia dan Filipina menurut pengalaman Bu Ami dan tuturan Bu Siti sendiri cenderung mengisi bagian kerja domestik yang lebih membutuhkan keterampilan seperti memasak, mengasuh anak, dan relatif lebih sedikit bertumpu pada tenaga pekerja dibandingkan kerja-kerja mengurus rumah. Selain itu, menurut Ibu Siti ketimpangan dalam pendapatan tersebut juga telah umum diketahui di sana, di antara para pekerja itu sendiri, sehingga rekan kerja domestiknya yang berasal dari Ethiopia memilih untuk berhenti bekerja pada pukul sepuluh atau setengah sepuluh malam sementara Bu Siti terkadang baru tidur pada pukul setengah satu untuk melakukan pekerjaan yang diminta oleh majikannya.

Jika melihat pada alasan pembagian kerja oleh majikan terhadap para PLRT di rumahnya, terlihat bahwa eksploitasi terhadap perempuan pekerja domestik ini bersinggungan dengan praktik diskriminasi dan pemberian stereotip berbasis ras, bangsa, dan budaya. Di mana, misalnya, orang India cenderung dihindari karena 'berbau', serta beberapa stereotip seperti jorok dan kotor yang melekat pada orang Ethiopia semata-mata karena mereka berkulit hitam; sehingga majikan pun tidak mau mengambil orang India untuk bekerja di dapurnya ataupun orang Ethiopia untuk mengasuh anaknya. Menjadi nyata bahwa di dalam sektor kerja rendah sekalipun, terdapat bentuk penindasan lain terhadap perempuan selain penindasan berbasis ekonomi berupa eksploitasi atas tenaga kerja mereka. Ini yang perlu diperhatikan lebih jauh bagi upaya perlindungan terhadap perempuan pekerja domestik yang rentan terhadap berbagai macam pelanggaran; bukan hanya TKW-PLRT asal Indonesia, melainkan juga mereka yang berasal dari negara lain.

Sampai di sini terlihat bahwa pembagian sektor kerja dalam kapitalisme pasca-Fordis telah mengakibatkan masuknya beragam perempuan ke dalam lapangan kerja rendah di negara-negara pusat. Mereka yang pada umumnya

berasal dari negara-negara berkembang atau tergolong periferi, dengan segala stereotip terhadap diri mereka—yang sangat mungkin dapat memperparah praktik eksploitasi/pelanggaran/ketidakadilan terhadap mereka selama mereka bekerja.

IV.3 Implikasi bagi TKW-PLRT

Apa saja implikasi temuan penelitian ini untuk memahami posisi TKW-PLRT dalam pusaran akumulasi kapital global ini? Pertama, ini berarti bahwa kapitalisme telah melanggengkan dan cenderung memanfaatkan relasi kuasa antara gender laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat, dalam hal ini masyarakat Indonesia. Memahami bagaimana identitas gender dieksploitasi di dalam sistem kapitalisme global tampak nyata dalam tuturan kisah mantan TKW-PLRT yang Penulis wawancara di dalam Bab II. Konstruksi sosial peran perempuan atau gender yang ditemukan dalam data hasil wawancara menunjukkan peran perempuan/ibu di dalam keluarga, utamanya sebagai pelayan dalam keluarga, sekaligus sebagai pencari nafkah ketika laki-laki tidak dapat memenuhi perannya sebagai pencari nafkah, telah ikut mendorong perempuan keluar dari ranah domestik dan masuk ke sektor publik. Perempuan dituntut untuk memprioritaskan keluarganya dan mengambil risiko bekerja di sektor ekonomi domestik ketika laki-laki/ayah tidak dapat memenuhi peran sosial dalam keluarganya sebagai pencari nafkah. Namun, mengingat terbatasnya keterampilan perempuan yang bernilai ekonomi tinggi, sektor-sektor kerja yang dimasuki perempuan pun terbatas pada sektor kerja yang juga tidak bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya sektor kerja domestik yang lahir dari pembagian kerja internasional yang baru berbasis pada gender.

Kedua, memahami posisi TKW-PLRT dalam konteks kapitalisme global berangkat dari pemahaman bahwa transformasi dalam struktur pasar tenaga kerja, termasuk lahirnya sektor kerja domestik ini, secara paralel disebabkan oleh pergeseran yang signifikan dalam organisasi industrial kapitalisme pasca-Fordis. Organisasi kerja yang lebih fleksibel membuka kesempatan bagi bisnis-bisnis skala kecil seperti peluang kerja domestik, ataupun ekonomi informal lain hingga

underground economies yang mengindikasikan adanya penyatuan antara sistem tenaga kerja ‘dunia ketiga’ dengan sistem tenaga kerja kapitalis yang sudah maju dan berkembang.⁷² Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Saskia Sassen mengenai fenomena *global cities*, di mana sejumlah besar pekerja-pekerja perempuan dan imigran berupah rendah dimasukkan atau dipersatukan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang strategis—persis di mana sektor-sektor ekonomi rentan eksploitasi ini dilahirkan.

IV.3.1 Kapitalisme Pasca-Fordis: TKW-PLRT sebagai Pekerja yang *Precarious* (*Precarious Workers*)

Bekerja dalam moda produksi pascakrisis kapitalisme Fordis berarti bekerja dalam organisasi tenaga kerja yang baru, yang lebih fleksibel. Reorganisasi tenaga kerja menjadi fleksibel ini menghasilkan kondisi ketidakjelasan/ketidakpastian (*precarity*) yang dihadapi oleh para pekerja di era kapitalisme pasca-Fordis.⁷³ Ketidakpastian ini mulanya mengacu pada ketiadaan jaminan akan pekerjaan tetap dalam jangka panjang. Para pekerja ditujukan untuk memiliki karakter yang fleksibel, karena tidak lagi berurusan dengan hanya satu jenis pekerjaan serta harus mampu beradaptasi dengan berbagai macam jenis pekerjaan; yang selalu berpindah (*mobile*), karena dapat bekerja di banyak tempat; dan yang tidak menentu, karena menjamurnya sistem kontrak dan *outsourcing* yang mengakibatkan tidak adanya jaminan akan sebuah pekerjaan yang stabil dalam jangka waktu yang panjang.⁷⁴

Menurut Brett Neilson dan Ned Rossiter, keduanya merupakan Profesor Budaya di University of Western Sydney, prekarity adalah lebih dari sekedar kondisi ketidakpastian. Neilson dan Rossiter mengutip Lazzarato demikian: *In its most ambitious formulation it would encompass not only the condition of precarious workers but a more general existential state, understood at once as a*

⁷² David Harvey, “Theorizing the Transition”, *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*, (Massachusetts: Blackwell Publishers, 1989), hlm. 155.

⁷³ Brett Neilson dan Ned Rossiter, “Precarity as Political Concept, or, Fordism as Exception”, dalam *Theory, Culture and Society*, Vol. 25 (7-8), 2008, hlm. 51.

⁷⁴ Josef Esser dan Joachim Hirsch, *op. cit.*, hlm. 88.

*source of 'political subjection, of economic exploitation and of opportunities to be grasped.'*⁷⁵ Prekariti mengindikasikan berjalannya suatu subyektivikasi (mekanisme pemosisian subyek), di mana subyek yang dihasilkan dan umum ditemukan pada kelompok pekerja di era kapitalisme pasca-Fordis adalah subyek-subyek yang *precarious* atau mereka yang disebut sebagai 'precariat', *precarious proletariat*.

Subyektivitas (posisi subyek) itu sendiri bukan berbicara mengenai identitas apa; sebab, ia dapat teraplikasi pada identitas yang manapun jika dimungkinkan. Jika sebuah identitas dapat dipahami sebagai sekumpulan karakteristik, kepercayaan, dan dengan kesetiaan tertentu yang mengikutinya—yang mana dalam jangka pendek maupun panjang memberikan kepribadian yang tetap dan suatu moda/tata cara tertentu sebagai makhluk sosial kepada seseorang/sekelompok orang; subyektivitas justru berbicara tentang bagaimana dan dari mana suatu identitas muncul, sejauh mana ia dapat dipahami, dan hingga di titik apa ia dapat dikontrol.⁷⁶ Subyektivitas dipahami oleh Donald E. Hall, Profesor Kajian Bahasa dan Literatur Inggris di West Virginia University, sebagai suatu tingkat pemikiran dan kesadaran akan identitas diri, sementara di saat yang sama ia juga memberikan batasan-batasan dan ketidakleluasaan untuk dapat memahami identitas tersebut secara penuh.⁷⁷ Memahami subyektivitas para pekerja domestik migran Indonesia penting untuk menjawab pertanyaan permasalahan mengapa arus migrasi ini cenderung tetap deras di tengah banyaknya masalah yang ada.

Subyektivitas (atau posisi subyek) para pekerja kapitalis pasca-Fordis dibahas oleh Profesor Budaya dari King's College, London, Rosalind Grill dan Andy Pratt. Grill dan Pratt mengutip beberapa tulisan dari pemikir Marxis Otonomis yang melihat kerja atau pekerja sebagai mekanisme sentral dalam kapitalisme. Dan pekerja, dalam hal ini berarti para pekerja domestik migran tersebut, tidak hanya dilihat sebagai korban dari kapital; tetapi juga dilihat sebagai *subyek* yang berperan penting dalam logika dialektis pada relasi kapitalis—yakni

⁷⁵ Brett Neilson dan Ned Rossiter, *op. cit.*, hlm. 52.

⁷⁶ Donald E. Hall, "Introduction", dalam *Subjectivity*, (New York: Routledge, 2004), hlm. 3.

⁷⁷ *Ibid.*

relasi pada level analisis manajemen pekerjaanya, di mana para pekerja tersebut berperan aktif menjamin berlangsungnya rezim akumulasi kapital.

Menurut Grill dan Pratt, prekarity ini mengacu pada seluruh bentuk kerja yang tidak aman (*insecure*), tidak tentu (*contingent*), dan fleksibel—mulai dari pekerjaan yang tidak dilegalkan, tidak tetap, dan temporer; hingga pekerjaan rumah, pekerjaan per potong (*piecework*), dan pekerjaan lepas (*freelance*).⁷⁸ Para pekerja dikondisikan untuk merasa gelisah dan didorong untuk mengikuti pola kerja yang tidak pasti ini. Pada gilirannya, ketidakpastian juga berarti menggandakan pola hidup yang tidak pasti (*precarious*), tidak stabil, dan tidak aman. Ketidakpastian (*precariousness*) ini terus-menerus direproduksi (*precarization*) oleh sistem kapitalisme pasca-Fordis sehingga menjadi suatu norma yang diterima secara wajar oleh para pekerja kapitalis. Karenanya, dalam masyarakat yang makmur sekalipun, ketidakpastian serupa juga dihadapi oleh para pekerja dengan upah dan status yang tinggi. Transformasi dalam sistem kapitalisme telah memproduksi para pekerja yang gelisah (*insecure*), baik pada pekerja dengan keterampilan dan pendapatan yang rendah maupun tinggi.⁷⁹

Paparan motivasi ketiga mantan TKW-PLRT di PEA dalam Bab II menunjukkan bagaimana para perempuan pekerja domestik migran asal Indonesia berada dalam keadaan yang *precarious*. Mereka mengambil pekerjaan sebagai TKW-PLRT karena ‘tidak ada pilihan lain’, ‘desakan ekonomi’, dan alasan-alasan yang mengindikasikan kondisi prekarity yang khas dialami oleh pekerja dalam kapitalisme pasca-Fordis. Dalam kondisi yang *precarious* inilah peran aparatus menjadi penting dalam memengaruhi keputusan bekerja para TKW-PLRT. Mereka inilah para jejaring informal di sekitar TKW-PLRT yang berperan signifikan dalam memengaruhi keputusan bermigrasi. Konsep aparatus di sini ialah konsep yang dipahami oleh Agamben dengan mengembangkan pemikiran Michel Foucault. Agamben memahami aparatus dalam konteks baru, di mana aparatus merupakan *segala sesuatu* yang dengan cara tertentu memiliki kapasitas

⁷⁸ Rosalind Grill dan Andy Pratt, “Precarity and Cultural Work, In the Social Factory?: Immaterial Labour, Precariousness and Cultural Work”, dalam *Theory, Culture & Society*, Vol. 25 (7-8), 2008, hlm. 3.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

untuk menarik, mengorientasikan, menahan, mencontohkan, mengontrol, dan menjamin gestur, perilaku, opini, atau diskursus tentang individu,⁸⁰ dalam hal ini individu TKW-PLRT.

IV.3.2 Penindasan Berlapis-lapis pada TKW-PLRT

Penulis menemukan bahwa solusi menempatkan perempuan sebagai tenaga kerja sektor domestik internasional untuk mengambil peluang upah pekerjaan yang lebih tinggi di negara lain justru membuka kenyataan bahwa perempuan pekerja ini tereksplorasi dengan lebih buruk dibandingkan di dalam negeri. Sebab pemberian pekerjaan ini tidak serta-merta memberikan pilihan sektor pekerjaan yang lain bagi mereka. Seperti yang telah diperlihatkan dalam analisis sebelumnya bahwa perempuan dari negara-negara periferi akan selalu berada pada posisi yang jauh dari akses produksi. Kerja perempuan-perempuan ini dianggap tidak bernilai ekonomi meski sesungguhnya mereka berperan memelihara dan menjaga kesediaan tenaga kerja formal dalam unit-unit keluarga (tenaga kerja reproduktif).

Kisah Bu Ayi, Bu Ami, dan Bu Siti mengenai kondisi kerja yang mereka hadapi di PEA telah menunjukkan bagaimana kerja-kerja sektor informal telah menopang kerja sektor formal yang berkembang dengan baik di PEA. Perkembangan kapitalisme global yang bersifat spasial menunjukkan kenampakannya di Indonesia dengan ciri moda akumulasi kapitalnya yang masih primitif, di mana tingkat eksploitasi pekerja yang berlangsung sangat tinggi dengan durasi dan intensitas kerja yang lebih padat namun upah kerjanya sangatlah murah. Pekerjaan informal dalam bentuk ekonomi reproduktif kemudian menjadi salah satu bentuk keluaran (*output*) dari akumulasi primitif tersebut.

Namun demikian, nyata bahwa tidak semua aktor dapat mengisi sektor kerja informal/reproduktif tersebut. Sebab terbukti bahwa aliran migrasi pekerja domestik Indonesia ke PEA berwajah perempuan. Apakah laki-laki tidak dapat

⁸⁰ Giorgio Agamben, *What is An Apparatus? and other essays*, (California: Stanford University Press, 2009), hlm. 14.

mengisi sektor kerja ini? Mengapa perempuan dari negara-negara tertentu cenderung lebih diminati dari pada perempuan dari negara lain? Di sinilah praktik eksploitasi berbasis gender tersebut bersinggungan dengan isu identitas lainnya, dan menggandakan kerentanan, potensi eksploitasi dan ketidakadilan yang dapat dialami oleh perempuan pekerja domestik sebagai subyek pada posisi terendah hirarki kuasa ekonomi dalam pembagian kerja internasional ini. Mereka inilah perempuan-perempuan yang disebut oleh Gayatri Spivak sebagai ‘subaltern subproletariat’.⁸¹

Hal yang lebih memprihatinkan dalam temuan Penulis selama penelitian ialah bagaimana kerentanan akibat relasi kuasa yang timpang dengan perempuan pekerja domestik migran sebagai pihak yang paling dirugikan ini telah dimulai jauh sebelum perempuan-perempuan tersebut berangkat ke negara tujuan (PEA). Tuturan agen/sponsor, karyawan PPTKIS, serta celetukan anggota-anggota keluarga yang sempat terdengar selama Penulis melakukan wawancara dengan para perempuan pekerja domestik migran tersebut menunjukkan adanya relasi kuasa di antara para perempuan pekerja domestik migran ini dengan jejaring informal di sekitar mereka. Relasi kuasa yang sangat memengaruhi pemosisian perempuan tersebut dalam posisi-posisi kerja yang rentan.

Para agen/sponsor pada umumnya merupakan orang-orang yang mengenal secara personal para perempuan pekerja domestik migran tersebut dan juga keluarga mereka. Agen/sponsor dari daerah kantong-kantong pemasok TKW-PLRT ini adalah aktor-aktor yang *dipercaya* untuk mengurus keberangkatan hingga penerimaan hasil kerja (gaji) oleh keluarga mereka di daerah, sementara mereka berada di luar negeri. Agen/sponsor dan para karyawan PPTKIS dalam potret migrasi TKW-PLRT ini merupakan pihak-pihak yang mendapat kue ekonomi cukup besar dari kegiatan migrasi tenaga kerja domestik internasional tersebut—satu hal menarik yang Penulis temukan, jika selama ini penggambaran kue ekonomi hasil migrasi TKW-PLRT lebih banyak ditunjukkan dalam bentuk remitansi bagi negara. Mendapatkan kue ekonomi, namun sedikit di antara mereka

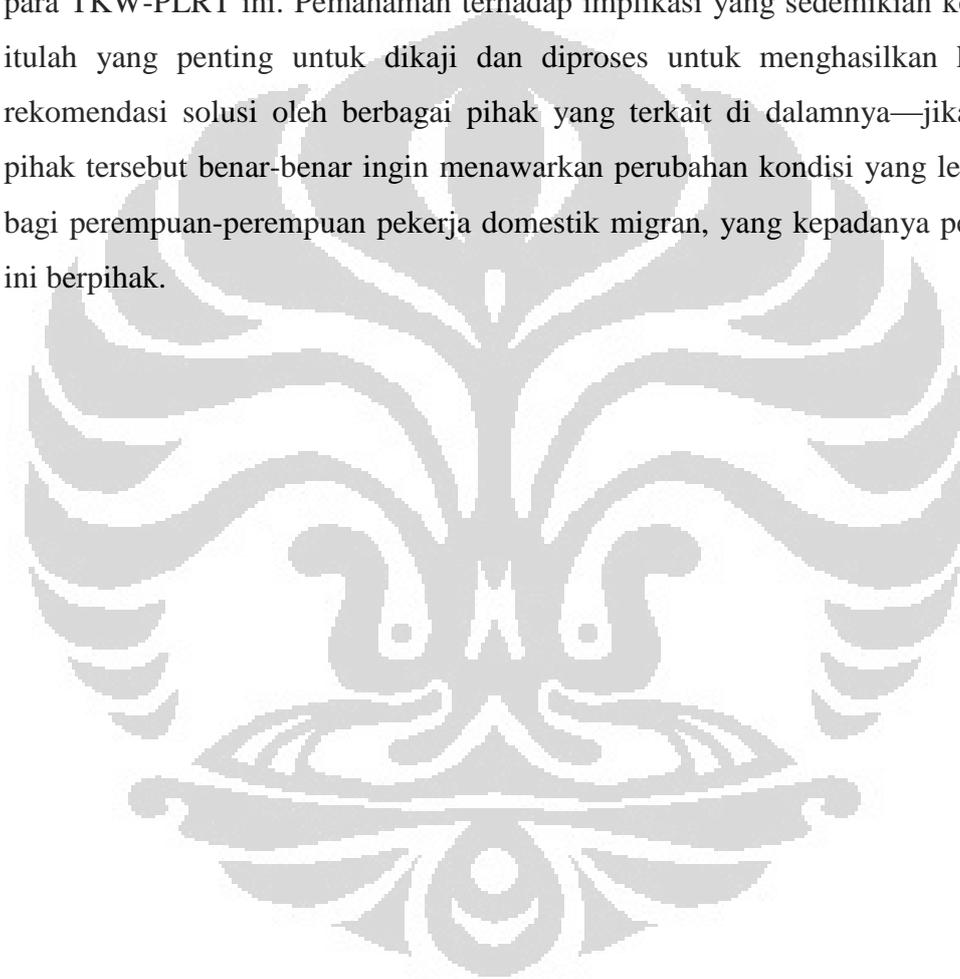
⁸¹ Dalam Liberty L. Chee, “The Regulation of Globalising Reproductive Labour Markets”, dalam Panel 4, *International Graduate Conference*, Frankfurt Research Centre for Postcolonial Studies, 16-18 Juni 2011, hlm. 2.

yang benar-benar pernah merasakan pengalaman bekerja di negara-negara tujuan migrasi yang mereka persuasikan; itulah gambaran yang Penulis tangkap sepanjang perjalanan penelitian ini mengenai sosok agen/sponsor, serta karyawan-karyawan PPTKIS, sebagai bagian jejaring informal yang berperan sangat signifikan dalam memengaruhi keputusan bermigrasi para perempuan pekerja domestik migran. Seluruh TKW-PLRT yang Penulis wawancara tidak memahami secara utuh bagaimana profil PEA sebagai negara tujuan bekerja, bukan pula kemajuan ekonomi PEA yang membuat mereka tertarik untuk bermigrasi, dan mereka pun tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai seperti apa pekerjaan yang akan mereka lakukan di sana ketika berangkat (mengutip kata-kata mereka, “Semua itu adalah nasib”). Namun demikian, mereka tetap mantap melangkah ke PEA atas dasar persepsi yang dibangun oleh jejaring informal di sekitar mereka ini. Yang tanpa mereka sadari, tengah menikmati kue ekonomi yang lebih besar dari mereka, minus kerentanan yang harus mereka terima sebagai “bonus” keputusan untuk bermigrasi sebagai TKW-PLRT ke PEA.

Untuk memastikan potongan kue ekonomi tersebut, kebanyakan dari agen/sponsor dan para karyawan PPTKIS ini “bertanggung jawab” penuh dalam memastikan para perempuan pekerja domestik migran itu dapat *naik pesawat* ke negara tujuan. Sehingga dapat dipahami ketika suara-suara mereka terkait moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi yang terdengar oleh Penulis selama wawancara, adalah suara-suara berupa respon yang menyayangkan ‘bagaimana sedikit persentase kejadian negatif yang menimpa para TKW-PLRT di Timur Tengah’ (penekanan dari Penulis merepresentasikan penekanan respon oleh mereka), lantas diidentikkan dengan ‘seluruh pengalaman kerja TKW-PLRT di sana’ sehingga perlu diberlakukan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi untuk sementara waktu. Bagi mereka, sisi positifnya *jauh lebih besar* daripada sisi negatif jika pengiriman TKI ke Arab Saudi tetap berjalan hingga hari ini. Mereka inilah ‘raja-raja kecil’ yang menikmati kue ekonomi hasil eksploitasi kerja terhadap perempuan-perempuan dari negara periferi seperti Indonesia.

Dari paparan kondisi tersebut di atas, tampak sekali adanya penindasan berlapis-lapis yang dialami oleh para TKW-PLRT di tengah pusaran ekonomi

global yang melibatkan Indonesia dan PEA sebagai negara asal/pengirim dan negara tujuan/penerima migran pekerja domestik internasional. Mulai dari penindasan yang kasatmata di negara tujuan, seperti dituturkan oleh Bu Ayi bahwa paspornya dipegang oleh majikan, dan baru dikembalikan di saat ia hendak pulang ke Indonesia (yang mana hal ini *tidak* dilihat oleh Bu Ayi sebagai bentuk kerentanan, apalagi penindasan); hingga kerentanan dan penindasan tidak kasatmata yang dilakukan *justru* oleh orang-orang terdekat di sekitar keseharian para TKW-PLRT ini. Pemahaman terhadap implikasi yang sedemikian kompleks itulah yang penting untuk dikaji dan diproses untuk menghasilkan keluaran rekomendasi solusi oleh berbagai pihak yang terkait di dalamnya—jika pihak-pihak tersebut benar-benar ingin menawarkan perubahan kondisi yang lebih baik bagi perempuan-perempuan pekerja domestik migran, yang kepadanya penelitian ini berpihak.



BAB V

KESIMPULAN

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan Penulis atas keseluruhan bahasan dalam penelitian ini, sekaligus jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan: Mengapa arus migrasi Tenaga Kerja Wanita-Penata Layan Rumah Tangga (TKW-PLRT) ke Persatuan Emirat Arab tetap tinggi, di tengah banyaknya masalah yang dialami oleh para pekerja migran tersebut di sana selama ini? Untuk mengkaji kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan arus migrasi perempuan pekerja domestik Indonesia ke PEA, di tengah-tengah banyaknya masalah yang dialami oleh para pekerja migran tersebut di sana selama ini, Penulis telah menjabarkan pertanyaan penelitian di atas ke dalam pertanyaan-pertanyaan operasional: Pertama, apa alasan perempuan Tenaga Kerja Wanita-Penata Layan Rumah Tangga (TKW-PLRT) untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab? Dan kedua, bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melatari migrasi tersebut dilihat dari sisi Indonesia-Persatuan Emirat Arab?

Penulis berupaya untuk membangun suatu penjelasan atas pertanyaan permasalahan yang diangkat dengan berpikir secara induktif, *grounded*, akan 'kekhasan' suatu kekuatan global yang beroperasi di tingkat mikro melalui perspektif feminis. Data yang dipakai dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai narasumber; dengan peran sebagai: mantan TKW-PLRT di PEA, sebagai basis data untuk menelaah kondisi internal yang memengaruhi arus migrasi; serta sponsor TKW-PLRT dan karyawan Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), sebagai basis data untuk mengulas dinamika eksternal yang memengaruhi arus migrasi. Penulis melakukan wawancara kepada sembilan orang, dengan rincian sebagai berikut: tiga orang TKW-PLRT eks-Abu Dhabi, dua orang sponsor/agen pengadaan TKW-PLRT dari daerah Sukabumi, dan tiga orang karyawan tetap PPTKIS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan

adalah *purposive sampling*, di mana Penulis memilih sampel dengan tidak melalui mekanisme acak; tetapi sebaliknya, memilih beberapa orang yang diyakini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan data sekunder yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini berupa berbagai dokumen mengenai statistik jumlah tenaga kerja domestik Indonesia di PEA, serta berbagai literatur seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, situs internet, dan lain-lain, yang memuat tulisan-tulisan mengenai isu ini.

Temuan kondisi yang memungkinkan tersebut ialah bahwa: pertama, spesifisitas perempuan Indonesia sebagai TKW-PLRT dapat dipahami dari konstruksi sosial peran perempuan; utamanya sebagai pelayan dalam keluarga, sekaligus sebagai pencari nafkah ketika laki-laki tidak dapat memenuhi perannya sebagai pencari nafkah. Perempuan dituntut untuk memprioritaskan keluarganya dan mengambil risiko bekerja di sektor ekonomi domestik (mengingat terbatasnya keterampilan perempuan yang bernilai ekonomi tinggi) sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II.

Kedua, tingginya arus migrasi perempuan pekerja domestik migran asal Indonesia ke PEA tidak dapat dilepaskan dari kesenjangan ekonomi yang menjadi faktor penarik dan pendorong migrasi di antara kedua negara. Pembangunan ekonomi di PEA dengan serangkaian kebijakan dan keberhasilannya telah menimbulkan peningkatan taraf hidup masyarakat yang berimplikasi pada gaya hidup yang konsumtif, termasuk ketika sebuah keluarga mampu mempekerjakan tenaga kerja domestik yang menjadi lambang prestise tersendiri bagi mereka. Kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah PEA dengan melibatkan perempuan juga menyebabkan masuknya perempuan ke dalam angkatan kerja di sana. Masuknya perempuan ke dalam sektor publik dan mengisi lapangan-lapangan kerja formal sekaligus mengubah peran sosial perempuan di dalam keluarga. Kekosongan sektor kerja domestik inilah yang menjadi peluang kerja bagi perempuan dari negara-negara dengan tingkat ekonomi yang relatif lebih rendah dari PEA, termasuk Indonesia. Inilah yang menjadi faktor penarik keputusan bermigrasi bagi para pekerja domestik Indonesia ke PEA.

Sementara, kemiskinan dan kolaps-nya pembangunan ekonomi domestik akibat krisis finansial 1997 menjadi faktor pendorong untuk bermigrasi. Dengan banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya, tingkat inflasi yang tinggi, harga-harga kebutuhan pokok yang naik, serta terbatasnya lapangan kerja yang tersisa pascakrisis finansial tersebut maka semakin banyak tenaga kerja yang memilih untuk berangkat ke luar negeri untuk mencari peluang kerja dengan tingkat upah yang lebih tinggi daripada di dalam negeri. Menurunnya taraf hidup masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya persentase kemiskinan absolut penduduk pascakrisis 1997 semakin memicu para tenaga kerja Indonesia ini untuk mengisi lapangan-lapangan kerja rendah yang tersedia di negara-negara makmur seperti di PEA, termasuk lapangan kerja sektor domestik di sana. Inilah dinamika eksternal yang memengaruhi tingginya arus migrasi TKW-PLRT ke PEA.

Dalam pemahaman ekonomi politik internasional, kondisi dunia adalah seperti pasar kapitalis, di mana Indonesia sebagai negara surplus tenaga kerja menjadi penyedia komoditi tenaga kerja sektor informal—konsekuensi dari pembangunan ekonomi domestik yang tidak mampu menyerap sumber daya manusianya sebagai tenaga kerja produktif. Sektor informal itu sendiri didominasi oleh sektor kerja domestik yang diisi oleh perempuan Indonesia sebagai tenaga kerja reproduktif. Sedangkan PEA, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sebaliknya defisit tenaga kerja, menjadi peminta komoditi tenaga kerja domestik Indonesia yang diperlukan untuk menopang pembangunannya. Konteks ekonomi-politik internasional inilah yang menempatkan perempuan TKW-PLRT asal Indonesia sebagai aktor migrasi tenaga kerja internasional dengan spesifikitas lapangan kerja rendah.

Analisis kemudian ditarik kepada konteks ekonomi global rezim akumulasi pasca-Fordis yang memungkinkan kedua dimensi tersebut di atas, internal dan eksternal TKW-PLRT, berinteraksi memengaruhi tingginya arus aliran migrasi pekerja domestik Indonesia ke PEA; kontras dengan sekian banyak masalah terkait TKW-PLRT yang ada selama ini. Secara makro, perkembangan kapitalisme global yang berbeda-beda telah menyebabkan bagaimana perempuan

Indonesia tereksplorasi dalam sistem ini tidak dapat disamakan dengan pengalaman perempuan PEA. Pengalaman yang berbeda ini telah menjadi basis eksploitasi bagi akumulasi kapital, sehingga migrasi pekerja domestik internasional ini mengalir dengan arah yang demikian: dari negara dengan tingkat ekonomi yang relatif lebih rendah (pinggiran) ke negara dengan tingkat ekonomi yang relatif lebih tinggi (pusat), dan bukan sebaliknya. Aktor-aktornya pun menjadi spesifik, yakni *perempuan*, sebagaimana diuraikan dalam Bab IV.

Apa saja implikasi temuan penelitian ini untuk memahami posisi TKW-PLRT dalam pusaran akumulasi kapital global ini? Pertama, bahwa kapitalisme telah melanggengkan dan cenderung memanfaatkan relasi kuasa antara gender laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat, dalam hal ini masyarakat Indonesia. Memahami bagaimana identitas gender dieksplorasi di dalam sistem kapitalisme global tampak nyata dalam tuturan kisah mantan TKW-PLRT yang Penulis wawancara di dalam Bab II. Kedua, terlihat jelas bagaimana TKW-PLRT telah diposisikan pada sektor kerja yang sangat rentan tersebut secara sistemik. Transformasi dalam struktur pasar tenaga kerja, termasuk lahirnya sektor kerja domestik, secara paralel disebabkan oleh pergeseran yang signifikan dalam organisasi industrial kapitalisme pasca-Fordis.

Organisasi kerja yang lebih fleksibel membuka kesempatan bagi bisnis-bisnis skala kecil seperti peluang kerja domestik, yang mengindikasikan adanya penyatuan antara sistem tenaga kerja 'dunia ketiga' dengan sistem tenaga kerja kapitalis yang sudah maju dan berkembang. Perkembangan kapitalisme global yang spasial di PEA dan Indonesia kemudian dengan cerdas memosisikan perempuan TKW-PLRT ini sebagai jawaban yang tepat pengisi peluang sektor kerja domestik di PEA. Adanya perbedaan pengalaman perempuan dalam dalam proses perkembangan kapitalisme global dari kacamata feminis struktural mampu menjelaskan bagaimana arus migrasi pekerja domestik ini telah menopang suatu sistem akumulasi kapital di tingkat global.

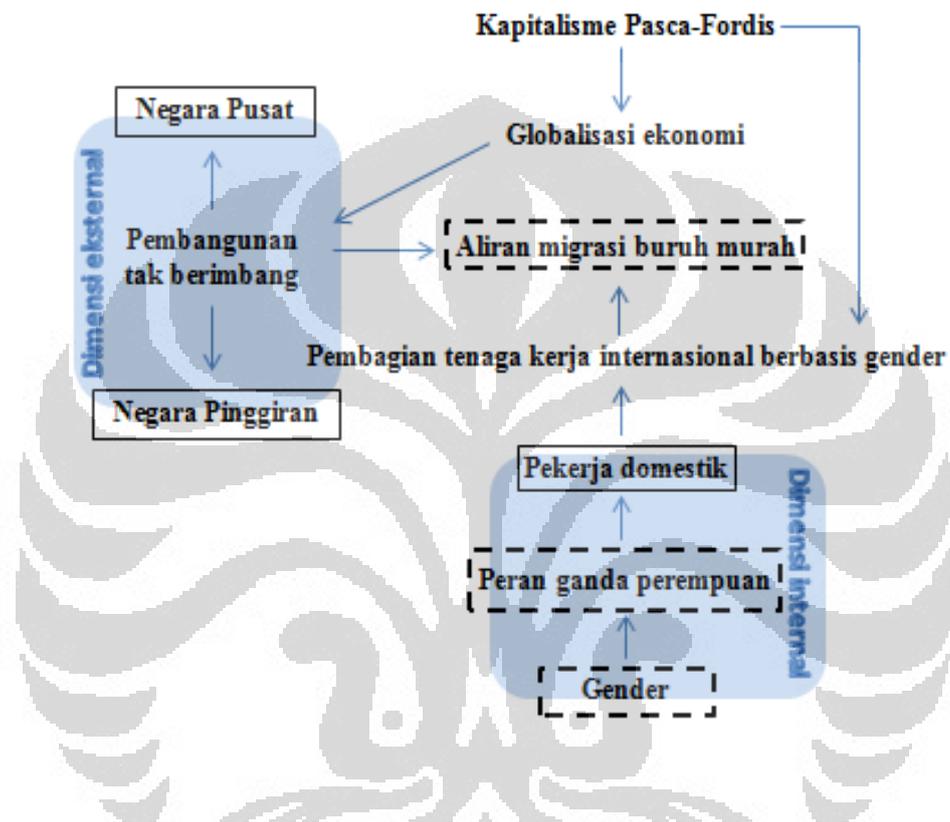
Terus derasnya aliran ini meskipun terdapat banyak permasalahan di dalamnya juga dapat dipahami dari berjalannya kekuatan global sistem kapitalisme di tingkat mikro. Di mana jejaring informal, seperti agen/sponsor dan

karyawan PPTKIS, di sekitar perempuan pekerja domestik migran ini berperan sebagai aparatus-aparatus sistem global. Keberadaan mereka sebagai aparatus telah mengkondisikan para TKW-PLRT untuk mengambil pilihan kerja tersebut secara sadar meski dengan risiko kerja yang besar. Kondisi pekerja yang *precarious* di era kapitalisme pasca-Fordis juga tak bisa ditinggalkan untuk dapat memahami pemilihan kerja sebagai TKW-PLRT ke PEA oleh para perempuan pekerja domestik migran ini sehingga mereka seolah-olah tak memiliki pilihan lain selain mengikuti ke mana arus akumulasi kapital membawa mereka, lengkap dengan serangkaian kerentanan serta eksploitasinya.

Hipotesis di awal penelitian pun diperlengkapi melalui sejumlah temuan mengenai konteks yang melatari derasnya aliran migrasi perempuan pekerja domestik dari Indonesia ke Persatuan Emirat Arab. Bahwa kapitalisme menjadi kekuatan global yang beroperasi di tingkat makro dan mikro dengan karakteristik relasi kapital yang khas pasca-Fordis. Perkembangan kapitalisme global yang bersifat spasial dan pembangunan tidak berimbang justru menjadi katalisator bagi terus berjalannya sistem kapitalisme global oleh karena eksploitasi dalam sistem kapitalisme berbasiskan kesenjangan. Tanpa kesenjangan tidak akan terjadi akumulasi kapital, dan oleh karenanya faktor penarik dan pendorong migrasi tenaga kerja internasional merupakan suatu kenampakan yang inheren dalam perkembangan kapitalisme global.

Sementara subyek-subyek perempuan yang masuk ke dalam angkatan kerja melalui feminisasi pekerja sebagai salah satu varian fleksibilisasi pekerja tidaklah sama satu sama lain—sebab perempuan berdasarkan kategori produksinya bukanlah subyek yang satu; temuan menarik lain menunjukkan adanya kerentanan lain yang muncul dari penindasan/eksploitasi berbasis identitas seperti ras, kultur, bangsa, agama yang terkait erat dengan migrasi tenaga kerja domestik internasional. Tidak hanya bagi TKW-PLRT asal Indonesia, upaya perjuangan untuk memberdayakan perempuan pekerja domestik migran secara global yang mengalami penindasan berlapis-lapis ini sangat perlu untuk mendapat perhatian khusus. Upaya menyeimbangkan relasi kuasa ekonomi yang timpang akibat penindasan berlapis-lapis dalam sistem ini harus bertujuan mengembalikan

otonomi kepada perempuan-perempuan itu untuk dapat mengambil akses produksi yang tidak membuatnya berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai ketidakadilan. Berikut skema temuan penelitian seperti yang telah Penulis sajikan sebelumnya dalam Bab IV.



Rekomendasi praktis yang diberikan oleh Penulis akan dikaitkan kepada peran negara yang nyata dari temuan penelitian ini sebagai penjamin stabilitas permintaan dan penawaran tenaga kerja domestik di pasar tenaga kerja internasional. Telaah dalam kerangka sistemik memperlihatkan bahwa pengiriman TKI ke luar negeri bukannya memperbaiki posisi perempuan dari negara periferi sebagai pihak yang paling dirugikan dalam sistem kapitalisme global. Justru, para perempuan pekerja domestik migran atau TKW-PLRT ini kembali menjadi pihak yang paling dirugikan atas eksploitasi tenaga kerja reproduktif dalam sistem kapitalisme di negara tujuan—belum termasuk bentuk-bentuk diskriminasi dan kerentanan terhadap pelanggaran lainnya yang sangat mungkin terjadi selama proses migrasi tenaga kerja domestik tersebut.

Negara dengan segenap institusi yang dibentuknya untuk memfasilitasi migrasi perempuan pekerja domestiknya ke luar negeri justru berperan sebagai pengatur (regulator dalam kapitalisme) yang memfasilitasi berjalannya eksploitasi dan berbagai potensi kerentanan atas pekerja-pekerja feminin ini—paradoksikal dengan gambaran negara yang selama ini beredar di masyarakat sebagai pelindung pekerja (domestik) migrannya. Negara, melalui sejumlah program dan institusi di dalamnya, telah menyediakan mekanisme komodifikasi dan pertukaran tenaga kerja yang berarti juga melanggengkan praktik eksploitasi terhadap perempuan-perempuan pekerja domestik ini.

Berdasarkan *lesson learnt* ini, bagi pemerintah Indonesia ataupun aktor-aktor lain yang terlibat dalam penanganan isu TKW-PLRT ini rekomendasi praktis Penulis untuk ke depannya adalah: dengan selalu mengingat dan mengusahakan agar perjuangan untuk melindungi para TKW-PLRT tersebut hendaknya tidak dilandaskan pada cara-cara jangka pendek melalui pemberian koridor hukum atau institusi untuk menjamin perlindungan atas mereka saja (seperti yang selama ini selalu diupayakan dan diklaim sudah dilakukan oleh aktor-aktor tertentu).

Penanganan yang bersifat jangka pendek tersebut akan sulit diharapkan untuk dapat berjalan secara efektif melindungi TKW-PLRT; *jika* kondisi-kondisi yang memungkinkan praktik pamarjinalan dan eksploitasi terhadap perempuan pekerja domestik ini *tidak diubah*. Dalam jangka pendek, pemberian perlindungan dapat mengurangi jumlah kasus pelanggaran terhadap mereka; namun secara jangka panjang kedudukan mereka tetap rentan terhadap pelanggaran, yang mana dapat terjadi sewaktu-waktu, di luar kontrol hukum dan pengawasan pihak-pihak yang secara legal ‘bertanggung jawab’ memberikan perlindungan kepada mereka.

Lewat temuan penelitian yang membuat nyata kondisi eksploitasi tak kasatmata atas para TKW-PLRT ini, hendaknya kondisi-kondisi itulah yang diubah atau paling tidak diminimalisir potensinya untuk dapat memberikan pelanggaran/ketidakadilan terhadap mereka. Misalnya meninjau ulang setiap kesepakatan mulai dari perjanjian kerja hingga nota kesepahaman bilateral tingkat negara yang selama ini ikut melanggengkan praktik marjinalisasi dan eksploitasi

terhadap para pekerja ini. Dan yang kedua, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik yang mampu menyerap tenaga kerja seluas-luasnya sehingga kue ekonomi pun dapat terbagi secara lebih merata di masyarakat—tentu dengan catatan agar memperhatikan pula serta mengurangi berbagai praktik eksploitasi berlebihan terhadap para pekerjanya.

Sedangkan untuk rekomendasi penelitian selanjutnya, penelitian ini telah memperlihatkan bagaimana subyek-subyek perempuan telah tercakup ke dalam sistem kapitalisme global secara berbeda. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat kerentanan lain yang muncul dari penindasan/eksploitasi berbasis identitas seperti ras, kultur, bangsa, agama yang terkait erat dengan migrasi tenaga kerja domestik internasional. Hal ini tidak hanya berlaku bagi TKW-PLRT asal Indonesia, tapi juga para pekerja domestik yang berasal dari negara-negara lain. Di sinilah Penulis mengakui keterbatasan penelitian ini, di mana tidak terdapat upaya elaborasi data lebih jauh untuk memetakan bentuk-bentuk penindasan/eksploitasi berbasis identitas multikultur ini secara khusus. Upaya perjuangan untuk memberdayakan perempuan pekerja domestik migran secara global yang mengalami penindasan berlapis-lapis tersebut sangat memerlukan pemetaan semacam ini terlebih dulu.

Seperti yang diyakini oleh para feminis multikultural, tidak ada bentuk respon keberpihakan terhadap perempuan yang universal. Utamanya, upaya untuk menyeimbangkan relasi kuasa ekonomi yang timpang akibat penindasan berlapis-lapis ini haruslah bertujuan mengembalikan otonomi kepada perempuan untuk dapat mengambil akses produksi yang tidak membuatnya berada pada posisi paling rentan terhadap berbagai ketidakadilan. Pengembalian otonomi ini tidak dapat dilakukan tanpa pemetaan yang jelas akan relasi kuasa ekonomi yang timpang akibat peremehan rupa-rupa identitas perempuan pekerja domestik tersebut; bagaimana suatu identitas kultural diperlakukan secara berbeda dengan identitas kultural yang lain di dalam sektor kerja rendahan yang sama. Hal inilah yang menurut Penulis wajib menjadi ruang kajian luas berikutnya, yang mengundang penelitian lanjutan di bawah payung isu yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agamben, Giorgio. *What is An Apparatus? and other essays*. California: Stanford University Press, 2009.
- Aglietta, Michel. *A Theory of Capitalist Regulation: The U.S. Experience*. London: New Left Books, 1979.
- Al Majaida, Jamal. *The Press and Social Change in the UAE (1971-1991)*. Abu Dhabi: Zayed Centre for Coordination and Follow Up, 2002.
- Bill, James A. dan Carl Leiden. *Politics in the Middle East*. Boston: Little, Brown and Company, 1979.
- Castles, Stephen dan Mark J. Miller. "Introduction". *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. Ed. Stephen Castles dan Mark J. Miller. New York: The Guilford Press, 2009.
- Country Profile: United Arab Emirates*. The Library of Congress. Juli, 2007.
- Data dan Informasi Penempatan Tenaga Kerja*. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi, Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I., 2009.
- Ehrenreich, Barbara dan Arlie Russel Hochschild. "Introduction". *Global Women*. Ed. Barbara Ehrenreich dan Arlie Russel Hochschild. New York: Henry Holt & Company, 2002.
- Esser, Josef dan Joachim Hirsch. "Post-Fordist Regional and Urban Structure". *Post-Fordism: A Reader*. Ed. Ash Amin. Massachusetts: Blackwell Publishers, 1994.
- Hall, Donald E. "Introduction". *Subjectivity*. New York: Routledge, 2004.
- Harvey, David. "Theorizing the Transition". *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*. Massachusetts: Blackwell Publishers, 1989.

- Hellyer, Peter. "The Land and Its People". *Global Emirates: An Anthology of Tolerance and Enterprise*. Ed. Pranay Gupte dan Fatema Hadroom Alegheli. Dubai: Motivate Publishing, 2009.
- Irianto, Sulistyowati. Ed. *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Kartika, Titiek, Lim Sing Meij, dan Sulistyowati Irianto. "Potret Perempuan di Pasar Kerja Global". *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*. Ed. Sulistyowati Irianto. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Mahdavi, Pardis. *Gridlock: Labor, Migration, and Human Trafficking in Dubai*. California: Stanford University Press, 2011.
- Morrison, Andrew R., et al., ed. *The International Migration of Women*. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
- Parikesit, Tirtawening, Lim Sing Meij, Theresia Dyah Wirastri. "Awal Sebuah Perjalanan: One Stop Recruitment Process". *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*. Ed. Sulistyowati Irianto. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Sassen, Saskia. "Global Cities and Survival Circuits". *Global Woman*. Ed. Barbara Ehrenreich dan Arlie Russel Hochschild. New York: Henry Holt & Company, 2002.
- The United Arab Emirates Yearbook 1995. London: Trident Press Multimedia, 1995.

Jurnal

- Grill, Rosalind dan Andy Pratt. "Precarity and Cultural Work, In the Social Factory?: Immaterial Labour, Precariousness and Cultural Work". *Theory, Culture & Society*, Vol. 25 (7-8), 2008.
- Labadie-Jackson, Glenda. "Reflections on Domestic Work and the Feminization of Migration". *Campbell Law Review*, Vol. 31:67, 2008.

- Neilson, Brett dan Ned Rossiter. "Precarity as Political Concept, or, Fordism as Exception". *Theory, Culture and Society*, Vol. 25 (7-8), 2008.
- Pacione, Michael. "Dubai City Profile". *Cities*, Vol. 22, No. 3, 2005.
- Peterson, V. Spike. "Feminist Theories Within, Invisible To, and Beyond IR". *Brown Journal World Affairs*, Winter/Spring 2004, Volume X, Issue 2.
- Silvey, Rachel. "Transnational domestication: state power and Indonesian migrant women in Saudi Arabia". *Political Geography* 23 (2004).
- "Skilled female labour migration". focus Migration Policy Brief No. 13, April 2009.
- Waylen, Georgina. "You still don't understand: why troubled engagements continue between feminists and (critical) IPE". *Review of International Studies* (2006), 32.
- Wilkie, Jane Riblett. "The Decline in Men's Labor Force Participation and Income and the Changing Structure of Family Economic Support". *Journal of Marriage and Family*, Vol. 53, No. 1 (Feb., 1991).

Skripsi, tesis, prasaran, dan tulisan lain yang belum dipublikasikan

- Chee, Liberty L. "The Regulation of Globalising Reproductive Labour Markets". Panel 4, *International Graduate Conference*. Frankfurt Research Centre for Postcolonial Studies, 16-18 Juni 2011.
- DeNicola, Christopher. *Dubai's Political and Economic Development: An Oasis in the Desert?* A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Bachelor of Arts with Honors in Political Science. Williamstown, Massachusetts: Williams College, 2005.
- Djelantik, Sukawarsini. "Demographic Pressure, Poverty, Human Trafficking, and Migrant Workers: an Indonesian Case", paper dalam *Third Global International Studies Conference on "World Crisis: Revolution in the International Community"*, Porto, Portugal, 17-20 Agustus 2011.
- Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pelayanan Warga (Citizen Service) pada KBRI Abu Dhabi Tahun 2010*. Unit Pelayanan Publik, Direktorat

Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010.

Moniaga, Renita. *Indonesian Migrant Domestic Workers: A Case Study on Human Rights, Gender and Migration*. The New School Graduate Program in International Affairs (GPIA), Desember 2008.

Polimpung, Hizkia Yosie. "Kapitalisme dalam Kerlingan Negara-Berdaulat: Ulasan historis singkat dari era Imperium Romawi Agung sampai era Neoliberal". Makalah disajikan pada Workshop "Kapitalisme Global I", PACIVIS Center for Global Civil Society Studies, Depok, 25 Oktober-8 November 2011.

Sabban, Rima. *Migrant Worker in The United Arab Emirates: The Case of Female Domestic Workers*. GENPROM Working Paper No. 10. Series on Women and Migration, 2003.

Sugiri, Nita Aswita. *Fenomena Perdagangan Perempuan Pekerja Rumah Tangga (TKW-PRT) Indonesia: Perspektif Feminisme Marxist*. Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hubungan Internasional. Depok: Universitas Indonesia, 2004.

Internet

Bond, Patrick. *What is "uneven development"?*, diakses dari http://www.marxmail.org/faq/uneven_development.htm,

Chammartin, Gloria Moreno-Fontes. *Domestic Workers: Little Protection for the Unpaid*, diakses dari <http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=300>.

Esim, Simel dan Monica Smith. Ed. *Gender and Migration in Arab States: the Case of Domestic Workers*. ILO, 2004, diakses dari http://www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/downloads/publ/publ_26_eng.pdf.

Keuangan Negara, Perkembangan Moneter dan Lembaga-Lembaga Keuangan, Dokumen Bappenas, diakses dari <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1>

<http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6598&ei=NsbjT-TNBYTtrQeAst2NCQ&usg=AFQjCNFb3jcm5fa5koL0xvLoEkITq8vr9A&sig2=-7Arkc6gzd0zntdVF-vI4Q>.

Moratorium TKI Tetap Berlaku Bagi Negara-negara Tertentu, diakses di <http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2012/01/05/7575.html>.

Pemerintah Harus Serius. *Kompas* edisi online. 19 November 2010, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2010/11/19/03035430/Pemerintah.Harus.Serius>.

Silva, Elizabeth Bortolaia. "Brazilian Fordism in Historical Perspective", diakses dari http://www.cddc.vt.edu/digitalfordism/fordism_materials/Silva.pdf,

Suparno, Erman. *Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, diakses dari www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1700&Itemid=19Fpengaf5.

United Arab Emirates Yearbook 2000/2001 versi digital, diakses dari <http://www.uaeyearbook.com/>

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Responden	Data yang Dicari	Informasi yang Ditanyakan	Pertanyaan
Perempuan pekerja domestik migran di Persatuan Emirat Arab (PEA) yang telah pulang ke Indonesia	Alasan yang mendorong para perempuan pekerja domestik migran tersebut untuk berangkat kerja ke PEA, kondisi sosial-ekonomi-politik kedua negara yang melatari migrasi pekerja domestik Indonesia-PEA.	Segala pengalaman kerja mereka	<ul style="list-style-type: none"> • Abu Dhabi/Dubai itu seperti apa? Beda kah dengan Jakarta? • Waktu tiba di sana, kaget atau tidak dengan tempatnya, kerjanya? • Apa saja pekerjaan yang Ibu lakukan di sana? Seperti apa keluarga tempat Ibu bekerja? • Bagaimana jam kerjanya? Gajinya? • Banyak kah orang Indonesia di sana? Bagaimana pendapat tentang orang Indonesia di sana? Mengapa mereka memilih pekerja asal Indonesia? • Bagaimana persiapan sebelum berangkat? • Bagaimana kondisi kerja di sana?
Perempuan pekerja domestik migran di Persatuan Emirat Arab (PEA) yang telah pulang dan jejaring informal di sekitarnya	Alasan yang mendorong para perempuan pekerja domestik migran tersebut untuk berangkat kerja ke PEA, kondisi sosial-ekonomi-politik kedua negara yang melatari migrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Motivasi menjadi pekerja domestik migran • Persepsi tentang pekerja domestik migran 	<ul style="list-style-type: none"> • Dari mana pertama kali mendapat informasi ttg TKW-PLRT, termasuk cara-cara mendaftarnya? • Apakah ada keluarga atau teman yang pernah (kerja) ke PEA sebelumnya? • Mengapa memilih bekerja sebagai TKW-PLRT (Penata Layan Rumah Tangga)? Menapa tidak bekerja di sini saja? Kerja di pabrik misalnya? Bukankah perlindungan pemerintah atas TKW-PLRT masih sangat kurang?

	pekerja domestik Indonesia-PEA.		<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja syarat menjadi TKW-PLRT? Syarat teknis? Syarat keterampilan? • Apakah Ibu senang dengan pekerjaan ini? Apa yg Ibu sukai? Apa yang Ibu tidak suka dari pekerjaan ini? Apakah keluarga senang? • Bagaimana pekerjaan menjadi TKW-PLRT menurut Ibu?
Perempuan pekerja domestik migran di Persatuan Emirat Arab (PEA) yang telah pulang dan jejaring informal di sekitarnya	Alasan yang mendorong para perempuan pekerja domestik migran tersebut untuk berangkat kerja ke PEA, kondisi sosial-ekonomi-politik kedua negara yang melatari migrasi pekerja domestik Indonesia-PEA.	Persepsi tentang PEA sebagai negara tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengapa memilih PEA? Mengapa bukan Arab Saudi atau Malaysia yang lebih dekat? • Siapa/apa yang menyarankan mereka tentang pekerjaan di PEA? Apa yang mereka katakan tentang PEA?

Tuturan Para Sponsor dan Karyawan Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

1. Pak Ade (sponsor)

Pak Ade merupakan sponsor/broker yang menjadi penghubung antara PPTKIS yang Penulis datangi dengan para calon TKW-PLRT di daerah Sukabumi. Dari beliau-lah Penulis pertama kali mendapatkan informasi tentang Desa Gegerbintang, daerah pemasok TKW-PLRT dalam jumlah besar di

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Menurut beliau, faktor utama yang menjadi motivasi bekerja pada TWK-PLRT adalah faktor ekonomi.

“Di daerah Bu.. Minta maaf, Mbak Mita.. jangankan sarana pendidikan. Dari sini mungkin ke [menyebut nama tempat] dekat ya jalan kaki. Di tempat saya mungkin dari sini (Condet) ke Bogor kalau jalan kaki, untuk menuju sekolahan. Pakai motor masih mending, jalan kaki. Jalannya licin. Musim hujan, bayangin.. Seperti itu.” (Condet, 17 Mei 2012).

Dari Pak Ade pula Penulis mendapati pola prekarisasi yang bias nilai-nilai keagamaan sangat kental dalam bisnis pengiriman tenaga kerja domestik asal Indonesia ini. Ketika ditanya bagaimana para perempuan pekerja domestik migran ini dapat memilih menghadapi risiko kerja yang besar dan dapat bertahan (sehingga kemudian arus migrasinya tetap deras), Pak Ade menjawab, *“Cara bertahan hidup mereka, ya satu karena Allah menciptakan manusia, menciptakan dua alam, ada malam, siang. Laki-laki, perempuan, plus anaknya. Allah yang ngatur. Allah yang ngatur.”* Menurut Pak Ade, usaha pengiriman tenaga kerja domestik ini telah banyak mendatangkan manfaat bagi warga desa-desa terpencil yang jarang disorot oleh media.

“Yang positifnya, coba lihat! Kalau dia di sana bernasib baik, majikan baik, dia bisa setelah dua tahun, kontrak kerja, perpanjang, dia dipulengin sama majikan, ditawarkan ee.. cuti apa langsung pulang. Kalau dengan faktor kebutuhan dia pasti minta cuti. Dia dua bulan dapet cuti, berangkat lagi. Sampai sekarang itu, seingat saya, kakak saya dari tahun 2000.. bolak-balik, bolak-balik. Ya Alhamdulillah itu dari rumahnya gubuk, pake bambu, ada tikernya. Kalau tidur kejepit tangannya, pake bambu, sekarang sudah mempunyai rumah. Ada sisi baik.” (Condet, 17 Mei 2012).

Sisi positif yang lain, perbandingan kondisi kerja yang Pak Ade tawarkan antara bekerja di daerah dan berangkat kerja sebagai TKW-PLRT di luar negeri adalah sebagai berikut.

“Kalau punya sawah, insya Allah dia nggak kelaparan. Kalau nggak punya; (suaminya bekerja) dari berangkat pagi, pulang jam satu, pulang kerja, tidur kan pulang. Dapet dua puluh ribu dia. Di daerah Sukabumi. Yang nyangkut, baik itu di ladang maupun di sawah. Okelah sekarang, misalkan di sana ada bebek-bebek. Apakah bebek-bebek itu punya dia? Atau punya juragannya? Nah seperti itu.. Kalau punya juragannya dia sehari dikasih berapa? Dikasih lima belas ribu, anaknya empat. Harga beras berapa? Sembako di daerah, yang dari pemerintahnya masih seribu enam ratus, di daerah itu udah nyampe empat ribu lebih. Lima ribu..” Pak Adi menambahkan pula, *“Sebetulnya, ee baik itu sponsor, PJTKI, ee.. itu sangat membantu untuk kalangan orang miskin, menengah kecil ke bawah, kalau dah menengah ke atas, nggak.. ini dari menengah ke bawah.”* (Condet, 17 Mei 2012).

Pak Ade termasuk salah satu pihak yang dirugikan karena adanya moratorium TKI ke Arab Saudi sejak tahun lalu. Beliau menuturkannya sendiri bahwa jika Arab Saudi dibuka, maka penghasilannya sehari bisa mencapai lebih dari dua juta rupiah. Menurut Pak Ade, kemudahan teknis dan singkatnya waktu pengiriman TKW-PLRT ke Arab Saudi dibandingkan ke PEA membuat Arab Saudi tetap menjadi negara tujuan favorit (bagi sponsor?) pengiriman tenaga kerja domestik migran dari Indonesia.

2. Pak Ayi (sponsor)

Sabtu, 19 Mei 2012, Penulis berkunjung ke Desa Gegerbintang setelah mendapatkan informasi dari Pak Ade. Di sana, secara *snowballing* Penulis bertemu dengan Pak Ayi yang sudah pernah bekerja pada sebuah PPTKIS juga di Condet selama delapan tahun sebelumnya. Hingga saat Penulis melakukan tanya-jawab dengan Pak Ayi, beliau sedang mengerjakan usaha penyediaan tenaga kerja dari daerah tempat tinggalnya, di samping beliau juga mengerjakan lahan sawah. Menjadi seorang sponsor di daerah bukan hal yang sulit; jika seseorang pernah bekerja pada PPTKIS, mengetahui seluk-beluk usaha pengiriman tenaga kerja dan mempunyai jaringan di daerah mengenai penduduk setempat yang ingin menjadi

pekerja domestik migran serta modal yang cukup untuk memulai usaha penyediaan TKW-PLRT dari daerah, maka dengan segera seseorang dapat berperan sebagai sponsor dengan pendapatan yang cukup memuaskan. Penulis dapat menyaksikan hal tersebut dari kondisi tempat tinggal Pak Ayi yang tampak berbeda dibandingkan rumah-rumah penduduk yang ada di sekitarnya. Hal yang tak jauh berbeda dari apa yang Penulis tangkap mengenai peran para sponsor bagi usaha migrasi tenaga kerja domestik ini dari Pak Ade sebelumnya.

Dari Pak Ayi, Penulis menangkap gambaran pemberian uang fit oleh PPTKIS (uang yang diberikan kepada calon TKW-PLRT jika mereka lolos uji medikal) sebagai penarik minat bagi para TKW-PLRT untuk berangkat ke luar negeri. Mekanisme pemberian uang fit ini pun baru beberapa tahun ini dilaksanakan. Sebelumnya, dari penuturan Bu Ami saat ia pertama kali berangkat ke Abu Dhabi; justru ia-lah yang harus membayar sejumlah uang untuk mendaftar bekerja sebagai TKW-PLRT. Hal ini juga yang sempat diutarakan oleh Pak Ade kepada Penulis. Menurut penuturan Pak Ade, saat kakaknya berangkat bekerja ke Arab Saudi awal tahun 2000-an, gaji tiga bulan dipotong oleh sponsornya untuk membayar visa, selain itu untuk uji kesehatan pun biayanya sebesar dua ratus ribu rupiah. Beberapa tahun kemudian, sebagai penarik minat, beberapa PPTKIS memberikan insentif berupa uang saku untuk berangkat ke Jakarta dari daerah tempat tinggal calon TKW-PLRT, yang disampaikan melalui sponsor. Besaran uang saku ini pun variatif, bergantung pada sponsor sebagai penanggung jawab penyediaan tenaga kerja dari daerah. Seperti tuturan Pak Ayi berikut ini.

“Ya, kadang-kadang sama PT dikasih 5 juta, nanti sama ini kita kasih 500, jadi belum.. belum standar gede waktu itu. Kadang-kadang kan ada yang nggak dikasih juga sama yang berangkatin, masalahnya kebutuhan dia pun kita yang cukupin semua, gitu ya. Gitu.. habis dari uang saku habis, nanti kita minta jatah buat berangkatin.. seperti waktu 2005, 2006.. sampai.. ee.. PT banyak bersaing, bersaing, bersaing itu perusahaan.. jadi kan perusahaan juga, udah ke saya aja, ini saya kasih gede, ini saya kasih ini, kan saing juga, jadi akhirnya sampai minta fit, 5 juta dikasih sama sponsornya. Kadang kalau dikasih 5 juta, kita pun bagi. Yang berangkat kasih dua juta setengah. Kita pun dua juta

setengah, jadi jasa buat yang berangkatin. Semua kasih uang fit ini kan agar ada yang berangkat. Kadang diusahakan sama PT, kadang kita naikin juga. Jadi itu pun, Abu Dhabi itu udah segede semacam Saudi.” (Gegerbintung, Sukabumi, 19 Mei 2012).

Meski demikian bagi kebanyakan PPTKIS menurut Pak Ayi, pengiriman TKW-PLRT ke PEA merupakan usaha sampingan bila dibandingkan dengan ke Arab Saudi.

“PT-PT pun kalau ke Abu Dhabi, Uni Emirat itu sampingan. Yang diutamakan ke Saudi. Karena satu mungkin yang Abu Dhabi prosesnya lebih rumit, kan biodata sistemnya. Ini kan, kita foto waktu mau berangkat ke luar negeri, kadang-kadang ada yang ada halangan, nggak jadi berangkat.. padahal udah urus tiket, visa semuanya, nah ini kan rugi perusahaan.. Kalau Saudi kan beda lagi, visa nggak dari PT, kita proses langsung bisa.. Kalau Abu Dhabi kan sistemnya biodata. Kadang-kadang ada yang hamil kan itu, walaupun pakai KB, ya kita harus jaga. Jadi kalau Abu Dhabi, satu, kita bawa ke PT, dari PT kita bawa ke sini. Udah pasporan, nanti ada panggilan kita bawa lagi ke PT. Jadi ini bolak-balik, kadang transport ya dari kita aja. Kalau dari Saudi, sekali berangkat ke PT ya udah, langsung berangkat. Masalah gaji nggak terlalu berbeda dengan Saudi.. Ya kadang-kadang masalah sayur-sayuran (pembagian uang dari PPTKIS antara sponsor dan calon TKW-PLRT) itu.. kalau lagi banyak orang ya bisa turun, kalau lagi sedikit ya bisa naik juga.” (Gegerbintung, Sukabumi, 19 Mei 2012).

Sedangkan bagi para TKW-PLRT, dalam pandangan Pak Ayi, bekerja di PEA lebih menarik karena tidak seseram di Arab Saudi di mana para majikan perempuan kebanyakan tinggal di rumah seharian. Sedangkan di PEA, majikan laki-laki maupun perempuan lebih banyak menghabiskan waktu seharian di luar rumah untuk bekerja.

“Kalau Abu Dhabi kan mereka sibuk. Perempuan kerja di luar, laki-perempuan kerja di luar.. Jadi, mereka itu ditinggalin kerja itu, udah siap kerja gitu.. Kalau di Saudi kan, kalau orang Saudi di sana, biasanya... Kalau Saudi kan ada majikannya, kerja bareng.. tapi nggak semuanya seram gitu ya... Makanya di

Abu Dhabi kan diutamakan yang udah pada eks. Yang eks kan siap kerja, nggak, nggak perlu diajari majikan, soalnya mereka kan orang sibuk.” (Gegerbintung, Sukabumi, 19 Mei 2012).

Menurut penuturan Pak Ayi, bekerja sebagai TKW-PLRT itu syaratnya mudah:

“Yang penting bisa baca... Jadi kembali lagi, kalau memang sekarang kerjaan, jangankan di luar negeri ya. Di Indonesia pun, kalau pembantu udah rapi, bersih, apa. Apa yang harus dimarahin kalau emang udah rapi. Kalau kitanya males, udah pasti kita dimarahin gitu! Sama aja. Kadang-kadang males kerja atau apa.. Nah tu tadi, tergantung daripada niat yang pertamanya juga. Lebih baik capek kerja, digaji, daripada capek hati ya gitulah! Punya niat, yang kedua punya prinsip.” (Gegerbintung, Sukabumi, 19 Mei 2012).

Peran Balai Latihan Kerja dalam usaha pengiriman TKW-PLRT ke luar negeri ini pun sangat penting:

“Ya sebenarnya semua prosedur itu (prosedur pengiriman TKW-PLRT dari PPTKIS) udah bagus, cuman ginilah masalahnya, semua tenaga kerja itu tadi pada intinya harus pintar. Harus pintar.. Makanya ada BLK gitu kan, supaya kalau ada keluhan-kesah di luar negeri, dia nggak mengambil tindakan dengan kabur gitu kan.. Harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan.. Seharusnya begitu.. karena mereka nggak mau ribet, akhirnya diajakin teman, ‘Kabur yuk!’ Nah.. akhirnya kabur.. Mereka pun di sana yang ngajakin kabur itu berbisnis juga, nanti dijual lagi sama mereka.” (Gegerbintung, Sukabumi, 19 Mei 2012).

Permasalahan-permasalahan terkait TKW-PLRT pada umumnya, menurut beliau telah dimulai ketika calon TKW-PLRT ini belum berangkat. Karena itu, untuk meminimalisir terjadinya permasalahan di negara tujuan, Pak Ayi memiliki kebijakan sendiri.

“Kalau kita sementara, dibriefing dulu, sebelum berangkat, kamu atas dasar apa mau berangkat ke luar negeri? Karena satu, ekonomi tidak memadai, kadang begini... (walaupun ada cerita-cerita seram) Kan kita keyakinannya nasib. Karena

dia belum tahu kan majikan itu baik, majikan itu banyak anaknya. Rumah bertingkat-tingkat.. majikan cerewet. Tapi tergantung kita, kalau kita betul-betul kitanya ingin kerja, yang capek pun bisa hilang kalau udah dapat gaji, gitu istilahnya.. Jadi intinya ee.. karena udah niat. Niat... kedua, belum tahu nasib, semoga nasibnya baik. Nah kembali lagi ke yang tadi, yang jelas udah ada keteguhan niat pergi ke luar negeri. Mana mau sih sebenarnya ninggalin keluar padahal ada anak.. Kadang-kadang anaknya baru tiga bulan, empat bulan, nggak ada yang biayain beli susu, apa, ini, itu. Ya akhirnya, karena keadaan ekonomi harus.. Saya tahu ini, ada yang anaknya baru enam bulan ditinggalin, ada suami yang nggak kerja, ada yang kerja. Tujuannya mungkin bikin rumah, sawah...” (Gegerbintung, Sukabumi, 19 Mei 2012).

3. Pak Rizal (karyawan PPTKIS, bagian pemberangkatan TKW-PLRT)

Sebagai seorang yang berurusan dengan para TKW secara langsung; mengantar mereka hingga berangkat ke bandara, Pak Rizal cukup yakin bahwa beliau lebih memahami masalah yang dihadapi para TKW-PLRT daripada atasannya di PPTKIS yang menurutnya hanya memahami masalah teknis-teknis pelaksanaan bisnis pengiriman tenaga kerja. Menurut Pak Rizal, pekerjaan sebagai TKW-PLRT merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan bekerja di dalam negeri, sebagai buruh pabrik misalnya.

“Buat perbandingannya ya. Jadi, misalnya satu juta lima ratus. Di luar negeri kita bandingkan juga, meskipun dapet lebih... Sekarang hampir dua jutaan, ya.. Satu juta lebih.. Sejuta lima ratus juga.. Tapi kan UMR dalam negeri ini, mereka harus bayar kontrakan.. transport.. Ya kan? Akhirnya sisa lima ratusnya habis makan.. gitu kan? Kalau di luar negeri, kerja di luar negeri, mereka ni satu juta lima ratus ni utuh lho Mbak.” (Condet, 17 Mei 2012).

Di samping gaji yang lebih besar, bekerja sebagai TKW-PLRT tidak membutuhkan keterampilan tertentu, *“Yang penting bisa nyapu, bisa ngepel (tertawa)...”* Bahkan Pak Rizal meyakinkan Penulis bahwa terkadang, bekerja

sebagai TKW-PLRT ini cukup menggiurkan jika nasib mempertemukan TKW-PLRT kepada majikan yang baik hati dan kaya raya.

“Ada juga, malah ini pengalaman lho, betul ya.. Ini beneran Mbak. Jadi gini, dia ini bekas Emir, Qatar, rumah itu dah kayak gedong ya. Itu pembantunya aja tiga belas orang. Dari Indonesia semua itu.. Kebanyakan tidur. Kebanyakan tidur malah.. Nggak kerja-kerja dia.. Malah lebih enak lagi misalnya uda kerja dua bulan ya, dia kasih gaji buat dua tahun. Nah.. itulah. Buat kamu bangun rumah.. Ee, beli apa, bangun rumah apa-apa di kampung. Kayak gitu.. Aku kenal itu, pernah ketemu sama TKW-nya itu. Baru dua bulan kerja, dia kerja dikasih gaji buat dua tahun. Dirimu pulang, udah. Ini gaji kamu buat dua tahun. Kirim pulang ke orang tua kamu, bangun rumah. Jadi dia tu punya duit tu dah kayak apa.. Nggak ada arti lagi..” (Condet, 17 Mei 2012).

Beberapa kendala yang mungkin ditemui jika bekerja sebagai TKW-PLRT adalah faktor bahasa, meski demikian, *“Gini Mbak, faktor bahasa ni sama kayak.. anu.. Mbak taruhlah misalnya sebulan ni agak gagu-gagu ya, tiga bulan ni udah lancar ini. Dia gini.. faktornya kayak gini.. Terpaksa harus bisa, karena terpaksa harus bisa dia-nya kan? Karena dia berhubungan terus, sama orang Arab terus kan? Dia mendengar bahasa itu setiap hari. Jadi ibaratnya itu ke otak pasti masuk lho. Ya kan?”* Kendala ini tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan hasil kerja TKW-PLRT di luar negeri, *“Misalnya, kayak yang sukses itu dia dari sana ngirim duit Mbak, buat bangun rumah, beli tanah.. Ngirimnya ke daerah Indramayu, daerah Sukabumi.. Money changer, Western Union itu ma laku banget. Itu. Orang sekalinya ngirim duit dari sana sepuluh juta.. Satu TKW.. Misalnya, kayak yang sukses itu dia dari sana ngirim duit Mbak, buat bangun rumah, beli tanah.. Ngirimnya ke daerah Indramayu, daerah Sukabumi.. Money changer, Western Union itu ma laku banget. Itu. Orang sekalinya ngirim duit dari sana sepuluh juta.. Satu TKW..”* (Condet, 17 Mei 2012).

Sedangkan kendala lain yang lebih besar, dan merupakan kendala dari luar TKW-PLRT itu sendiri, menurut Pak Rizal para TKW-PLRT umumnya sudah mengetahui dan sudah siap dengan segala risikonya, *“Nah itu, itu bedanya orang*

Indonesia sama yang lain.. Ibaratnya gini, mereka ini kalau udah mau berangkat itu, mau apa aja di sana nanti udah siap. Udah siap mental. Mau menghadapin majikannya gimana nanti..” (Condet, 17 Mei 2012).

Menurut Pak Rizal, tingginya minat terhadap TKW-PLRT asal Indonesia di Timur Tengah disebabkan oleh beberapa faktor:

“Pertama, faktor agama. Sama-sama Islam. Terus terang ya di Arab Saudi itu ada juga orang Filipin lho. Tapi orang itu, dia waktu sekarang aja tu, kan Indonesia tutup, Filipin buka ya.. Tapi sedikit orang tu ngambil pembantunya dari Filipin. Karena dia, pembantu ini kan nanti ngurus anaknya. Terus terang nanti kalau pembantunya nyembah-nyembah anu, kan dia nggak mau juga. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, faktor kebersihan. Di sana itu bukan orang Indonesia doang yang jadi pembantu. Orang dari Afrika.. Dari Banglades, dari India, cuma.. cuman orang ini nggak mau kalau yang masak makanan dia itu orang India, yang.. Orang itu juga suka kebersihan. Dia kepinginnya yang masak itu orang Indonesia.” (Condet, 17 Mei 2012).

Dari keseluruhan tanya-jawab dengan para karyawan PPTKIS ini, Penulis mendapati ada semacam stereotip yang berkembang mengenai pekerja domestik migran asal negara lain, selain Indonesia, yang bekerja di Timur Tengah. Orang Afrika, India, Pakistan, Bangladesh, dianggap sebagai orang hitam yang berbau, tidak bersih, dan karenanya preferensi majikan memilih PLRT adalah kepada orang Indonesia yang ‘lebih bersih’.

4. Pak Adul (karyawan PPTKIS, bagian keamanan PPTKIS)

Pak Adul dulu bekerja di jalanan (tanpa menyebutkan secara spesifik) sebelum akhirnya bekerja sebagai bagian keamanan di PPTKIS yang dikunjungi oleh Penulis. Beliau memiliki pandangan unik mengenai TKW-PLRT terkait daerah asal kelahirannya, Papua.

“Oh dari Papua nggak ada (yang bekerja jadi TKW-PLRT). Karena dia di daerah sendiri sudah bisa cukup. Orang saya ke Jakarta ini karena istri saya orang Jakarta ya. Karena saya pernah hidup di Jakarta. Kalau balik ke Papua kan terasa jauh daripada di Jakarta ya.. Jadi saya tetapi bekerja di Jakarta. Pernah saya alami bekerja di Papua, jauh sekali pendapatan, jauh..” (Condet, 17 Mei 2012).

Dari pernyataannya, Pak Adul tampak menyadari bahwa gaji dari bekerja sebagai TKW-PLRT memang kecil. Namun jika sampai sekarang masih banyak yang ingin berangkat kerja sebagai TKW-PLRT, itu karena jumlah upah yang diterima tetap lebih besar jika bekerja di luar negeri daripada di Jakarta. Selain itu, *“(gaji mereka) Utuh. Karena mereka sudah tinggal di situ. Kalau ketemu majikan baik malah HP dikasih, dikasih duit. Gitu...”* (Condet, 17 Mei 2012).

Terkait banyaknya masalah yang dialami oleh para TKW-PLRT di negara tujuan, Pak Adul bertutur, *“...kan manusia ini pada dasarnya kan baik kok, cuma gimana yang datang aja. Yang datang lah yang harus menyesuaikan diri, itu aja. Itu nanti semua diajarin kok. Di BLK juga. Di PAP, PAP itu Pembekalan Akhir sebelum Pemberangkatan... Itu kan...”* (Condet, 17 Mei 2012).

5. Pak Sudarsono (karyawan PPTKIS, bagian keamanan PPTKIS)

Tuturan Pak Sudarsono memberikan gambaran bagaimana status dan situasi tertentu dapat memengaruhi mekanisme prekarisasi terhadap TKW-PLRT Indonesia yang umumnya merupakan warga negara dengan posisi ekonomi terendah dan tidak tinggal dalam masyarakat modern. Sehingga, pendekatan yang diambil oleh PPTKIS jika ada permasalahan dengan TKW-PLRT yang disalurkan, harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Pak Sudarsono merupakan aktor yang berperan sebagai penengah ketika terdapat masalah di antara PPTKIS dengan para TKW-PLRT. Ia beberapa kali dikirim oleh PPTKIS tersebut ke daerah-daerah pelosok, pemasok TKW-PLRT, untuk menyelesaikan masalah TKW-PLRT seperti tuntutan gaji yang tidak dibayar. Untuk

menyelesaikannya, PPTKIS tidak dapat sembarang mengutus orang. Katanya, *“Kita harus paham adat daerah gitu lho. Daerah ni, begini situasinya ya.. Kita ngotot pakai gigi, dia ngotot pakai golok. Kan gitu... Kalau saya kan udah paham, daerah-daerah udah paham.”* (Condet, 17 Mei 2012).

6. Pak Jum (karyawan PPTKIS, penerjemah Indonesia-Arab/Mutarjim)

Yang menarik dari penuturan Pak Jum ialah pengalamannya sebagai mutarjim di Arab Saudi. Beliau sebagai penerjemah Bahasa Indonesia-Arab akan diutus oleh perusahaan pengirim tenaga kerja Indonesia ke pengadilan, jika ada salah satu TKW-PLRT yang bermasalah. Tujuan dari adanya peran Mutarjim bagi perusahaan ketika menangani TKW-PLRT yang bermasalah adalah, *“..kita bukan membantu hal yang teknis.. tapi gimana caranya supaya anak itu biar tetap kerja. Itu aja intinya.. Tapi kalau dia mau onar, bikin permasalahan.. kita itu nggak bisa bantu, itu negara orang..”* Berikut tuturan pengalaman Pak Jum terkait pekerjaannya itu.

“Saya dua kali nenangin. Pertama, padahal kasusnya apa? Satu, kasusnya mau diperkosa. Akhirnya nggak mau kerja. Aku pulangin. Aku dipotong gaji sama majikan di sana, tempat bekerja. Karena kamu kerja nggak beres katanya.. Nah itu.. Kalau saya di sana kadang-kadang jahat. Kalau saya ndak bisa ngatasi, ya udah. Harus bagaimana. Lha itu.. daripada saya dipotong gaji.. Kedua kali saya membelain salah..” (Condet, 17 Mei 2012).